



**KELEMBAGAAN UPAH USAHATANI TEMBAKAU
DI KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh
Yuanditra Wahyu Widyanto
161510601110

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**KELEMBAGAAN UPAH USAHATANI TEMBAKAU
DI KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Agribisnis (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pertanian

Oleh
Yuanditra Wahyu Widyanto
161510601110

Dosen Pembimbing
Ebban Bagus Kuntadi, SP., M.Sc.

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua dan saudara kandung penulis yakni Bapak Lilik Soeprijanto, Ibu Susi Wahyuningsih, dan Adik Tegar Hendra Wahyu Soeprijanto yang senantiasa memberikan bentuk dukungan moral, materi, dan doa demi kelancaran menyelesaikan studi jenjang Sarjana/S1.
2. Guru-guru di TK Kemala Bhayangkari Jombang, SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang, SMPN 1 Jombang, SMAN 2 Jombang, dan Fakultas Pertanian Universitas Jember.
3. Almamater tercinta Program Studi Agribisnis Universitas Jember.
4. Teman-teman mahasiswa Agribisnis Universitas Jember angkatan tahun 2016.
5. Semua petani tembakau yang telah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

MOTTO

“Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri”

(Pramoedya Ananta Toer)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah:286)



PERNYATAAN

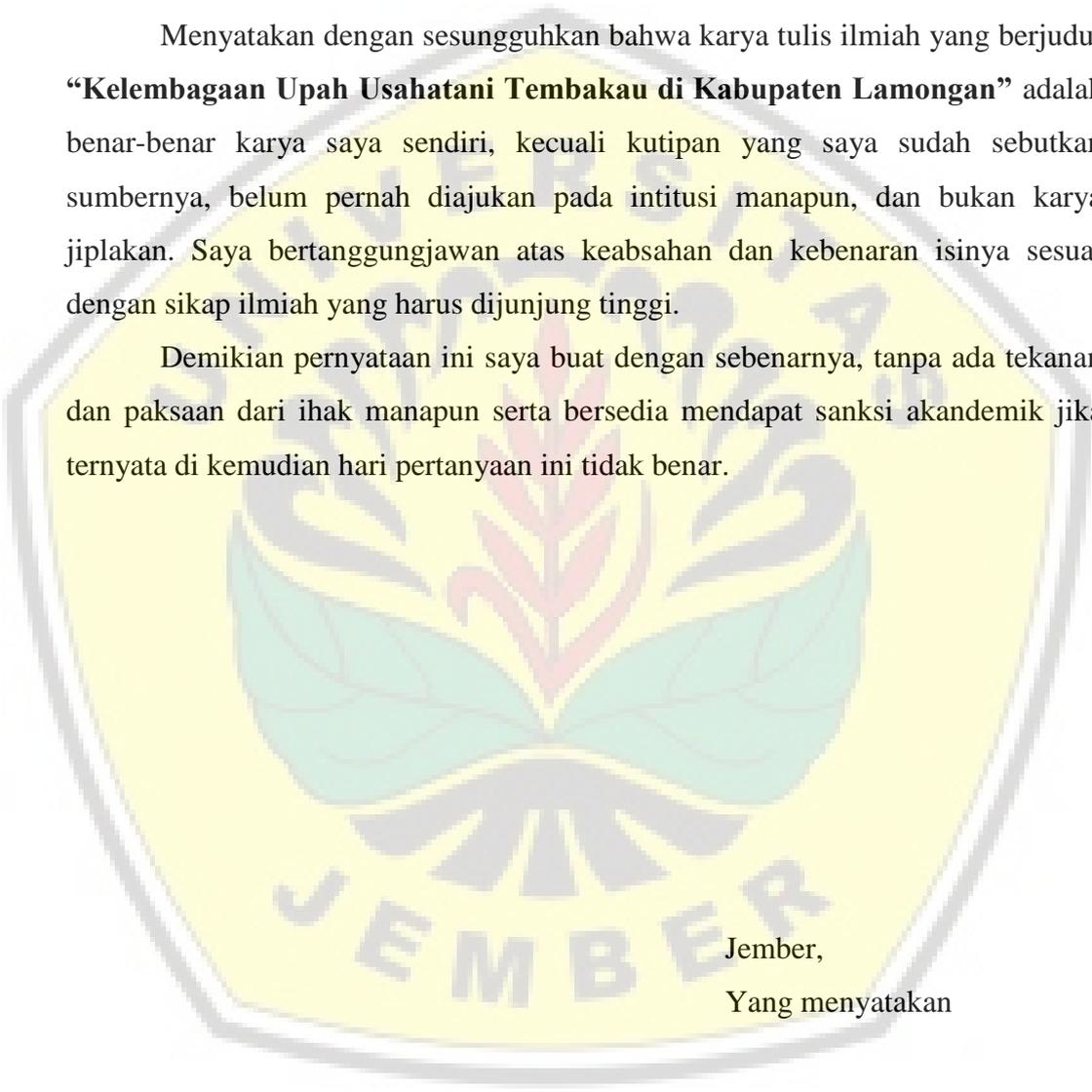
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yuanditra Wahyu Widyanto

NIM : 161510601110

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Kelembagaan Upah Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan”** adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang saya sudah sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada intitusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawan atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dariihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pertanyaan ini tidak benar.



Jember,

Yang menyatakan

Yuanditra Wahyu Widyanto

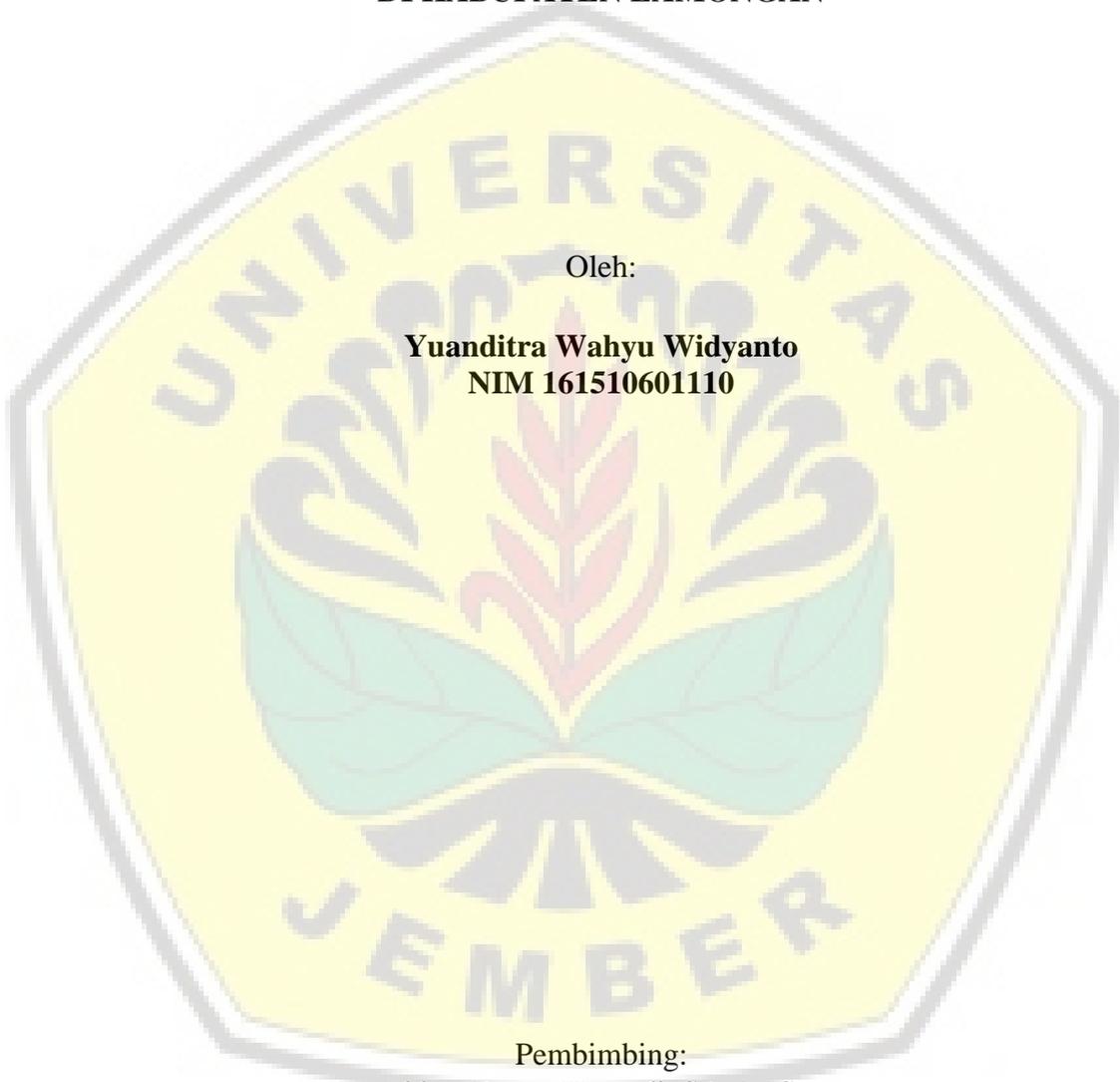
NIM. 161510601110

SKRIPSI

**KELEMBAGAAN UPAH USAHATANI TEMBAKAU
DI KABUPATEN LAMONGAN**

Oleh:

Yuanditra Wahyu Widyanto
NIM 161510601110



Pembimbing:

Ebban Bagus Kuntadi, SP., M.Sc.
NIP.198002202006041002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Kelembagaan Upah Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan**” telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal :

Tempat :

Dosen Pembimbing Skripsi,

Ebban Bagus Kuntadi, SP., M.Sc
NIP.198002202006041002

Penguji Utama,

Penguji Anggota,

Dr. Ir. Evita Soliha Hani, MP.
NIP. 196309031990022001

Arvo Fajar Sunartomo, SP. M.Si.
NIP. 197401161999031001

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Soetriono, MP.
NIP. 196403041989021001

RINGKASAN

Kelembagaan Upah Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan; Yuanditra Wahyu Widyanto, 161510601100; Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Tembakau merupakan salah satu komoditas unggul yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat petani di Indonesia. Tembakau memiliki nilai ekonomis tinggi, akan tetapi penuh resiko sehingga perlu penanganan secara intensif. Hal tersebut menyebabkan peran tenaga kerja penting untuk membantu kesuksesan usahatani tembakau. Jumlah tenaga kerja yang diserap atau digunakan oleh petani akan berpengaruh terhadap total biaya yang dikeluarkan oleh petani, mengingat untuk memperoleh tenaga kerja tersebut petani memberikan upah sebagai pembayaran atas jasa fisik dan mental yang diberikan oleh tenaga kerja. Sistem kelembagaan upah merupakan suatu tata cara pengupahan yang diberlakukan dan disepakati antara petani dan tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka total biaya yang dikeluarkan petani semakin besar, sehingga akan berdampak pada keuntungan yang diterima petani. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi sistem kelembagaan upah yang diterapkan oleh petani tembakau, (2) mengidentifikasi curahan tenaga kerja yang digunakan petani tembakau, dan (3) mengidentifikasi efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh petani.

Lokasi penelitian terletak di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, yang mana daerah tersebut satu-satunya yang masih mempertahankan budaya *irutan* untuk memperoleh tenaga kerja pada usahatani tembakau. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitik. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* dengan jumlah sampel ditentukan dengan melakukan perhitungan rumus *slovin*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) usahatani tembakau menerapkan 3 sistem kelembagaan upah yaitu sistem kelembagaan upah harian, borongan, dan *irutan* untuk memperoleh tenaga kerja tembakau. (2) Total rata-rata curahan tenaga kerja pada seluruh tahapan usahatani tembakau yaitu sebesar 262,72

HOK yang terdiri dari 149,10 HOK tenaga kerja pria dan 113,62 HOK tenaga kerja wanita. (3) Nilai *R/C ratio* pada usahatani tembakau sebesar 1,95. Nilai tersebut menunjukkan bahwa usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan dapat dikatakan efisien, karena nilai *R/C ratio* lebih dari 1.



SUMMARY

Tobacco Farming Wage Institution in Lamongan District; Yuanditra Wahyu Widyanto, 161510601110; Agribusiness Study Program, Department of Agricultural Social Economics, Faculty of Agriculture, Jember University.

Tobacco is one of a superior commodity that is widely cultivated by farming communities in Indonesia. The economic value of tobacco is high, but it also has many risks so it has to be handled intensively. This causes the role of labor is important to help the success of tobacco farming. The amount of labors that is absorbed or used considering that, farmers need to pay their labors as payment of the physical and mental retribution. The wage institutional system is a wage procedure that is enforced and agreed upon between farmers and workers. The more labor that the farmer used, the higher total costs that needs to be paid by farmers, so that it will have an impact on the benefits received by farmers. This study aims to (1) identify the institutional wage system applied by tobacco farmers, (2) identify the outpouring of labor used by tobacco farmers, and (3) identify the cost efficiency incurred by farmers.

The research location is located in Mendogo Village, Ngimbang District, Lamongan Regency, which is the only area that still maintains a culture of trance to obtain labor in tobacco farming. The research method used is descriptive analytic method. The sample determination method in this study used simple random sampling technique with the number of samples determined by calculating the Slovin formula.

The results of the study indicate that (1) tobacco farming has three different wage institutional system, they are daily labor, piece-rate labor, and *irutan* (one of local wage institutional) for obtaining tobacco labor. (2) The total average amount of labor at all stages of tobacco farming is 262,72 HOK, consisting of 149,10 HOK for men and 113,62 HOK for women. (3) The R / C ratio value in tobacco farming is 1.95. This value shows that tobacco farming in Lamongan Regency is efficient, because the R / C ratio is more than 1.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Kelembagaan Upah Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan”**. Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Soetriono. MP., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember.
2. M. Rondhi, SP., MP., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.
3. Ebban Bagus Kuntadi, SP. M.Sc., selaku Dosen Pembimbing dan Dr. Ir. Evita Soliha Hani, MP., selaku Dosen Penguji Utama yang selalu meluangkan waktu untuk dapat memberikan bimbingan, nasihat pengalaman serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Aryo Fajar Sunartomo, SP. M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis selama masa studi dan selama pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Agribisnis dan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, saran, dan kritik kepada penulis
6. Kepala Dusun Mawut Desa Mendogo yakni Bapak Pambudi yang telah menyediakan tempat tinggal dan membantu penulis untuk menyelesaikan kegiatan penelitian ini, dan seluruh petani yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan informasi berkenaan dengan kebutuhan penelitian ini.
7. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Lilik Soeprijanto, Ibu Susi Wahyuningsih, dan Adik Tegar Hendra Wahyu Soeprijanto yang senantiasa

memberi dukungan dalam bentuk moral, materi, serta doa demi kelancaran dalam menyelesaikan kegiatan studi penulis.

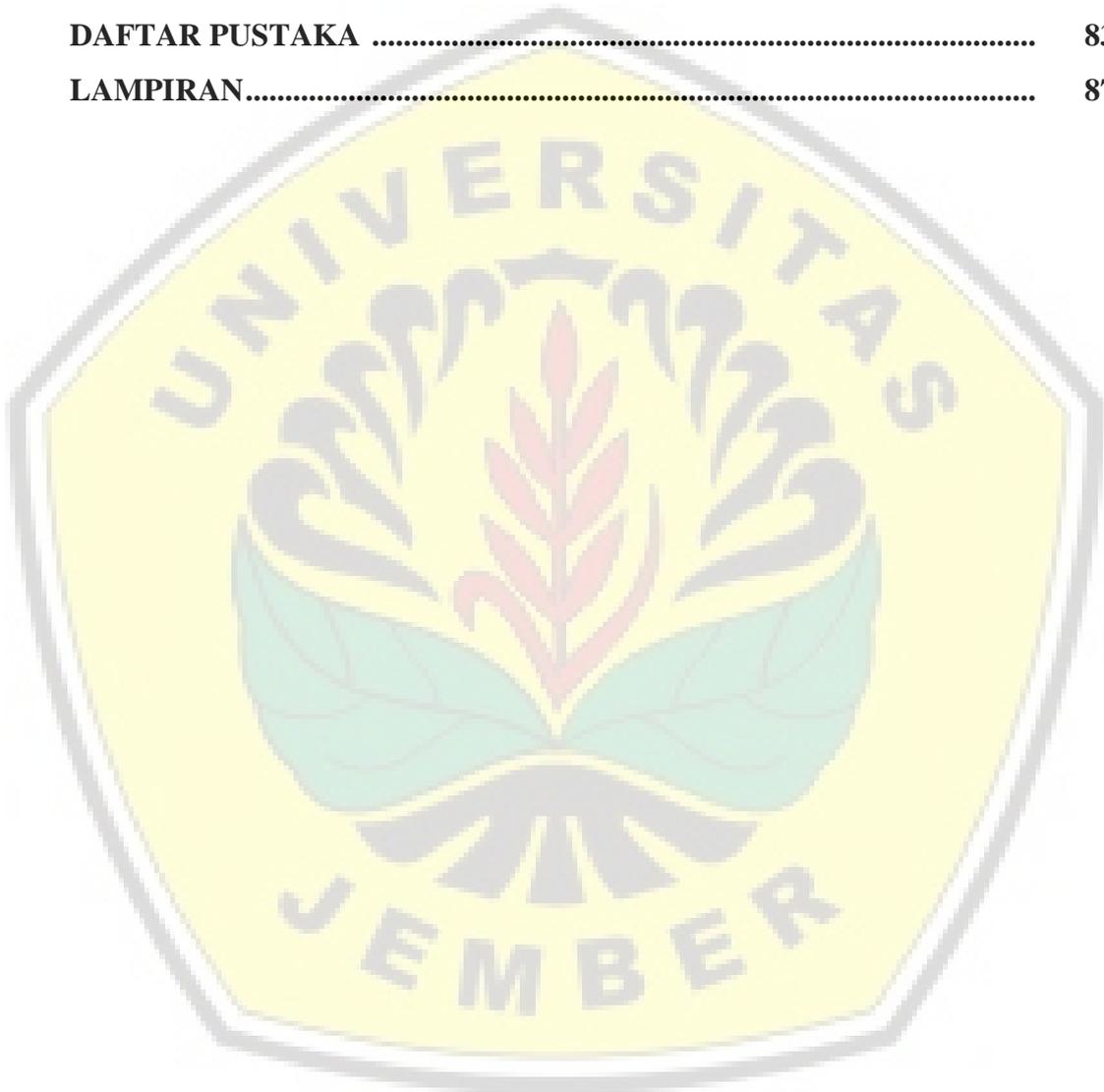
8. Bening Dwita Kartikasari yang selalu memberi dukungan, semangat, dan doa sejak awal memasuki jenjang pendidikan Sarjana/S1 hingga dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Sahabat terdekat Nur Amalul Febriyanto, Raka Dwi Apriliadi, Zangky Firmansyah, Saifur Rohman, Nuris Shobah, Kintani Sekarkundi Lahitani, dan Amalia Wara Respatingrum atas semua bantuan, dukungan, semangat, dan doa sehingga penulis mampu melewati masa-masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir.
10. Teman-teman saya Ikhwannul Fahmy, Yanuar Dwi Firdaus, Anugrah Sutejo, Nikolas Dwi, Bagus Nur Cahyo, Andriawan Fathorozzi, Nur Hidayatullah, Faisal Reza Mahendra, Ekik Vikny, Dhea Ayu Pramesti, Cindy Apriliasari, Elinda Devitasari, Firda Nur Laila yang telah setia menemani dalam suka maupun duka selama penulis menjalani masa perkuliahan hingga akhir.
11. Rekan-rekan pengurus BEM FP Unej periode 2018, pengurus UKMO periode 2018, pengurus RADIS FM periode 2019, dan pengurus HIMASETA periode 2019 atas kesempatan, ilmu dan pengalaman yang diberikan selama menjalani masa studi.
12. Teman-teman Program Studi Agribisnis Angkatan 2016 Fakultas Pertanian Universitas Jember atas kebersamaan, bantuan, semangat, dan informasi selama proses perkuliahan hingga proses pembuatan tugas akhir.
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Manfaat	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Komoditas Tembakau.....	12
2.2.2 Usahatani Tembakau	15
2.2.3 Teori Tenaga Kerja dan Curahan Tenaga Kerja.....	19
2.2.4 Teori Upah.....	22

2.2.5 Konsep Kelembagaan.....	26
2.2.6 Konsep Kebudayaan dan Kearifan Lokal.....	28
2.2.7 Teori Biaya	31
2.2.8 Konsep Penerimaan.....	34
2.2.9 Efisiensi Biaya.....	35
2.3 Kerangka Pemikiran	36
2.4 Hipotesis.....	41
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian	42
3.2 Metode Penelitian	42
3.3 Metode Pengambilan Contoh	43
3.4 Metode Pengumpulan Data	45
3.5 Metode Analisis Data	46
3.6 Definisi Operasional	48
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	51
4.1.1 Keadaan Geografis.....	51
4.1.2 Keadaan Penduduk	52
4.1.3 Struktur Mata Pencaharian Penduduk.....	52
4.1.4 Karakteristik Responden.....	53
4.2 Sistem Kelembagaan Upah Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan.....	56
4.2.1 Sistem Kelembagaan Upah Harian	57
4.2.2 Sistem Kelembagaan Upah Borongan	59
4.2.3 Sistem Kelembagaan Upah <i>Irutan</i>	61
4.3 Curahan Tenaga Kerja Setiap Tahapan Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan	66
4.4 Efisiensi Biaya Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan	75

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Lima Provinsi dengan Produksi Tembakau Terbesar tahun 2017	2
1.2 Sepuluh Kabupaten dengan Produksi Tembakau Terbesar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	3
2.1 Curahan Tenaga Kerja pada Setiap Tahapan Usahatani Tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok tahun 2015	10
4.1 Jumlah Penduduk Desa Mendogo berdasarkan Jenis Kelamin	52
4.2 Jumlah Penduduk Desa Mendogo berdasarkan Mata Pencaharian	53
4.3 Distribusi Petani Responden berdasarkan Usia	54
4.4 Distribusi Petani Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
4.5 Distribusi Petani Responden Berdasarkan Luas Lahan	55
4.6 Curahan Tenaga Kerja Setiap Tahapan Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan	67
4.7 Curahan Tenaga Kerja pada Tahap Pembibitan Tembakau di Kabupaten Lamongan	68
4.8 Curahan Tenaga Kerja pada Tahap Persiapan Media Tanam Tembakau di Kabupaten Lamongan	69
4.9 Curahan Tenaga Kerja pada Tahap Penanaman Tembakau di Kabupaten Lamongan	70
4.10 Curahan Tenaga Kerja pada Tahapan Pemeliharaan Tembakau di Kabupaten Lamongan	71
4.11 Curahan Tenaga Kerja pada Tahap Panen Tembakau di Kabupaten Lamongan	72
4.12 Curahan Tenaga Kerja pada Tahap Pasca Panen Tembakau di Kabupaten Lamongan	73
4.13 Biaya Tetap, Biaya Variabel, dan Total Biaya Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan	76
4.14 Penerimaan Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan	78
4.15 Perhitungan <i>R/C Ratio</i> pada Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Keseimbangan Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja	25
2.2 Tingkatan Kelembagaan dalam Pengambilan Keputusan	27
2.3 Skema Kerangka Pemikiran	40
4.1 Skema Sistem Kelembagaan Upah Harian	59
4.2 Skema Sistem Kelembagaan Upah Borongan	61
4.3 Skema Sistem Kelembagaan Upah <i>Irutan</i>	65



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Data Responden Petani Tembakau	87
2a. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Tembakau Tahap Pembibitan	89
2b. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Tembakau Tahap Persiapan Media Tanam	91
2c. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Tembakau Tahap Penanaman.....	93
2d. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Tembakau Tahap Pembeliharaan	95
2e. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Tembakau Tahap Panen	99
2f. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Tembakau Tahap Pasca Panen	101
3a. Sistem Kelembagaan Upah Tahap Pembibitan.....	103
3b. Sistem Kelembagaan Upah Tahap Persiapan Media Tanam	105
3c. Sistem Kelembagaan Upah Tahap Penanaman	107
3d. Sistem Kelembagaan Upah Tahap Pemeliharaan	109
3e. Sistem Kelembagaan Upah Tahap Panen	111
3f. Sistem Kelembagaan Upah Tahap Pasca Panen	113
4a. Biaya Tetap Usahatani Tembakau	115
4b. Biaya Variabel Usahatani Tembakau	119
5. Penerimaan Usahatani Tembakau.....	125
6. Analisis R/C Ratio	127
7. Kuesioner.....	128
8. Dokumentasi	144

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tembakau merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Komoditas tembakau di Indonesia menjadi salah satu komoditas penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Peran penting komoditas tembakau dalam perekonomian nasional dapat dilihat dari kontribusi hasil usahatani tembakau sebagai penyedia bahan baku utama Industri Hasil Tembakau (IHT), penyumbang devisa negara melalui cukai dan pajak produk hasil tembakau, serta penyedia lapangan pekerjaan dalam skala yang besar (Khairiyah *et al*, 2018). Penerimaan cukai dan pajak pada Industri Hasil Tembakau di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Industri Hasil Tembakau (IHT) mampu menyumbang penerimaan cukai sebesar Rp. 138,69 triliun atau 96,65 persen dari total penerimaan cukai nasional (Kemenprin, 2017).

Komoditas tembakau memiliki peran penting dalam proses penyerapan tenaga kerja, selain mampu menyumbang devisa dari cukai dan pajak Industri Hasil Tembakau (IHT) tersebut. Kegiatan subsektor perkebunan komoditas tembakau merupakan suatu rangkaian yang panjang dimulai dari persiapan usahatani, proses budidaya atau usahatani, hingga tembakau masuk ke proses pengolahan pada Industri Hasil Tembakau (IHT). Rangkaian kegiatan usahatani tembakau memerlukan penanganan yang intensif pada setiap tahapannya sehingga tenaga kerja memiliki peran besar. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Ruslan *et al* (2015), yang menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja pada kegiatan usahatani tembakau mencapai 344,44 HOK per hektar lahan. Tingginya angka penyerapan tenaga kerja tersebut disebabkan oleh banyaknya tahapan pada kegiatan usahatani tembakau.

Besarnya tenaga kerja yang dibutuhkan pada kegiatan usahatani tembakau berdampak pada tingginya biaya usahatani tembakau. Hal tersebut juga akan berdampak pada efisiensi biaya kegiatan usahatani tembakau. Menurut Syarif *et al* (2013), menjelaskan bahwa proses pengolahan tembakau merupakan serangkaian

kegiatan padat karya atau minim sekali proses mekanisasi sehingga memerlukan tenaga kerja yang cukup besar dan berdampak pada total biaya yang tinggi juga. Jumlah tenaga kerja berlebih atau penyerapan dengan jumlah besar pada kegiatan usahatani tembakau tidak selalu mengakibatkan peningkatan jumlah produksi, hal tersebut justru akan berdampak pada penurunan pendapatan yang diterima oleh petani tembakau (Fauziyah, 2010). Hal tersebut memberi implikasi bahwa besarnya penggunaan tenaga kerja pada kegiatan usahatani tembakau akan berdampak pada peningkatan total biaya dan belum tentu meningkatkan hasil produksi tembakau.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi basis kegiatan subsektor perkebunan tembakau di Indonesia. Provinsi Jawa Timur memiliki luas lahan tembakau sebesar 100.750 ha dan hasil produksi tembakau mencapai 79.442 ton. Jumlah tersebut merupakan jumlah produksi dan luas lahan tembakau terbesar apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berikut adalah data lima provinsi dengan jumlah produksi dan luas lahan tembakau terbesar di Indonesia.

Tabel 1.1 Lima Provinsi dengan Produksi Tembakau Terbesar tahun 2017.

No	Provinsi	Produksi (ton)	Presentase (%)
1	Jawa Timur	79.442	43,86
2	NTB	43.971	24,27
3	Jawa Tengah	38.341	21,17
4	Jawa Barat	8.498	4,69
5	Aceh	2.017	1,11
6	Lainnya	8.873	4,90
Total		181.142	100,00

Sumber : Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten penghasil tembakau di Jawa Timur. Data produksi tembakau (tabel 1.2) menunjukkan bahwa produksi tembakau Kabupaten Lamongan mencapai 8.186 ton. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Lamongan berada pada peringkat ke tujuh sebagai daerah penghasil tembakau di Jawa Timur. Usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan mayoritas mengelola produk hasil tembakau dalam bentuk tembakau rajangan, dengan jenis tembakau Jawa dan Manilo. Kabupaten Lamongan bukan daerah penghasil

tembakau terbesar di Provinsi Jawa Timur, akan tetapi wilayah Kabupaten Lamongan sangat berpotensi untuk dikembangkan kegiatan pada subsektor perkebunan komoditas tembakau.

Tabel 1.2 Sepuluh Kabupaten dengan produksi tembakau terbesar di Provinsi Jawa Timur tahun 2018.

No	Kabupaten	Produksi (ton)	Presentase (%)
1	Jember	26.103	20,70
2	Pamekasan	18.984	15,06
3	Probolinggo	12.450	9,88
4	Bojonegoro	10.233	8,12
5	Bondowoso	9.380	7,44
6	Situbondo	9.028	7,16
7	Lamongan	8.186	6,49
8	Sumenep	7.707	6,11
9	Jombang	5.909	4,69
10	Sampang	3.509	2,78
11	Lainnya	14.586	11,57
Total		126.075	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019.

Kegiatan usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan tersebar di wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Lamongan. Komoditas tembakau yang diusahakan petani di Kabupaten Lamongan merupakan jenis tembakau Jawa rajangan dengan varietas tembakau Jinten dan Manilo. Tahapan-tahapan usahatani tembakau terdiri dari pembibitan, persiapan media tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, serta pasca panen. Usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan tersebut memiliki perbedaan dalam pengelolaannya, termasuk hal pengelolaan tenaga kerja atau buruh tani tembakau. Perbedaan pengelolaan tenaga kerja tersebut terletak pada sistem kelembagaan upah yang diberlakukan untuk memperoleh atau menyerap tenaga kerja tembakau, yang mana hal tersebut tidak diterapkan pada wilayah di luar Kabupaten Lamongan. Sistem kelembagaan upah tersebut yaitu sistem *irutan* yang didasarkan pada prinsip saling membantu atau gotong-royong. Pengelolaan tenaga kerja pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan juga menerapkan sistem kelembagaan upah lainnya yang secara umum dilakukan pada usahatani tembakau. Sistem kelembagaan upah tersebut yaitu sistem upah harian

dan sistem upah borongan, sehingga sistem kelembagaan upah yang diberlakukan pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan meliputi upah borongan, upah harian, dan *irutan*.

Sistem kelembagaan upah yang berlaku pada kegiatan usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan tersebut berpengaruh terhadap besarnya biaya yang dikeluarkan oleh petani tembakau. Petani tembakau di Kabupaten Lamongan menggunakan mekanisme pengupahan harian, borongan, dan lainnya (*irutan*) atas dasar kebutuhan tenaga kerja atau buruh tani pada setiap tahapan usahatani tembakau. Menurut Suratiyah (2015), menyatakan bahwa upah borongan merupakan upah yang diberikan atas dasar volume atau hasil yang telah dikerjakan oleh tenaga kerja dan cenderung dilakukan pada kegiatan membutuhkan penyelesaian yang cepat. Upah harian merupakan sistem pengupahan yang diberikan secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran (Adisu, 2008).

Sistem kelembagaan upah *irutan* merupakan sistem kelembagaan yang diterapkan untuk mendapatkan tenaga kerja, namun petani tidak memberikan upah berupa uang tunai melainkan bentuk imbalan balas jasa untuk membantu pekerjaan usahatani milik tenaga kerjanya. Sistem kelembagaan upah *irutan* adalah salah satu kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Lamongan yang tidak ada di wilayah lain di luar Kabupaten Lamongan yang sampai saat ini masih dipertahankan. Sistem kelembagaan upah borongan, upah harian, dan *irutan* tersebut diterapkan pada kegiatan usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan, namun belum diketahui dalam tahapan-tahapan apa model kelembagaan upah tersebut diberlakukan dan usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan tersebut efisien atau memberi keuntungan bagi petani.

Penelitian ini terdapat tiga topik dalam mengidentifikasi sistem kelembagaan upah usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan. Topik pertama dalam kegiatan penelitian ini akan meneliti mengenai sistem kelembagaan upah yang berlaku pada kegiatan usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan. Sistem kelembagaan upah berkaitan dengan sistem pengupahan yang diberlakukan oleh petani tembakau kepada tenaga kerja tembakau. Topik penelitian mengenai sistem kelembagaan upah usahatani tembakau sudah diteliti oleh Tyas (2019), yang

menjelaskan bahwa terdapat sistem *saya* untuk menggantikan pengupahan berupa uang tunai kepada tenaga kerja tembakau di Desa Sampirejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Sistem *saya* ini sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja dengan cara bergiliran untuk membantu pekerjaan pada tahapan usahatani tembakau antara petani satu dengan lainnya. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah hanya menjelaskan sistem pengupahan *saya* pada usahatani tembakau, belum membahas sistem kelembagaan upah lainnya yang diterapkan pada kegiatan usahatani tembakau. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian ini akan melengkapi dengan menganalisis sistem kelembagaan upah lainnya pada kegiatan usahatani tembakau.

Topik kedua penelitian ini yaitu mengenai curahan tenaga kerja pada usahatani tembakau. Topik penelitian mengenai curahan tenaga kerja pada usahatani tembakau sudah diteliti oleh Ruslan *et al* (2015), yang menjelaskan bahwa pada kegiatan usahatani tembakau Virginia di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tahapan yang dilakukan pada kegiatan usahatani tembakau dimulai dari pembibitan hingga pasca panen. Penelitian tersebut telah menjelaskan jumlah tenaga kerja pada setiap tahapan usahatani tembakau, serta jumlah upah rata-rata pada setiap tahapan usahatani tembakau. Penelitian tersebut belum menjelaskan mengenai jumlah upah yang diberikan apabila berlaku sistem kelembagaan upah atas dasar rasa gotong-royong. Dengan adanya keunikan sistem kelembagaan upah *irutan* pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan, maka penelitian ini akan melengkapi dengan menganalisis jumlah upah yang diberikan atas dasar rasa gotong-royong tersebut.

Topik ketiga dalam penelitian ini akan menganalisis efisiensi biaya usahatani tembakau. Topik penelitian mengenai efisiensi biaya usahatani tembakau sudah diteliti oleh Putri *et al* (2015), penelitian tersebut menjelaskan bahwa biaya tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap total biaya sehingga akan berdampak pada efisiensi biaya usahatani tembakau. Kekurangan penelitian tersebut hanya menjelaskan secara umum total biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja pada usahatani tembakau. Penelitian kelembagaan upah usahatani tembakau di

Kabupaten Lamongan ini akan melengkapi penelitian tersebut dengan menganalisis efisiensi biaya usahatani tembakau atas dasar sistem kelembagaan upah yang diterapkan yaitu sistem harian, sistem borongan, dan sistem *irutan*.

Hasil penelitian mengenai kelembagaan upah usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan ini penting untuk mengetahui sistem pengelolaan tenaga kerja yang baik pada usahatani tembakau. Pengelolaan tenaga kerja yang baik dapat membantu petani dalam mengoptimalkan produksi tembakau. Pengelolaan tenaga kerja yang baik juga dapat menekan biaya usahatani tembakau sehingga kegiatan usahatani tembakau semakin efisien dan petani mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraannya. Tembakau merupakan komoditas penting yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan, sehingga penelitian tentang kelembagaan upah ini sangat penting dilakukan untuk pengembangan kegiatan usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kelembagaan upah yang berlaku pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana curahan tenaga kerja setiap tahapan usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana efisiensi biaya pada kegiatan usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengidentifikasi sistem kelembagaan upah yang berlaku pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengidentifikasi curahan tenaga kerja setiap tahapan usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan.
3. Untuk mengidentifikasi efisiensi biaya usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan.

1.3.2 Manfaat

1. Bagi petani, sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan sistem kelembagaan upah pada kegiatan usahatani tembakau.
2. Bagi peneliti, untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis dan menganalisis suatu permasalahan berdasarkan fakta dan data yang tersedia sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan referensi dalam pembentukan regulasi mengenai tenaga kerja pada usahatani tembakau.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Tyas (2019) dengan judul “Sistem *Saya* Dalam Pertanian Tembakau di Desa Semampirejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan” yang menjelaskan bahwa terdapat suatu sistem pengupahan *saya* yang berlaku atas dasar rasa gotong-royong antar petani tembakau. Sistem *saya* tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Semampirejo berkaitan dalam kegiatan sosial seperti membantu dalam membangun rumah, gotong-royong membantu masyarakat yang terkena musibah, dan termasuk juga pada kegiatan usahatani. Sistem *saya* yang diberlakukan sebagai bentuk pengganti upah uang tunai, yang mana sistem *saya* tersebut lebih mengarah pada kegiatan tolong menolong antar sesama petani tembakau dalam mengurus tahapan usahatani tembakau di Desa Semampirejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Sistem *saya* tersebut dilakukan pada seluruh tahapan usahatani tembakau dari awal proses persiapan lahan pertanaman tembakau, penanaman dan perawatan tanaman, hingga pada proses panen dan pasca panen tembakau. Kegiatan *saya* ini dilakukan dengan menggunakan prinsip *resiprositas* yang artinya kegiatan *saya* ini dilakukan tanpa adanya imbalan apapun. Petani pemilik lahan hanya menyediakan makan siang, minum, dan rokok sebagai imbalan kepada buruh tani yang sedang membantu mengerjakan tahapan usahatannya.

Penelitian Indarti *et al.* (2016) dengan judul “Transformasi Pertanian dan Diferensiasi Sosial Ekonomi Petani di Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang” menyatakan bahwa kegiatan usahatani tembakau bisa dilakukan sampai malam hari pada kondisi hasil panen yang banyak sehingga berpengaruh terhadap sistem pengupahan yang diberlakukan dan jumlah upah yang diterima buruhtani. Sistem upah yang diterapkan yaitu sistem upah harian lepas, artinya buruh tani hanya menerima penghasilan upah uang tunai dan petani atau pemilik lahan tidak memberi jatah makan dan minum selama kegiatan usahatani dari pagi hingga sore. Upah harian yang diterima pria sebesar Rp. 27.500 dan Rp. 17.500 untuk buruh tani perempuan. Jam lembur yang diterapkan oleh petani hingga malam berdampak

pada peningkatan penghasilan buruh tani, namun di sisi petani mengalami peningkatan biaya tenaga kerja. Upah yang diberikan kepada buruh tani sebesar Rp. 4.000 per jam lembur untuk buruh tani perempuan dan Rp. 6.000 per jam lembur untuk buruh tani pria.

Penelitian Ilmiah (2015) dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Bagian Produksi PR. Trubus Alami Malang” menyatakan bahwa sistem upah harian dan upah borongan diberlakukan pada tahapan-tahapan produksi tertentu. Sistem upah harian diterapkan untuk tenaga kerja yang bekerja pada tahapan produksi selain pelintingan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi proses penyortiran dan pembersihan, proses perajangan, proses penyemprotan, proses pencampuran, proses pendistribusian ke pengolahan linting, proses penyortiran akhir, dan proses pengemasan. Sedangkan sistem upah borongan diterapkan bagi tenaga kerja yang bertugas pada kegiatan tahapan pelintingan rokok. Upah borongan terhadap tenaga kerja borongan pelinting rokok tersebut bertujuan untuk mengejar target produktivitas. Tenaga kerja borongan tersebut mulai bekerja dari pukul 06.30 – 16.30 WIB dengan waktu istirahat yang diminimalisir atau bisa kondisional. Jam kerja tersebut diterapkan agar PR. Trubus Alami Malang dapat mencapai target produktivitas serta berpengaruh terhadap penghasilan tenaga kerja pelinting tersebut.

Penelitian Ruslan *et al.* (2015) dengan judul “Analisis Penyerapan dan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Usahatani Tembakau Virginia di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah” menyatakan bahwa tingginya angka penyerapan tenaga kerja pada kegiatan usahatani tembakau disebabkan oleh tahapan usahatani tembakau yang banyak dan perlu penanganan intensif. Penyerapan tenaga kerja pada usahatani tembakau tersebut rata-rata sebesar 329,72 HKO per LLG (Luas Lahan Garapan) atau 344,44 HKO per hektar lahan. Pada penelitian tersebut juga diketahui nilai curahan tenaga kerja pada setiap tahapan usahatani tembakau (tabel 2.1). Upah rata-rata yang diterima oleh tenaga kerja pria, perempuan, dan anak-anak juga diketahui pada setiap tahapannya tabel. Upah tertinggi tenaga kerja pria pada tahapan persiapan, pengolahan lahan, dan panen

yaitu sebesar Rp. 50.000 per hari, sedangkan upah tertinggi untuk tenaga kerja perempuan diperoleh pada tahapan panen tembakau yaitu sebesar Rp. 50.000 per hari.

Tabel 2.1 Curahan Tenaga Kerja pada Setiap Tahapan Usahatani Tembakau di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok tahun 2015.

No	Jenis Kegiatan	HKO Per LLG	HKO Per Ha	Persentase
1	Pembibitan	26,1	27,25	7,91
2	Persiapan Lahan	2,25	2,35	0,68
3	Pengolahan Lahan	9,41	9,84	2,85
4	Penanaman	10,2	10,65	3,09
5	Pemeliharaan	45,03	47,04	13,65
6	Panen	46,13	48,2	13,99
7	Pasca Panen	190,6	199,11	57,8
Jumlah		329,72	344,44	100%

Sumber: Ruslan *et al.*, 2015.

Penelitian Sofwan (2016) dengan judul “Analisis Kontribusi Curahan Tenaga Kerja Wanita Tani Pada Usahatani Tembakau Terhadap Pendapatan Keluarga” menyatakan bahwa jumlah curahan tenaga kerja wanita pada kegiatan usahatani tembakau di Desa Mangunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang yaitu sebesar 228,573 HKO. Rata-rata setiap tenaga kerja wanita mencurahkan waktunya untuk bekerja sebesar 9,143 HKO. Penelitian tersebut juga menyatakan curahan tenaga kerja pada setiap tahapan usahatani. Jumlah curahan tenaga kerja wanita pada setiap tahapan usahatani tembakau tersebut yaitu 14,286 HKO pada tahapan penanaman, penyiraman, dan pemupukan, tahapan penyiangan gulma sebesar 42,857 HKO, tahapan pengendalian hama dan penyakit sebesar 14,286 HKO, tahapan pemanenan sebesar 71,429 HKO, serta pada tahap pasca panen penjemuran tembakau yaitu sebesar 71,429 HKO. Sistem upah yang diterapkan adalah sistem harian, dimana tenaga kerja wanita menerima upah sebesar Rp. 15.000,- per hari.

Penelitian Putri *et al.* (2015) dengan judul “Analisis Pendapatan dan Efisiensi Biaya Usahatani Tembakau Maesan 2 di Kabupaten Bondowoso” menyatakan bahwa biaya tenaga kerja berpengaruh terhadap total biaya usahatani tembakau sehingga berdampak pada efisiensi biaya usahatani tembakau Maesan 2

di Kabupaten Bondowoso. Nilai efisiensi biaya diperoleh dari perhitungan *R/C ratio* yaitu sebesar 1,81. Hal tersebut menunjukkan bahwa usahatani tembakau Maesan 2 efisien secara biaya, dimana Rp. 1 biaya usahatani yang dikeluarkan petani tembakau dapat menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 1,81 dan keuntungan sebesar Rp. 0,81. Pada perhitungan tersebut seluruh total biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja diperhitungkan, hal tersebut atas dasar tenaga kerja atau buruh tani memiliki peran penting mengingat setiap tahapan usahatani tembakau memerlukan penanganan dan pengawasan yang intensif. Biaya atau upah tenaga kerja usahatani tembakau Maesan 2 tergolong rendah karena mayoritas tenaga kerja menggunakan tenaga kerja dalam keluarga sehingga hal tersebut berpengaruh pada biaya usahatani yang tidak terlalu tinggi.

Penelitian Munawaroh *et al.* (2017) dengan judul “Analisis Pendapatan dan Strategi Pengembangan Usahatani Tembakau Rajang Samporis” menyatakan bahwa efisiensi biaya usahatani tembakau rajang samporis di Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dapat diketahui melalui analisis *R/C ratio*. Hal tersebut menjelaskan bahwa total biaya usahatani berpengaruh pada efisiensi biaya, yang mana di dalamnya terdapat biaya tenaga kerja. Nilai perhitungan *R/C ratio* diperoleh sebesar 1,61 pada 25 petani, sedangkan nilai *R/C ratio* sebesar 0,76 pada 6 petani tembakau rajang samporis. Nilai *R/C ratio* tersebut menjelaskan bahwa terdapat 25 petani tembakau yang telah menggunakan biaya usahatani secara efisien, akan tetapi masih ada 6 petani yang belum menggunakan biaya usahatani secara efisien atau tidak memperoleh keuntungan. Biaya tenaga kerja berpengaruh terhadap total biaya usahatani tembakau rajang samporis. Pada penelitian tersebut dijelaskan rata-rata total biaya yang dikeluarkan petani sebesar Rp. 5.655.516 per hektar dalam satu musim tanam. Biaya terbesar terdapat pada total biaya variabel sebesar Rp. 4.966.000. Rata-rata biaya tenaga kerja yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 3.933.000, hal tersebut menunjukkan biaya tenaga kerja merupakan biaya yang paling besar dikeluarkan oleh petani dalam kegiatan usahatani tembakau samporis rajangan.

Penelitian Kurniawan (2016) dengan judul “Faktor-faktor Yang Berhubungan dengan Keputusan Petani dan Analisis Pendapatan Usahatani Tembakau *Voor Oogst* Samporis di Kabupaten Jember” menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang diterima petani tembakau dipengaruhi oleh besarnya total biaya yang dikeluarkan pada usahatani tembakau. Biaya terbesar yang dikeluarkan terletak pada biaya tenaga kerja yang meliputi biaya tenaga kerja usahatani, biaya tenaga kerja rajang, dan biaya tenaga kerja penjemuran yang mencapai 70,08% dari keseluruhan total biaya yang dikeluarkan. Kegiatan usahatani tembakau *Voor Oogst* Samporis sudah memberi keuntungan bagi petani. Hal tersebut diketahui atas dasar perhitungan efisiensi biaya melalui analisis *R/C ratio* dengan hasil 1,82. Artinya, kegiatan usahatani tembakau *Voor Oogst* Samporis tersebut efisien secara biaya, dimana Rp. 1,- biaya yang dikeluarkan petani dapat memberi penerimaan sebesar Rp. 1,82 atau keuntungan sebesar Rp. 0,82.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Komoditas Tembakau

Tembakau merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat petani di Indonesia. Tembakau memiliki nilai ekonomis yang tinggi baik di Indonesia maupun pasar internasional. Kegiatan usaha tani komoditas tembakau banyak dilakukan oleh masyarakat petani di Indonesia, meskipun kenyataannya padi tetap menjadi komoditas utama yang diusahakan. Pada kenyataannya, tidak sedikit masyarakat petani di Indonesia yang membudidayakan tembakau karena faktor nilai ekonomis yang tinggi dari hasil produksi tembakau.

Menurut Wibowo *et al.* (2018) komoditas tembakau beserta turunannya memiliki nilai tinggi sehingga apabila dilihat dari aspek ekonomi, maka komoditas tembakau berperan dalam mendorong perekonomian nasional. Peran komoditas tembakau dan turunannya tersebut meliputi sumber devisa negara, sumber penerimaan negara melalui pajak dan cukai produk tembakau, sumber pendapatan bagi petani, serta penyedia lapangan pekerjaan dalam jumlah cukup besar baik dalam kegiatan usahatani maupun kegiatan Industri Hasil Tembakau (IHT). Peran

penting komoditas tembakau tersebut menyebabkan pengelolaan usahatani tembakau yang baik sangat perlu dilakukan sehingga kegiatan usahatani tembakau mampu memproduksi secara optimal.

Menurut Arifien (2013) terdapat delapan jenis tanaman tembakau yang berkembang dan diusahakan pada subsektor perkebunan tembakau di Jawa Timur. Jenis-jenis tembakau tersebut meliputi:

1. Tembakau Virginia

Tembakau Virginia terdiri dari beberapa varietas yang berkembang dan diusahakan di wilayah di Provinsi Jawa Timur. Varietas *Coker 236* di wilayah Kabupaten Jombang, Bojonegoro, dan Lamongan. Varietas *T 45* yang dikembangkan di wilayah Bojonegoro dan Lamongan. Tembakau Virginia varietas *Acor 676* yang dikembangkan di Kabupaten Ponorogo, serta varietas *San 9* yang diusahakan di Kabupaten Blitar. Karakteristik tembakau Virginia secara umum meliputi jumlah daun berkisar antara 20-30 pada satu tanaman, batang tegak, kuat, dan tinggi bisa mencapai 2 meter. Tembakau Virginia digunakan sebagai bahan baku campuran untuk produksi rokok kretek dan rokok putih dan diolah dalam bentuk tembakau *krosok* (Virginia FC) maupun diolah dalam bentuk rajangan.

2. Tembakau Jawa

Tembakau Jawa juga termasuk ke dalam jenis tembakau *Voor Oogst* yang berkembang cukup merata di sebagian wilayah di Jawa Timur. Tembakau Jawa digunakan sebagai bahan campuran rokok kretek dan rokok putih dan sering diolah dalam bentuk tembakau rajangan. Tembakau Jawa terdiri dari banyak varietas yang diusahakan oleh masyarakat petani di Jawa Timur. Varietas tersebut meliputi tembakau Jawa Jinten, Manilo, Petruk, Codong, Sembojo, Gilang, Puwosoto, B3, Andong, Mriwis, Gading Mancung, Kedu Kenongo, Kedu Lulang, Kalituri, Jahe Emprit, Somporis, Semarang Jahe, Janiman, dan Menyono Gading.

3. Tembakau Kasturi

Tembakau Kasturi di Jawa Timur mayoritas diusahakan di wilayah Besuki dan sekitarnya. Tembakau Kasturi diolah menjadi bentuk tembakau *krosok* yang

dikeringkan di bawah sinar matahari. Tembakau kasturi secara umum memiliki ciri khas meliputi ukuran daun tengah yang panjang sekitar 62,7 cm dan daun yang ditinggal hanya sedikit dengan rata-rata 15,28 lembar. Varietas-varietas tembakau Kasturi yang berkembang di wilayah Jawa Timur meliputi Varietas Marakot, Varietas Sompur, Varietas Jepun, Varietas Kasturi Putih, Varietas Mawar, serta Varietas Jepun Mawar.

4. Tembakau Madura

Tembakau Madura secara spesifik wilayah pengembangannya berada di wilayah Pulau Madura. Tembakau Madura merupakan bahan baku utama dalam campuran produksi rokok dan hampir seluruh Industri Hasil Tembakau (IHT) pasti membutuhkan tembakau Madura. Berdasarkan wilayah pengembangannya tembakau Madura dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tembakau gunung dan tegal yang ditanam di wilayah lahan kering dan pegunungan, serta tembakau sawah yang diusahakan di lahan sawah dataran rendah dan dekat pantai. Varietas tembakau Madura terdiri dari varietas Pracak 95, Pracak Kasturi, Jepun Bukabu, Kasturi Kembang, Jepun Kenek, Jepun Cengkren, serta Cengkren.

5. Tembakau Paiton

Tembakau Paiton merupakan jenis tembakau yang berkembang di Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya. Tembakau Paiton diolah dalam bentuk tembakau rajangan. Varietas yang berkembang yaitu varietas Super.

6. Tembakau Lumajang VO

Tembakau Lumajang *Voor Oogst* (VO) diusahakan secara spesifik di Kabupaten Lumajang. Wilayah usahatani tembakau Lumajang VO tersebut berada di Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Tempeh. Hasil olahan tembakau Lumajang VO dalam bentuk krosok dan hampir seluruhnya diekspor ke negara Belanda. Tembakau Lumajang VO memiliki keunikan meskipun termasuk ke dalam tembakau *Voor Oogst* tetapi proses tanam hingga panen dilakukan pada musim hujan. Ciri khas dari tembakau Lumajang VO yaitu banyak bercak semacam penyakit *sercospora*. Varietas tembakau Lumajang VO yang berkembang yaitu varietas Janiman dan varietas Menyono Gading.

7. Tembakau *White Burley*

Tembakau *White Burley* digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan rokok putih. Hasil produksi usaha tani tembakau *White Burley* di Provinsi Jawa Timur digunakan untuk memenuhi pabrik rokok putih yang berada di Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut menyebabkan rata-rata pengusaha tembakau *White Burley* melakukan kemitraan penuh. Variteas tembakau *White Burley* yaitu variteas F1 yang diusahakan di Malang dan varietas TN 90 yang dikembangkan di Lumajang.

8. Tembakau Besuki NO

Tembakau Besuki *Na-Oogst I* (Besuki NO) berkembang sejak tahun 1850-an di wilayah Kabupaten Jember. Komoditas tembakau Besuki NO merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan salah satu sumber pendapatan utama bagi petani dan pengusaha tembakau. Pola tanam tembakau Besuki *Na-Oogst* yaitu penanaman pada akhir musim penghujan dan panen dilakukan pada awal musim kemarau. Hasil produksi tembakau Besuki NO digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan cerutu. Varietas yang berkembang yaitu varietas H382.

2.2.2 Usahatani Tembakau

Menurut Santoso (2013), menjelaskan bahwa tembakau di Indonesia merupakan salah satu tanaman atau komoditas komersial yang bisa disebut juga sebagai tanaman industri. Tembakau merupakan komoditas memiliki daya saing dan bernilai ekonomi tinggi. Hasil produksi usahatani tembakau akan diolah oleh Industri Hasil Tembakau (IHT) untuk dijadikan produk rokok atau cerutu, yang mana produk tersebut tingkat permintaannya cukup tinggi baik dari pasar lokal maupun internasional. Hal tersebut menyebabkan proses pada setiap tahapan-tahapan usahatani tembakau perlu diusahakan dengan baik agar usahatani tembakau dapat berproduksi secara optimal dan memberi keuntungan tinggi bagi pelaku bisnis khususnya petani.

Menurut Budiman (2013), tahapan-tahapan dalam usahatani tembakau meliputi :

1. Pembibitan

Tahapan pembibitan diawali dengan kegiatan persiapan terlebih dahulu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan pembibitan meliputi pembuatan media pembibitan bisa *polybag* maupun dengan membuat bedengan di lahan dan penyeleksian benih tembakau. Pengolahan tanah bedengan dilakukan 30-35 hari sebelum penaburan benih tembakau. Kegiatan selanjutnya adalah pemupukan awal pada bedengan dengan dosis pupuk yaitu 35 gram ZA, 100 gram SP-36, dan 20 gram ZK per meter persegi bedengan atau dapat juga 0,1-1 kilogram pupuk NPK per meter persegi lahan bedengan. Proses selanjutnya yaitu benih disebar, kemudian ditutup oleh sekam padi sampai rata. Kegiatan selanjutnya setelah penaburan benih tembakau adalah pemeliharaan hingga bibit tumbuh dan siap untuk ditanam. Kegiatan pemeliharaan pada pembibitan meliputi pemasangan *cover* plastik di atas lahan pembibitan untuk melindungi bibit. Pemeliharaan bibit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida, menyiram air, dan proses buka/tutup *cover*. Bibit siap tanam saat ukuran tinggi bibit kurang lebih 15 – 18 cm.

2. Persiapan Media Tanam

Tahapan persiapan media tanam ini merupakan kegiatan untuk mengolah tanah atau lahan budidaya tembakau. Kegiatan pada tahapan persiapan media tanam meliputi kegiatan pembersihan lahan atau jerami sisa budidaya komoditas sebelumnya, pembuatan got atau saluran pembuangan air di area sekitar lahan, pembajakan dan pencangkulan lahan, dan pembuatan guludan. Pengolahan lahan tanam bertujuan untuk memberi kondisi yang menguntungkan bagi sistem pertumbuhan akar tanaman tembakau. Kegiatan pengolahan tanah sebaiknya dilakukan 70 hari sebelum musim tanam dengan melakukan pembersihan lahan, 55 hari sebelum tanam dilakukan pembajakan, dan 15 hari sebelum tanam dilakukan pembajakan siap tanam.

3. Proses Penanaman

Proses penanaman diawali dengan proses pembuatan lubang tanam yang disesuaikan dengan jenis tembakau yang akan ditanam. Tahap penanaman tembakau jenis *Voor Oogst* ditanam pada periode Maret – Juni dan tembakau *Na-Oogst* dilakukan pada periode bulan Agustus – September. Waktu tanam sebaiknya dilakukan pada sore hari sekitar pukul 14.00 – 17.00 untuk menghindari layunya bibit ketika terkena sinar matahari. Kegiatan penyulaman tanaman dapat dilakukan 3 hari sampai 10 hari setelah masa tanam tembakau.

4. Pemeliharaan

Tahapan pemeliharaan tanaman tembakau meliputi pengairan, penyulaman, penyiangan, pemupukan, pemangkasan, serta pengendalian hama dan penyakit. Pengairan pada tembakau *Voor Oogst* dilakukan pada skala sekitar 100 mm perbulan, sedangkan untuk tembakau *Na-Oogst* membutuhkan air sekitar 90 mm per bulan. Penyulaman dilakukan 3 – 7 hari setelah tembakau ditanam. Penyiangan dilakukan setiap 3 minggu sekali untuk mengontrol tumbuhnya tanaman pesaing. Pemupukan dilakukan untuk mengontrol nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Pemupukan dilakukan sebaiknya sehari sebelum benih ditanam di media semai, 5 hari sebelum tanam bibit, dan pemupukan rutin dalam rangka menjaga nutrisi tanaman tembakau sesuai dosis. Pemangkasan dilakukan dengan 2 macam cara yaitu pangkas pucuk (*topping*) dan pemangkasan tunas samping atau *wiwil* (*suckering*). Pengendalian hama dan penyakit tanaman juga harus diusahakan secara rutin dan harus sesuai dosis agar tidak merusak kualitas tanaman tembakau.

5. Panen

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kegiatan panen yaitu tingkat kematangan daun, keseragaman daun dalam proses penanaman, dan penanganan daun hasil panen. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk mendapatkan daun tembakau dengan kualitas yang optimal. Kegiatan panen tanaman tembakau dilakukan secara bertahap sehingga dalam tahapan panen tembakau bisa dilakukan hingga kisaran maksimal 9 kali panen tergantung kondisi dan jenis tembakau. Kriteria tembakau siap panen setelah

tanaman berumur 90-100 hari, 60 – 70% dari populasi telah membentuk kuncup bunga, warna daun hijau seperti bunga kenanga, sudut daun melebar atau merunduknya daun sehingga mudah dipetik, dan tanaman dalam kondisi segar. Terdapat jenis daun panen yang dipetik meliputi 2 lembar daun tanah (DT), 6 lembar daun koseran pertama (DKP), 10 lembar daun koseran atas (DKA), 4 lembar daun madya pertama (DMP), 6 lembar daun madya tengah (DMT), dan 4 lembar daun madya atas (DMA). Pemetikan secara bertahap dilakukan dengan memetik 1-3 helai daun dengan selang waktu 2-6 hari.

6. Pasca Panen

Pasca panen merupakan tahapan penanganan daun tembakau yang telah dipanen agar kualitas hasil panen tembakau tetap terjaga dan usahatani tembakau mampu memperoleh nilai tambah. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan pasca panen meliputi pengumpulan panen daun tembakau, angkut daun tembakau basah, dan penyortiran daun tembakau basah. Kegiatan selanjutnya merupakan kegiatan untuk mengolah daun tembakau yang telah dipanen, terdapat dua jenis pengolahan daun tembakau yaitu tembakau rajangan dan tembakau krosok. Pada jenis pengolahan tembakau rajangan kegiatan yang dilakukan yaitu proses rajang tembakau menjadi bentuk tembakau rajangan, kemudian tembakau rajangan disusun di atas bilah bambu atau *eler* dan dijemur hingga tembakau kering. Sedangkan pada tembakau krosok kegiatan atau penanganan yang dilakukan yaitu daun tembakau disusun pada satu tangkai bambu diisi 3-4 helai daun tembakau atau proses *sujen*, selanjutnya daun tembakau dikeringkan/dijemur. Kegiatan selanjutnya pada tahapan pasca panen yaitu proses sortasi daun tembakau kering (tembakau krosok), pengemasan tembakau, serta proses pengangkutan tembakau ke gudang.

Tembakau yang telah memasuki tahap penanganan pasca panen, kemudian diolah menjadi bentuk tembakau *krosok* dan tembakau rajangan sebelum tembakau didistribusikan ke Industri Hasil Tembakau (IHT). Tembakau *krosok* atau tembakau lembaran kering merupakan jenis hasil olahan tembakau berbentuk daun utuh yang

telah dikeringkan. Tembakau rajangan merupakan jenis hasil olahan tembakau yang berbentuk rajangan atau irisan tipis yang hanya dikenal di Indonesia saja. Proses perajangan tembakau dilakukan dengan merajang tembakau yang belum pada kondisi kering coklat. Sebelum melakukan perajangan, tembakau disortir untuk memilah daun berdasarkan tingkat kematangan daun. Tembakau yang sudah dalam bentuk rajangan kemudian disusun di atas alas anyaman bambu yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari langsung selama 2-3 hari.

2.2.3 Teori Tenaga Kerja dan Curahan Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa definisi ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Definisi dari tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat luas. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan definisi dari pekerja atau disebut buruh serta pemberi kerja. Pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk uang maupun imbalan dalam bentuk lain, sedangkan pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan memberi imbalan berupa upah atau dalam bentuk lainnya.

Kegiatan usahatani dalam kegiatannya memerlukan tenaga kerja untuk mengoptimalkan setiap tahapan usahatani sehingga mampu menghasilkan secara optimal. Tenaga kerja merupakan salah satu untuk penentu bagi keberlangsungan usahatani karena dapat berpengaruh pada kualitas tanaman dan hasil produksi (Suratiyah, 2015). Tenaga kerja pada kegiatan usahatani memiliki peran yang penting dalam membantu keberhasilan serta keberlanjutan usahatani usahatani. Kelangkaan tenaga kerja dapat memiliki resiko mundurnya waktu atau *time schedule* usahatani, penanganan kurang optimal, serta menurunnya kualitas hasil usahatani. Karakteristik tenaga kerja pada sektor pertanian khususnya pada kegiatan usahatani memiliki perbedaan dengan bidang atau sektor usaha lainnya.

Perbedaan karakteristik tersebut meliputi keperluan atau kebutuhan tenaga kerja dalam usahatani tidak kontinyu dan tidak meraka pada setiap tahapan/kegiatannya, penyerapan terbatas, tidak mudah distandarkan, dirasionalkan, dan dispesialisasikan, serta beraneka ragam coraknya dan kadang kala tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya (Tohir 1983 dalam Suratiyah, 2015).

Menurut Sirait (2006) tenaga kerja dapat dibedakan berdasarkan sumbernya. Sumber tenaga kerja tersebut merupakan tempat asal atau darimana tenaga kerja tersebut didapatkan. Sumber tenaga kerja dapat diperoleh dari dalam organisasi (*internal sources*) maupun dari luar organisasi (*external sources*). Menurut Suratiyah (2015), menjelaskan bahwa terdapat dua macam tenaga kerja yang digunakan dalam proses usahatani yaitu tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Tenaga kerja keluarga merupakan tenaga kerja yang didapatkan dari dalam keluarga sendiri dan memiliki peran yang lebih sedikit atau hanya membantu tenaga kerja luar keluarga. Tenaga kerja luar keluarga adalah tenaga kerja yang didapatkan dari luar keluarga atau bisa disebut sebagai buruh tani. Tenaga kerja dari luar keluarga berhak menerima upah sebagai imbalan atas pekerjaan atau hasil yang telah dikerjakan.

Menurut Hernanto (1995), tenaga kerja pada kegiatan usahatani diperoleh dari dalam keluarga dan luar keluarga. Tenaga kerja dari dalam keluarga terdiri dari anggota keluarga petani, sedangkan tenaga kerja dari luar keluarga didapatkan dari pihak luar anggota keluarga. Tenaga kerja luar keluarga dapat diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Upahan

Tenaga kerja upahan merupakan tenaga kerja yang didapatkan dengan sistem upah yang diberikan sebagai imbalan atau balas jasa atas hasil fisik atau jasa yang diberikan oleh pemilik atau pihak pemberi kerja kepada tenaga kerja. Upah yang diberikan untuk tenaga kerja pria dan wanita nominalnya pada umumnya tidak sama. Upah tenaga kerja ini juga tidak sama antar pekerjaan satu dengan lainnya tergantung dengan kebijakan atau kesepakatan antara pihak pemberi kerja dengan tenaga kerja.

2. *Sambatan*

Sistem *sambatan* ini merupakan cara perolehan tenaga kerja luar keluarga dengan gotong-royong atau tolong-menolong antar petani. Sistem ini umumnya tidak berdasarkan pertimbangan ekonomi dan lebih terikat pada adat-istiadat atau konstruksi sosial yang berlaku di wilayah tersebut.

3. Arisan Tenaga Kerja

Sistem arisan tenaga kerja ini dilakukan dengan cara antar petani mengembalikan tenaga kerja yang telah bekerja pada lahan usahatannya atau secara bergiliran sesuai dengan kesepakatan peserta arisan.

Menurut Zaini *et al.* (2019) dalam menganalisis penggunaan tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan usahatani dinyatakan dalam besarnya curahan tenaga kerja. Curahan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja efektif yang dipakai atau dipekerjakan dalam kegiatan usahatani mulai dari tahap awal persiapan tanam hingga panen. Jumlah curahan tenaga kerja dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan atau tahapan usahatani yang dilakukan. Setiap tahapan kegiatan usahatani tidak lepas dari penggunaan tenaga kerja. Perhitungan curahan tenaga kerja pada setiap tahapan usahatani dilakukan untuk mengetahui jumlah alokasi waktu atau curahan tenaga kerja yang digunakan pada setiap tahapan usahatani.

Menurut Azizah *et al.* (2019) curahan tenaga kerja usahatani merupakan jumlah jam kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja pada kegiatan usahatani. Curahan tenaga kerja dalam keluarga merupakan jumlah waktu yang dicurahkan oleh tenaga kerja dalam keluarga, termasuk suami, istri, dan anak. Sedangkan untuk curahan tenaga kerja luar keluarga adalah jumlah waktu yang dicurahkan oleh tenaga kerja luar keluarga atau buruh tani. Curahan tenaga kerja yang digunakan petani dipengaruhi oleh pendapatan usahatani, curahan kerja tenaga luar keluarga atau buruh tani, serta jumlah anggota keluarga. Curahan tenaga kerja luar keluarga dipengaruhi oleh upah yang diberikan kepada tenaga kerja.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat pasal yang menjelaskan mengenai waktu kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja. Pasal tersebut menjelaskan terdapat dua waktu

kerja yaitu 7 jam dan 8 jam untuk satu hari kerja. Satu hari kerja dihitung selama 7 jam dengan ketentuan yaitu 40 jam dalam satu minggu dan satu minggu tersebut terdiri dari 6 hari kerja. Satu hari kerja dihitung selama 8 jam berlaku dengan ketentuan yaitu dalam satu minggu terdiri dari 5 hari kerja dan dalam satu minggu kerja terdiri dari 40 jam dalam satu minggu. Satuan hari tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya dapat disebut Hari Orang Kerja (HOK). Ukuran tersebut digunakan untuk menghitung pencurahan waktu kerja oleh tenaga kerja atau buruh tani dalam melakukan pekerjaan setiap harinya (Hernanto, 1995).

Menurut Madina (2015), rumus perhitungan hari orang kerja adalah sebagai berikut :

$$HOK = \frac{JO \times JK \times HK}{JKS}$$

Keterangan:

HOK = Hari Orang Kerja (HOK)

JO = Jumlah orang/tenaga kerja (orang)

JK = Jumlah jam kerja (jam)

HK = Jumlah hari kerja (hari)

JKS = Jumlah waktu kerja standar (jam)

2.2.4 Teori Upah

Menurut Sukirno (2011), pembayaran yang diberikan pihak pemberi kerja kepada tenaga kerja atau buruh sebagai imbalan atau balas jasa dapat dibedakan menjadi dua macam pengertian yaitu gaji dan upah. Sistem gaji merupakan sistem pembayaran yang dilakukan kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer, akuntan, serta pegawai tetap suatu perusahaan. Sedangkan sistem upah adalah sistem pembayaran kepada tenaga kerja atau buruh yang pekerjaannya tidak menetap, berpindah-pindah seperti contohnya yaitu tukang kayu, tukang batu, kuli bangunan, dan buruh tani.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 menyatakan definisi upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan-peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pemberian upah tersebut sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikan atau akan dikerjakan oleh tenaga kerja. Nominal dari upah yang diberikan juga berbeda antar masing-masing tenaga kerja. Nominal upah yang berbeda tersebut dapat dikarenakan jenis pekerjaan, waktu pekerjaan, serta sistem atau cara pengupahan yang diterapkan.

Menurut Sukirno (2011), dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan atau dikerjakan oleh tenaga kerja. Hal tersebut membuat tidak ada perbedaan pemberian upah kepada pegawai tetap maupun tenaga kerja kasar atau buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Kecenderungan jangka panjang yang berlaku adalah dimana harga-harga barang maupun upah terus menerus mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut tidak dapat menimbulkan kesulitan untuk mengetahui sampai mana kenaikan pendapatan merupakan suatu gambaran dari kenaikan kesejahteraan yang dinikmati oleh tenaga kerja sehingga kenaikan tersebut dapat dikatakan tidak serentak dan tingkat kenaikannya berbeda untuk setiap tenaga kerja. Hal tersebut menyebabkan para ahli ekonomi menggolongkan upah ke dalam dua golongan yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang merupakan jumlah uang yang diterima para pekerja dari pihak pemberi kerja sebagai pembayaran atas jasa fisik atau mental yang diberikan tenaga kerja dalam proses produksi. Upah uang merupakan jenis upah yang umumnya digunakan oleh masyarakat dalam mendapatkan tenaga kerja. Upah riil adalah tingkat upah tenaga kerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut mampu untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Adisu (2008), sistem pemberian upah dari pihak pemberi kerja kepada buruh atau tenaga kerja dapat digolongkan menjadi 4 macam. Macam-macam sistem pengupahan tersebut meliputi:

1. Upah Harian

Upah harian merupakan sistem pengupahan yang diberikan kepada tenaga kerja/buruh secara harian. Besaran upah pada sistem upah harian ini dihitung berdasarkan tingkat kehadiran per hari kerja. Dengan kata lain upah yang diberikan dihitung per satu hari kerja, tidak berdasarkan hasil pekerjaan maupun faktor lainnya. Tolak ukur dari perhitungan upah harian ini adalah waktu kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja.

2. Upah Borongan

Upah borongan merupakan sistem pengupahan yang diberikan kepada buruh atau tenaga kerja berdasarkan volume atau jumlah yang telah dikerjakan oleh tenaga kerja. Tolak ukur upah borongan adalah kuantitas hasil pekerjaan, tidak menghitung kehadiran per hari kerja. Upah borongan diberikan dengan tujuan untuk mempercepat pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja.

3. Upah Tetap

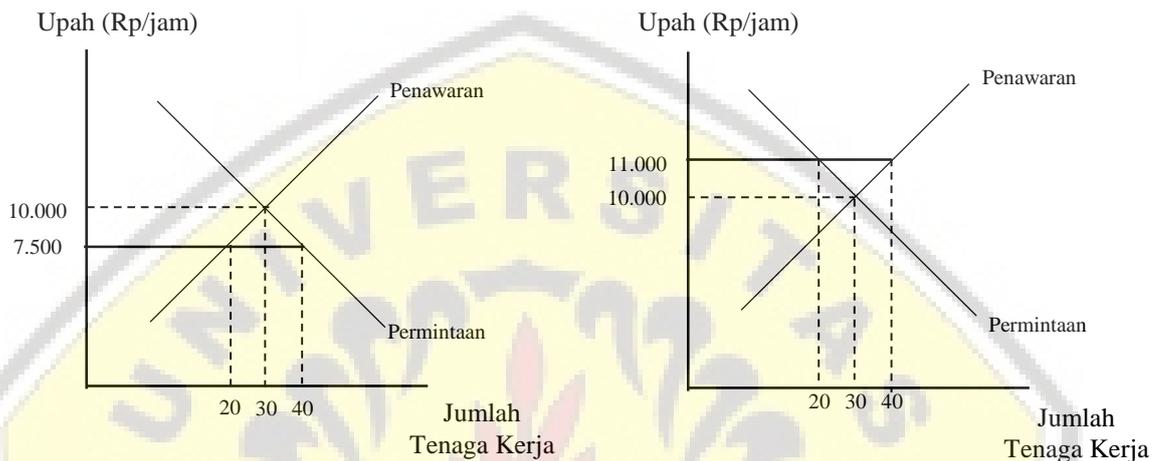
Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur dan lainnya. Artinya, upah yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut merupakan upah bersih yang diterima oleh tenaga kerja tidak termasuk tunjangan lainnya.

4. Upah Tidak Tetap

Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja/buruh secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Hal tersebut diakibatkan volume pekerjaan yang diterima tidak stabil. Apabila pekerjaan yang diterima besar maka jumlah upah yang diterima juga besar, tetapi jika volume pekerjaan sedikit maka upah yang diterima juga sedikit.

Menurut Rondhi dan Aji (2015) kebijakan upah minimum merupakan sebuah ilustrasi dari kebijakan pemerintah atau pihak yang terkait mengenai penetapan upah minimum pada suatu wilayah. Upah tersebut dapat diukur dengan

satuan setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, maupun setiap jam. Ilustrasi penentuan kebijakan upah minimum ini sangat berkaitan dengan jumlah permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja. Ilustrasi mengenai kebijakan upah minimum dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1 Keseimbangan Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Berdasarkan gambar 2.1 kurva keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di atas dapat diketahui bahwa semakin tinggi upah yang ditetapkan akan menyebabkan penurunan penawaran tenaga kerja. Pada gambar ilustrasi tersebut diketahui bahwa upah keseimbangan sebesar Rp. 10.000 per jam dan pada kondisi upah tersebut jumlah tenaga kerja di pasar tenaga kerja adalah sebesar 30 orang. Jika suatu kebijakan menetapkan bahwa upah minimum yang berlaku sebesar Rp. 7.500 per jam (di bawah upah keseimbangan), maka penetapan tersebut cenderung tidak merubah pasar tenaga kerja karena upah keseimbangan lebih dari ketentuan tersebut. Sebaliknya, apabila upah yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 11.000 per jam (di atas upah keseimbangan). Kondisi tersebut akan menimbulkan peningkatan tenaga kerja menjadi 40 orang atau dengan kata lain penawaran tenaga kerja akan bertambah, akan tetapi permintaan tenaga kerja cenderung turun menjadi 20 orang.

2.2.5 Konsep Kelembagaan

Menurut North (1990), kelembagaan adalah aturan main (*rules of the game*) dalam suatu masyarakat dan dirancang secara manusiawi yang membentuk interaksi antar masyarakat. Interaksi antar masyarakat tersebut disusun sedemikian rupa agar pihak-pihak yang berperan dalam interaksi tersebut dapat memperoleh insentif baik aspek politik, sosial, maupun aspek ekonomi. Hal tersebut memiliki implikasi bahwa kelembagaan merupakan suatu pola hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk satu tujuan tertentu, yang mana terdapat bentuk-bentuk insentif yang diperoleh dengan adanya hubungan tersebut.

Menurut Rondhi (2019), kelembagaan sejauh ini masih dipahami dalam bentuk organisasi. Pada kenyataannya istilah kelembagaan dan organisasi sering mengalami tumpang tindih. Kelembagaan merupakan perilaku dan norma kompleks dengan tujuan nilai kolektif yang di dalamnya terdapat insentif yang mampu direspon oleh pihak terkait, sedangkan organisasi merupakan struktur atau badan dari peran-peran tersebut. Kelembagaan dapat dibedakan menjadi dua batasan yaitu kelembagaan formal dan kelembagaan informal. Kelembagaan formal dapat berupa seperangkat aturan-aturan (memiliki legalitas atau berbadan hukum) yang dibuat oleh manusia, sedangkan kelembagaan informal dapat berupa norma sosial yang berlaku pada kehidupan sosial seperti percakapan dan kode perilaku antar masyarakat.

Kelembagaan memiliki peran penting dalam pengambilan bentuk keputusan untuk tujuan pembangunan. Menurut Uphoff (1986) dalam Rondhi (2019), terdapat tingkatan atau level lembaga beroperasi yang dapat mempengaruhi suatu lembaga dalam mengambil suatu keputusan. Hierarki kelembagaan untuk pengambilan keputusan tersebut dimulai pada tingkat atau level internasional yaitu tingkatan paling atas, dan tingkat individu yang merupakan tingkat paling bawah pada hierarki kelembagaan. Setiap tingkatan dalam hierarki tersebut memiliki peran, aturan main (*rules of the game*) masing-masing. Tingkatan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dapat digambarkan pada gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2 Tingkatan Kelembagaan dalam Pengambilan Keputusan

Level nasional pada tingkatan pengambilan keputusan suatu lembaga memiliki sifat *top-down*, artinya level nasional bersifat instruktif untuk memberi instruksi kepada tingkatan dibawahnya. Level lokal, level komunitas, dan level grup merupakan tingkatan atau level yang tidak ditentukan oleh tingkat nasional, namun keputusan yang ada pada level nasional dapat berpengaruh pada tiga level tersebut. Begitu juga pada level individu, tidak ditentukan oleh level nasional atau secara mandiri dalam mengambil keputusan (ditentukan oleh individu sendiri) baik dengan adanya interaksi dengan individu maupun tanpa adanya interaksi dengan individu lain, melainkan keputusan tersebut ditentukan oleh kelompok atau *grup*. Tindakan tersebut yang disebut sebagai *collective action*, sehingga dalam kelompok ini interaksi antara pihak atau pelaku sangat menentukan pengambilan keputusan dalam pengembangan masyarakat (Rondhi, 2019).

Kelembagaan pada sektor pertanian merupakan suatu lembaga pada tingkat petani dan pihak terkait (kelompok buruh tani) yang berada pada kawasan lokalitas (*local institution*), yang berupa organisasi dengan keanggotaan (*membership organization*) atau kerjasama antara petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama (Uphoff 1986 dalam Anantanyu, 2011). Kelembagaan memiliki arti yang luas, selain mencakup mengenai organisasi petani dan strukturnya. Kelembagaan di sini juga mencakup aturan perilaku atau aturan main (*role of the game*) yang menentukan pola tindakan dan hubungan sosial yang berlaku pada lingkup suatu kelompok atau kesatuan sosial yang memiliki tujuan tertentu. Pembentukan kelembagaan pada sektor pertanian pada dasarnya memiliki peran sebagaimana wujud kongkrit dari lembaga tersebut dibentuk. Peran kelembagaan tersebut meliputi melakukan mediasi kepada masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat lokal, dan mengelola sumberdaya lokal yang ada (tenaga kerja, modal, informasi) untuk pencapaian tujuan dari kelembagaan tersebut.

2.2.6 Konsep Kebudayaan dan Kearifan Lokal

Menurut Koentjaraningrat (2004), menjelaskan bahwa kebudayaan adalah seluruh perilaku dan hasil perilaku manusia berdasarkan tata aturan yang harus diperoleh dengan belajar untuk diterapkan dalam bermasyarakat. Konsep kebudayaan dalam arti sempit merupakan suatu karya, pikiran, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya untuk kebutuhan hidup. Dalam konsep yang luas kebudayaan meliputi hampir seluruh perilaku dan hasil perilaku manusia berdasarkan tata aturan yang disepakati untuk diterapkan dalam kehidupannya baik dalam kehidupannya secara individu atau dalam kelompok lingkungan bermasyarakat, sehingga dapat dipecah menjadi beberapa unsur. Unsur-unsur universal yang menjadi isi dari kebudayaan meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, serta sistem teknologi dan peralatan. Unsur-unsur tersebut menunjukkan urutan sehingga semakin atas tingkatannya dapat dikatakan kebudayaan tersebut sulit untuk berubah.

Menurut Siombo (2019), menjelaskan bahwa terdapat 4 wujud dari kebudayaan. Wujud dari kebudayaan tersebut meliputi kebudayaan berwujud benda atau fisik, kebudayaan sebagai sistem tingkah laku dan tindakan yang berulang, kebudayaan sebagai sistem gagasan dari pikiran individu bersangkutan, dan kebudayaan berupa sistem nilai budaya. Kebudayaan berwujud benda-benda atau fisik yang bisa dilihat seperti produk-produk karya seni lukisan, kerajinan, dan lain-lain. Kebudayaan berwujud sebagai sistem tingkah laku dapat dilihat dari perilaku manusia sehari-hari yang bersifat konkret, misalnya berbicara dan juga dapat dilihat dari bagaimana manusia berperilaku terhadap alam sekitarnya seperti perilaku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kebudayaan berupa sistem nilai budaya yang terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang bernilai dan penting sehingga berfungsi sebagai pedoman orientasi bagi kehidupan warga dalam bermasyarakat.

Menurut Setiadi (2006), kebudayaan dapat tercipta dari hasil interaksi antara manusia dengan segala isi alam untuk membantu kehidupannya. Kebudayaan adalah produk dari hasil ciptaan manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk dari kebudayaan tersebut. Dengan kata lain, kebudayaan diciptakan karena adanya manusia sebagai penciptanya dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang diciptakannya sehingga kebudayaan dapat terus hidup apabila ada manusia sebagai pendukung budaya tersebut. Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat selalu memiliki perbedaan, akan tetapi kebudayaan mempunyai sifat yang sama yang dijelaskan secara umum. Sifat hakiki yang berlaku umum dari kebudayaan adalah meliputi :

1. Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia
2. Budaya telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
3. Budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya
4. Budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang, dan tindakan yang diizinkan.

Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri atas pikiran-pikiran, gagasan, konsep serta keyakinan. Dengan demikian, sistem kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia lebih lazim disebut sebagai adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat juga sistem norma dan dari situlah salah satu fungsi sistem budaya adalah menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia. Kebudayaan dapat dilihat dari dimensi wujudnya sebagai berikut :

1. Sistem budaya merupakan suatu bentuk kompleks dari gagasan-gagasan, ide, nilai-nilai, peraturan, dan sebagainya.
2. Sistem sosial merupakan bentuk kompleks dari aktivitas manusia dalam organisasi atau hidup dalam lingkungan bermasyarakat
3. Sistem kebendaan yang merupakan wujud fisik atau alat yang diciptakan manusia untuk kebutuhan dalam melangsungkan hidupnya.

Kearifan lokal terdiri dari dua kata jika ditinjau secara etimologis, yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*) sehingga dapat disebut *local wisdom*. Kearifan merupakan kemampuan yang dimiliki manusia dalam menghadapi suatu situasi dengan memanfaatkan akal pikirannya atau daya nalar, sedangkan lokal sendiri adalah ruang yang menjadi lokasi atau lingkungan tempat kejadian tersebut. Kearifan lokal dikatakan memiliki sifat empiris karena hal tersebut berawal dari fakta-fakta yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat tertentu, sedangkan sifat pragmatis menunjukkan bahwa kearifan lokal merupakan suatu konsep yang dihasilkan dari olah pikir manusia/masyarakat dengan tujuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari baik masalah individu maupun kelompok. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai gagasan, nilai-nilai dan pandangan sekelompok masyarakat lokal yang bersifat bijaksana, bernilai baik, dan dilaksanakan oleh anggota masyarakatnya (Sahban, 2018).

Menurut Siombo (2019), kearifan lokal adalah bagian dari suatu budaya di lingkungan masyarakat yang memiliki nilai-nilai baik dan dipatuhi oleh masyarakat di kalangan tersebut. Sistem nilai budaya terdiri atas konsep mengenai hal-hal penting tentang orientasi hidup yang menjadi pedoman dalam berperilaku bagi individu dalam bermasyarakat, yang memiliki kaitan dengan lingkungan, dan

sudah hidup sejak lama dalam lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah masyarakat agraris. Indonesia sebagai negara agraris, dimana tanah dan tumbuhan yang berada di atasnya merupakan bagian dari kehidupan, dan sebagai sumber hidup masyarakat. Ikatan terhadap lingkungan alam dan sekitarnya menjadi bagian dalam sistem nilai yang secara khusus dalam membentuk norma atau aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat maka hal tersebut yang disebut sebagai kearifan lokal.

Menurut Sahban (2018), menjelaskan bahwa bentuk kearifan lokal dapat dikategorikan dalam dua aspek yaitu kearifan lokal yang berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*). Kearifan lokal yang berwujud (*tangible*) merupakan kearifan lokal yang dapat dilihat secara nyata memiliki bentuk fisik seperti tekstual, bangunan atau arsitektual, dan karya seni lainnya. Kearifan lokal tidak berwujud (*intangible*) artinya kearifan lokal tidak dapat dilihat atau tidak berbentuk fisik yang dapat dilihat oleh mata manusia seperti nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

2.2.7 Teori Biaya

Biaya dalam kegiatan usahatani merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan guna menunjang keberhasilan kegiatan usahatani. Petani sebagai pelaksana kegiatan usahatani pasti menggunakan faktor-faktor produksi seperti pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta tenaga kerja. Petani tentunya memerlukan biaya untuk mendapatkan faktor-faktor produksi tersebut. Perhitungan biaya dalam memperoleh faktor-faktor produksi secara tidak sadar pasti dilakukan oleh petani dalam mempersiapkan kegiatan usahatani. Dalam ilmu ekonomi, secara tidak langsung petani memperhitungkan antara hasil yang diharapkan atau akan diterima (penerimaan atau *revenue*) dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan petani (pengorbanan atau *costs*) sehingga implikasi keuntungan yang akan diterima dapat diprediksi (Hanafie, 2010).

Menurut Sugiarto *et al.* (2007), biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi. Biaya tersebut dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku baik yang sudah terjadi maupun yang akan

terjadi. Biaya dapat juga didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa guna menjalankan kegiatan produksi. Informasi mengenai pengelolaan biaya penting untuk dilakukan suatu perusahaan atau produsen. Tujuan memperoleh informasi biaya digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan.

Menurut Sukirno (2011), mendefinisikan biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang didapatkan tersebut akan digunakan perusahaan untuk menciptakan suatu barang atau jasa dan pada umumnya dengan tujuan komersial. Biaya produksi dapat digolongkan menjadi 2 dalam menganalisisnya berdasarkan jangka waktu yaitu biaya produksi dalam jangka pendek dan biaya produksi dalam jangka panjang. Biaya jangka pendek merupakan jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya atau diubah kuantitasnya, sedangkan untuk jangka panjang jangka waktu di mana semua faktor-faktor produksi dapat mengalami perubahan.

Biaya produksi dalam jangka pendek merupakan biaya keseluruhan dalam jangka waktu pendek atau waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya atau diubah kuantitasnya. Biaya yang dikeluarkan pada kegiatan usahatani dapat digolongkan ke dalam biaya jangka pendek, khususnya usahatani tanaman semusim. Total biaya yang dikeluarkan dalam pembiayaan produksi jangka pendek dikenal dalam istilah total biaya atau *total cost*. Total biaya produksi yang dikeluarkan dalam biaya produksi jangka pendek dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu total biaya tetap atau *total fixed costs* (TFC) dan total biaya variabel atau *total variable costs* (TVC). Biaya tetap merupakan jenis biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi dengan kuantitas output yang diproduksi, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya dapat diberubah disesuaikan dengan kuantitas output produksi (Rondhi dan Aji, 2015). Total biaya produksi atau *total costs* dapat diketahui dengan menjumlahkan total biaya tetap dan total biaya variabel. Rumus perhitungan total biaya adalah sebagai berikut:

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan :

TC = *Total Costs*

TFC = *Total Fixed Costs*

TVC = *Total Variable Costs*

Menurut Rondhi dan Aji (2015), untuk menentukan jumlah *output* optimal yang diproduksi tiap satuan produksi memerlukan perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi per unit produk barang/jasa. Perhitungan biaya rata-rata digunakan untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk per unit barang yang diproduksi. Biaya rata-rata tersebut meliputi total biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, serta biaya variabel rata-rata.

1. Biaya Variabel Rata-Rata

Biaya variabel rata-rata atau *Average Variable Costs* (AVC) merupakan biaya variabel yang dikeluarkan untuk per unit barang yang dihasilkan. Perhitungan biaya variabel rata-rata dapat diketahui dengan membagi total biaya variabel dengan kuantitas barang atau *output* produksi.

$$AVC = \frac{TVC}{Q}$$

Keterangan :

AVC = *Average Variable Costs*

TVC = *Total Variable Costs*

Q = *Quantity Ouput*

2. Biaya Tetap Rata-Rata

Biaya tetap rata-rata atau *Average Fixed Costs* (AFC) merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk per unit barang/jasa yang dihasilkan. Perhitungan biaya tetap rata-rata dapat diperoleh dengan membagi total biaya tetap yang digunakan dalam proses produksi dengan total *output* produksi.

$$AFC = \frac{TFC}{Q}$$

Keterangan :

AFC = *Average Fixed Costs*

TFC = *Total Fixed Costs*

Q = *Quantity Ouput*

3. Total Biaya Rata-Rata

Total biaya rata-rata atau *Average Total Costs* (ATC) adalah jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi per unit barang/jasa. Perhitungan total biaya rata-rata diperoleh dengan membagi total biaya yang dikeluarkan tersebut dengan total *output* produksi.

$$ATC = \frac{TC}{Q}$$

Keterangan :

ATC = *Average Total Costs*

TC = *Total Costs*

Q = *Quantity Ouput*

2.2.8 Konsep Penerimaan

Menurut Case dan Fair (2007), penerimaan atau *revenue* merupakan hasil atau imbalan yang diterima atas *output* yang dihasilkan pada proses produksi. Total penerimaan atau *total revenue* adalah jumlah total yang didapatkan perusahaan dari penjualan *output* produksi. Pada dasarnya jumlah penerimaan total suatu perusahaan dapat diketahui dengan menghitung jumlah total kuantitas produksi dikali dengan harga yang ditetapkan untuk produk tersebut dalam satu periode.

Rumus perhitungan *total revenue* (TR) adalah sebagai berikut :

$$TR = P \times Q$$

Keterangan :

TR = *Total Revenue*

P = *Price* atau harga

Q = *Quantity* atau jumlah produksi

2.2.9 Efisiensi Biaya

Menurut Padangaran (2013) secara umum efisiensi biaya merupakan perbandingan antara jumlah modal atau biaya total yang dikeluarkan oleh produsen untuk kegiatan produksi dengan total penerimaan yang diperoleh produsen. Efisiensi penggunaan modal atau efisiensi biaya ini merupakan sebuah perhitungan untuk mengetahui seberapa besar modal atau biaya yang dikeluarkan produsen mampu dikembalikan oleh penerimaan yang diperoleh. Semakin besar hasil perbandingan kedua variabel tersebut maka semakin tinggi tingkat efisiensi biayanya. Artinya, jumlah penerimaan mampu menutupi total biaya yang dikeluarkan dan produsen mampu memperoleh laba dari kegiatan usaha. Perhitungan efisiensi biaya penting dilakukan, kesalahan dalam mengalokasikan biaya dapat menimbulkan resiko kerugian dan apabila kondisi berlanjut dapat menyebabkan perusahaan bangkrut.

Perhitungan untuk mengetahui efisiensi perusahaan atau produsen dalam menggunakan total biaya pada kegiatan produksi yaitu menggunakan alat analisis *R/C ratio*. Analisis *R/C Ratio* digunakan untuk menghitung berapa besarnya penerimaan yang diperoleh dari setiap rupiah yang diinvestasikan dalam perusahaan pada periode yang lalu. Rumus *R/C Ratio* adalah sebagai berikut:

$$R/C \text{ ratio} = \frac{TR}{TC}$$

Dimana:

R = *Revenue* (Penerimaan)

TC = *Total Cost* (Biaya)

TR = *Total Revenue* (Penerimaan)

Pengambilan keputusan dalam melihat besarnya *R/C Ratio* dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungannya dimana:

- Apabila *R/C Ratio* mendekati 1 berarti efisiensi penggunaan modal rendah karena jika $R/C=1$ berarti perusahaan mencapai atau berada pada kondisi pulang pokok atau impas. Artinya, jumlah penerimaan yang diperoleh hanya sebesar modal yang digunakan untuk memperoleh penerimaan tersebut.

- Apabila R/C Ratio < 1 berarti usaha dikatakan tidak efisien karena jumlah penerimaannya lebih kecil dari jumlah modal yang digunakan.
- Apabila nilai R/C Ratio > 1 berarti penggunaan modal dalam kondisi efisien, dimana semakin besar dan lebih dari 1 maka penggunaan modalnya semakin efisien.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tembakau merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Peran tembakau dan turunannya meliputi sumber devisa negara, sumber penerimaan melalui cukai dan pajak, sumber pendapatan petani, dan penyedia lapangan pekerjaan. Mengingat peran tembakau yang penting tersebut, pengelolaan usahatani tembakau yang baik perlu diperhatikan dan memerlukan tindakan yang sesuai sehingga usahatani tembakau dapat berproduktivitas optimal dan mampu memberi keuntungan bagi petani.

Usahatani tembakau saat ini cenderung dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat jalannya kegiatan usaha tersebut. Permasalahan-permasalahan yang umum terjadi pada usahatani tembakau yaitu tingginya penyerapan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja, yang mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usahatani tembakau tersebut.

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada usahatani tembakau terbilang cukup besar, mengingat komoditas tembakau merupakan komoditas yang beresiko tinggi sehingga perlu penanganan intensif pada setiap tahapan usahatannya. Hal tersebut didukung dengan penelitian Ruslan *et al.* (2015) yang menjelaskan bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja pada proses usahatani tembakau terbilang besar. Angka penyerapan tenaga kerja pada usahatani tembakau tersebut rata-rata sebesar 329,72 HKO per LLG (Luas Lahan Garapan) atau 344,44 HKO per hektar lahan. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah jumlah kebutuhan tenaga kerja yang besar tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja. Kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja tersebut memicu petani sebagai pihak penyedia kerja

menerapkan solusi dengan memberi upah yang sesuai sehingga tenaga kerja mau untuk mencurahkan waktunya untuk bekerja pada usahatannya. Penyesuaian upah tersebut juga akan berpengaruh terhadap total biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk menjalankan kegiatan usahatani tembakau.

Kebutuhan tenaga kerja yang besar dan tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah tenaga kerja akan berpengaruh terhadap mekanisme atau sistem pengupahan yang diberlakukan sebagai strategi petani untuk memperoleh tenaga kerja. Sistem pengupahan merupakan pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan atau dikerjakan oleh tenaga kerja pada kegiatan produksi atau proses usahatani. Hal tersebut berimplikasi bahwa ketika petani mengalami kondisi kesulitan tenaga kerja, maka petani akan menyesuaikan sistem pengupahan agar tenaga kerja mau bekerja pada usahatannya. Sistem pengupahan tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap perubahan total biaya pada usahatani tembakau.

Kabupaten Lamongan merupakan salah wilayah yang mengusahakan komoditas tembakau. Kegiatan usahatani tembakau tersebut tersebar di wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Lamongan. Petani tembakau di Kabupaten Lamongan memiliki beberapa cara yang berbeda antar satu dengan lainnya dalam mengelola usahatannya, termasuk pengelolaan penggunaan tenaga kerja. Pengelolaan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan memiliki perbedaan dalam hal sistem kelembagaan upah yang diberlakukan, yang mana dapat dikatakan terdapat sistem kelembagaan upah yang tidak berlaku di wilayah selain Kabupaten Lamongan. Sistem kelembagaan upah yang berlaku pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan meliputi sistem upah harian, sistem upah borongan, dan sistem *irutan*.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengambil tiga topik penelitian. Topik penelitian pertama membahas mengenai sistem kelembagaan upah yang berlaku pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan. Topik penelitian tersebut diambil karena terdapat sistem kelembagaan upah berupa sistem *irutan*, yang mana sistem tersebut tidak diterapkan di wilayah lainnya. Tujuan dari topik tersebut adalah mengidentifikasi sistem kelembagaan upah yang berlaku pada

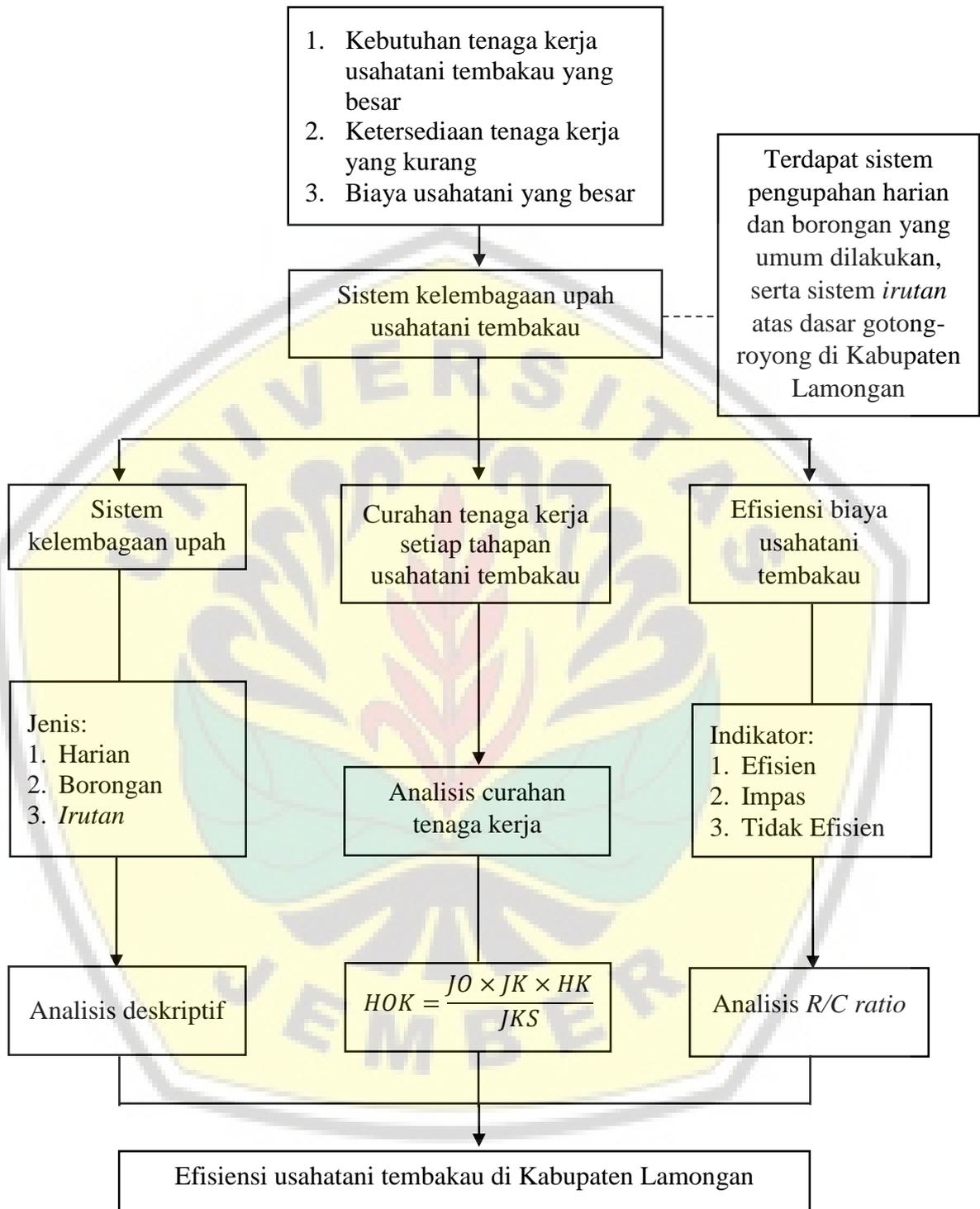
usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan melalui analisis deskriptif. Sistem kelembagaan upah yang berlaku pada kegiatan usahatani tembakau di Lamongan meliputi sistem upah harian, borongan, dan sistem *irutan*. Macam-macam sistem pengupahan yang berlaku pada usahatani tembakau tersebut menjadi indikator untuk mengetahui sistem pengupahan yang berlaku pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan.

Topik penelitian kedua membahas mengenai curahan tenaga kerja pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan. Usahatani tembakau membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar, mengingat setiap tahapan pada usahatani tembakau minim mekanisasi atau penggunaan mesin dan perlu penanganan intensif sehingga tenaga kerja berperan penting untuk keberhasilan usahatani tembakau. Topik penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi jumlah curahan tenaga kerja atau buruh tani pada setiap tahapan usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan. Perhitungan analisis curahan tenaga kerja digunakan untuk mengetahui jumlah curahan tenaga kerja total dan pada setiap tahapan usahatani tembakau yang dinyatakan dalam satuan Hari Orang Kerja (HOK).

Topik penelitian ketiga membahas mengenai efisiensi biaya pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan. Topik penelitian tersebut diambil karena terdapat perbedaan sistem pengupahan yang berlaku pada usahatani tembakau. Perbedaan sistem pengupahan tersebut menyebabkan perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh petani yang menerapkan sistem pengupahan antara sistem upah harian, upah borongan, maupun sistem *irutan*. Tujuan dari topik penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kelembagaan upah yang paling efisien. Efisiensi biaya usahatani tembakau dapat diketahui dengan melakukan analisis *R/C ratio*. Hasil perhitungan dapat memberi kesimpulan sistem kelembagaan upah yang paling efisien. Kriteria pada hasil perhitungan *R/C ratio* meliputi apabila nilai *R/C ratio* lebih dari 1 dapat dikatakan petani menerima untung, apabila nilai sama dengan 1 maka dikatakan petani tidak menerima keuntungan dan tidak rugi atau impas, serta apabila nilai kurang dari 1 maka petani dapat dikatakan rugi. Kriteria tersebut dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui usahatani dengan menerapkan sistem pengupahan mana yang paling efisien.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas maka dengan mengetahui sistem pengupahan, curahan tenaga kerja, dan efisiensi biaya pada usahatani tembakau diharapkan petani mampu memilih sistem kelembagaan upah yang efisien.





Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan efisien.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan daerah penelitian dilakukan dengan metode *purposive method*. Menurut Rianse *et al.* (2009), *purposive method* merupakan metode penentuan lokasi penelitian yang dilakukan secara sengaja atas dasar kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Daerah penelitian yang dipilih adalah Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Desa Mendogo dipilih menjadi lokasi penelitian atas pertimbangan bahwa sistem kelembagaan upah *irutan* mayoritas masih diberlakukan pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan. Sistem kelembagaan upah *irutan* tersebut sebagian besar diterapkan petani tembakau untuk memudahkan petani dalam menyerap tenaga kerja tembakau di Desa Mendogo. Sistem kelembagaan upah lainnya yaitu sistem harian dan borongan juga diterapkan oleh petani pada usahatani tembakau di Desa Mendogo. Desa Mendogo memiliki kriteria-kriteria lokasi yang mendukung untuk dilakukannya penggalian informasi dan data terkait penelitian.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian mengenai kelembagaan upah usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan yaitu metode deskriptif dan analitik. Menurut Fatihudin (2015), metode deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan memaparkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau permasalahan yang diambil dalam penelitian. Metode deskriptif ini hanya menggambarkan suatu fenomena tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Metode analitik merupakan kelanjutan dari metode deskriptif. Metode analitik ini tidak hanya menjelaskan suatu fenomena dalam penelitian, akan tetapi juga disertai analisis dan interpretasi yang lebih dalam mengenai hubungan-hubungan yang terdapat pada suatu fenomena penelitian.

Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah pertama mengenai sistem kelembagaan upah yang berlaku pada usahatani tembakau. Metode analitik digunakan menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga yaitu

mengenai curahan tenaga kerja pada setiap tahapan usahatani tembakau dan efisiensi biaya usahatani tembakau. Metode analitik ini akan mengidentifikasi jumlah curahan tenaga kerja pada setiap tahapan usahatani tembakau dan menganalisis efisiensi biaya usahatani tembakau, sehingga mampu memberi interpretasi lebih dalam mengenai topik-topik yang dibahas pada penelitian tersebut.

3.3 Metode Pengambilan Contoh

Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah generalisasi atau keseluruhan obyek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih dalam. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil karena dianggap *represintatif*. Populasi dalam kegiatan penelitian ini yaitu petani tembakau di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Mendogo 2019 diperoleh data jumlah petani yaitu sebesar 1086 petani, yang mana jumlah tersebut merupakan populasi dari penelitian ini. Mengingat jumlah populasi yang besar sehingga peneliti perlu mengambil sampel *representatif* untuk penelitian ini.

Teknik *sampling* merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan sampel penelitian. Teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *probabilty sampling*. Teknik *probability sampling* merupakan suatu metode penentuan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh unsur (populasi) untuk dapat dijadikan sampel penelitian. Pada penelitian ini digunakan teknik *simple random sampling*. *Simple random sampling* merupakan teknik sederhana pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dari populasi yang ditentukan. Salah satu kriteria dalam penggunaan teknik *simple random sampling* yaitu homogenitas dari populasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* karena mengingat populasi penelitian ini homogen atau sejenis yaitu petani tembakau. Petani tembakau di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang seluruhnya menerapkan sistem *irutan* dalam kegiatan usahatani tembakau. Metode *simple random sampling*

digunakan untuk mengambil sampel petani tembakau di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Penentuan jumlah sampel pada metode *simple random sampling* ini menggunakan rumus *slovin*. Menurut Wahyudi (2017), rumus perhitungan *slovin* untuk menentukan jumlah sampel penelitian adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = tingkat kesalahan yang dipilih

Menurut Sekaran (2000), menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan ukuran atau jumlah sampel dalam penelitian. Hal tersebut meliputi aspek *precision* atau presisi, aspek *confidence* atau kepercayaan, variabilitas dari populasi penelitian, serta biaya-manfaat dari adanya peningkatan jumlah atau ukuran sampel penelitian. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini dilakukan melalui perhitungan *slovin*. Perhitungan dengan rumus *slovin* pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jumlah populasi sebesar 1.086 petani tembakau. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 15% ($d= 15\%$) atau dengan tingkat kepercayaan sebesar 85%. Penentuan sampel penelitian dengan perhitungan *slovin* adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (d)^2}$$

$$n = \frac{1086}{1 + 1086 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{1086}{1 + 24,435}$$

$$n = \frac{1086}{25,435}$$

$$n = 42,697 \approx 43$$

Berdasarkan perhitungan *slovin* di atas dapat diketahui jumlah sampel yang digunakan dalam kegiatan penelitian adalah sebesar 43 petani tembakau. Jumlah sampel tersebut diperoleh dari populasi sebesar 1086 petani dengan tingkat kesalahan sebesar 15 % dan tingkat kepercayaan sebesar 85%. Jumlah sampel sebesar 43 petani tersebut sudah dianggap *representatif* untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Dimiyati (2013), metode pengumpulan data merupakan metode atau cara-cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang digunakan bahan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan data-data dengan teknik tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau dengan kata lain tidak diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dan dapat diperoleh melalui studi pustaka maupun sumber lain (Hermawan, 2005). Metode pengumpulan data digunakan pada penelitian mengenai mengenai kelembagaan upah usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan yaitu observasi, wawancara, dan kajian dokumen.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data mengenai sistem kelembagaan upah, jumlah tenaga kerja, dan biaya yang dikeluarkan pada usahatani tembakau. Wawancara dilakukan melalui kegiatan tanya-jawab dengan responden yaitu petani tembakau. Kegiatan wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan kuesioner sebagai panduan wawancara. Kuesioner merupakan instrumen untuk mengumpulkan data penelitian yang berisikan seperangkat pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden penelitian (Sugiyono, 2014).

2. Observasi

Menurut Raco (2010), menjelaskan bahwa teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Teknik observasi dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi secara langsung ke lokasi penelitian yang berada di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Data yang diperoleh melalui teknik observasi ini berupa data primer penelitian yaitu sistem kelembagaan upah yang diberlakukan, curahan tenaga kerja usahatani tembakau, serta efisiensi biaya usahatani tembakau.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data penelitian berupa data-data sekunder seperti dokumen penting atau bahan pustaka (Adi, 2004). Data sekunder yang diperoleh berfungsi untuk menunjang data primer yang didapatkan peneliti. Teknik studi dokumen dilakukan peneliti untuk memperoleh data sekunder penelitian mengenai jumlah produksi tembakau Jawa Timur, produksi tembakau setiap kabupaten di Jawa Timur, teori-teori yang berkaitan dengan kelembagaan upah.

3.5 Metode Analisis Data

Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini mengenai sistem kelembagaan upah yang berlaku pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu metode analisis deskriptif. Metode deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan sistem kelembagaan upah yang berlaku pada usahatani tembakau. Analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh peneliti dari hasil kegiatan wawancara dengan petani tembakau serta observasi di daerah penelitian di Kabupaten Lamongan. Sistem kelembagaan upah yang berlaku pada usahatani tembakau terdiri dari sistem upah harian, sistem upah borongan, dan sistem *irutan*. Melalui metode analisis deskriptif tersebut, akan mengidentifikasi mengenai tiga sistem kelembagaan upah tersebut.

Rumusan masalah kedua pada penelitian ini mengenai jumlah curahan tenaga kerja pada usahatani tembakau. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah curahan tenaga kerja tersebut yaitu menggunakan analisis curahan tenaga kerja. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis jumlah curahan tenaga kerja pada setiap tahapan pada usahatani tembakau. Peneliti dalam hal ini ingin mengidentifikasi jumlah curahan tenaga kerja pada setiap tahapan usahatani tembakau yang dimulai dari tahapan persiapan pembibitan hingga tahapan pasca panen. Pada perhitungan jumlah curahan tenaga kerja digunakan angka konversi untuk menyatakan satuan waktu tenaga kerja dalam satuan Hari Orang Kerja (HOK). Nilai rata-rata waktu yang digunakan dalam perhitungan curahan tenaga kerja tersebut yaitu sebesar 8 jam dalam satu hari kerja. Nilai tersebut diperoleh dari ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa waktu kerja yang dilakukan oleh buruh dilaksanakan selama 8 jam dalam satu hari kerja.

Tahapan selanjutnya yaitu menganalisis curahan tenaga kerja yang digunakan pada setiap tahapan usahatani tembakau. Formulasi perhitungan curahan tenaga kerja sebagai berikut :

$$HOK = \frac{JO \times JK \times HK}{8}$$

Keterangan:

HOK = Hari Orang Kerja (HOK)

JO = Jumlah orang/tenaga kerja (orang)

JK = Jumlah jam kerja (jam)

HK = Jumlah hari kerja (hari)

Rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini mengenai efisiensi biaya usahatani tembakau. Biaya usahatani tersebut dipengaruhi oleh biaya tenaga kerja yang dikeluarkan petani. Proses pembiayaan atau teknis pembiayaan tenaga kerja tersebut dilakukan melalui sistem kelembagaan upah yang diberlakukan. Hal tersebut berimplikasi bahwa sistem kelembagaan upah yang diberlakukan

mempengaruhi jumlah biaya yang dikeluarkan oleh petani tembakau. Tahapan selanjutnya yaitu menganalisis efisiensi biaya usahatani tembakau. Formulasi analisis efisiensi biaya yaitu sebagai berikut :

$$R/C \text{ ratio} = \frac{TR}{TC}$$

Dimana:

TC = *Total Cost* (Biaya)

TR = *Total Revenue* (Penerimaan)

Pengambilan keputusan dalam melihat besarnya R/C Ratio dapat dilakukan dengan melihat hasil perhitungannya dimana:

- a. Apabila R/C Ratio mendekati 1 berarti efisiensi penggunaan modal rendah karena jika R/C=1 berarti perusahaan mencapai atau berada pada kondisi pulang pokok atau impas. Artinya, jumlah penerimaan yang diperoleh hanya sebesar modal yang digunakan untuk memperoleh penerimaan tersebut.
- b. Apabila R/C Ratio < 1 berarti penggunaan modal dalam kondisi rugi karena jumlah penerimaannya lebih kecil dari jumlah modal yang digunakan.
- c. Apabila nilai R/C Ratio > 1 berarti penggunaan modal dalam kondisi efisien, dimana semakin besar dan lebih dari 1 maka penggunaan modalnya semakin efisien.

3.6 Definisi Operasional

1. Petani tembakau adalah petani yang mengusahakan komoditas tembakau di Kabupaten Lamongan.
2. Tahapan usahatani tembakau meliputi persiapan pembibitan, proses pembibitan, persiapan media tanam, proses penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen tembakau.
3. Tenaga kerja merupakan buruh tani tembakau baik pria maupun wanita yang berumur di atas 18 tahun di Kabupaten Lamongan.
4. Curahan tenaga kerja merupakan jumlah waktu kerja yang dicurahkan oleh buruh tani tembakau pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan.

5. Hari orang kerja (HOK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menghitung curahan waktu tenaga kerja atau buruh tani tembakau.
6. Rata-rata waktu kerja pada satu hari kerja buruh tani tembakau di Kabupaten Lamongan adalah 8 jam.
7. Upah merupakan hak yang diterima buruh tani tembakau di Kabupaten Lamongan dalam bentuk uang yang dinyatakan dalam satuan rupiah dan bentuk gotong-royong (*irutan*).
8. Kelembagaan merupakan seperangkat aturan yang dirancang dan diberlakukan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Lamongan..
9. Sistem kelembagaan upah merupakan aturan atau sistem yang diberlakukan pada pemberian upah untuk mendapatkan tenaga kerja atau buruh tani tembakau di Kabupaten Lamongan.
10. *Irutan* merupakan kearifan lokal yang diterapkan petani tembakau di Kabupaten Lamongan untuk mendapatkan tenaga kerja tanpa memberi upah berupa uang tunai pada tahapan penanaman, panen, dan pasca panen tembakau.
11. Sistem harian merupakan sistem kelembagaan upah di Kabupaten Lamongan yang dilakukan dengan memberi upah berupa uang dalam satuan rupiah kepada buruh tani tembakau yang dihitung berdasarkan per satu hari kerja. Sistem harian diterapkan pada tahapan persiapan pembibitan hingga tahapan pasca panen.
12. Sistem borongan merupakan sistem kelembagaan upah di Kabupaten Lamongan yang dilakukan dengan memberi upah berupa uang dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan kuantitas atau volume yang telah dikerjakan buruh tani tembakau. Sistem borongan diterapkan pada tahapan penanaman, panen, dan pasca panen tembakau.
13. Desa Mendogo adalah desa lokasi penelitian yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan yang masih mempertahankan sistem kelembagaan upah *irutan* pada usahatani tembakau.
14. Populasi penelitian merupakan seluruh petani tembakau di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

15. Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi penelitian sejumlah 43 petani tembakau yang ditentukan karena dianggap *representatif*
16. Responden adalah petani tembakau yang ditentukan sebagai sampel dalam penelitian ini.
17. Total biaya merupakan total biaya pada usahatani tembakau yang diperoleh dari penjumlahan total biaya variabel (TVC) dan total biaya tetap (TFC) yang dinyatakan dalam satuan rupiah dari rata-rata luas lahan 0,75 ha.
18. Penerimaan merupakan total penerimaan atau *total revenue* (TR) yang diperoleh dari jumlah hasil produksi tembakau dikali dengan harga jual tembakau yang dinyatakan dalam satuan rupiah dari rata-rata luas lahan 0,75 ha.
19. Efisiensi biaya merupakan tingkat efisiensi dari total biaya yang dikeluarkan petani dalam menjalankan kegiatan usahatani tembakau dari rata-rata luas lahan 0,75 ha.
20. Analisis *R/C ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui efisiensi biaya pada usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan.
21. Efisien merupakan suatu kondisi dimana jumlah penerimaan usahatani tembakau lebih besar dibandingkan dengan total biaya usahatani tembakau yang ditunjukkan dengan nilai *R/C ratio* lebih dari 1.
22. Impas merupakan suatu kondisi dimana jumlah biaya yang dikeluarkan pada usahatani tembakau sama dengan jumlah penerimaan usahatani tembakau yang ditunjukkan dengan nilai *R/C ratio* sama dengan 1.
23. Tidak efisien merupakan kondisi dimana penerimaan pada usahatani tembakau lebih kecil dibandingkan total biaya usahatani tembakau yang ditunjukkan dengan nilai *R/C ratio* kurang dari 1.

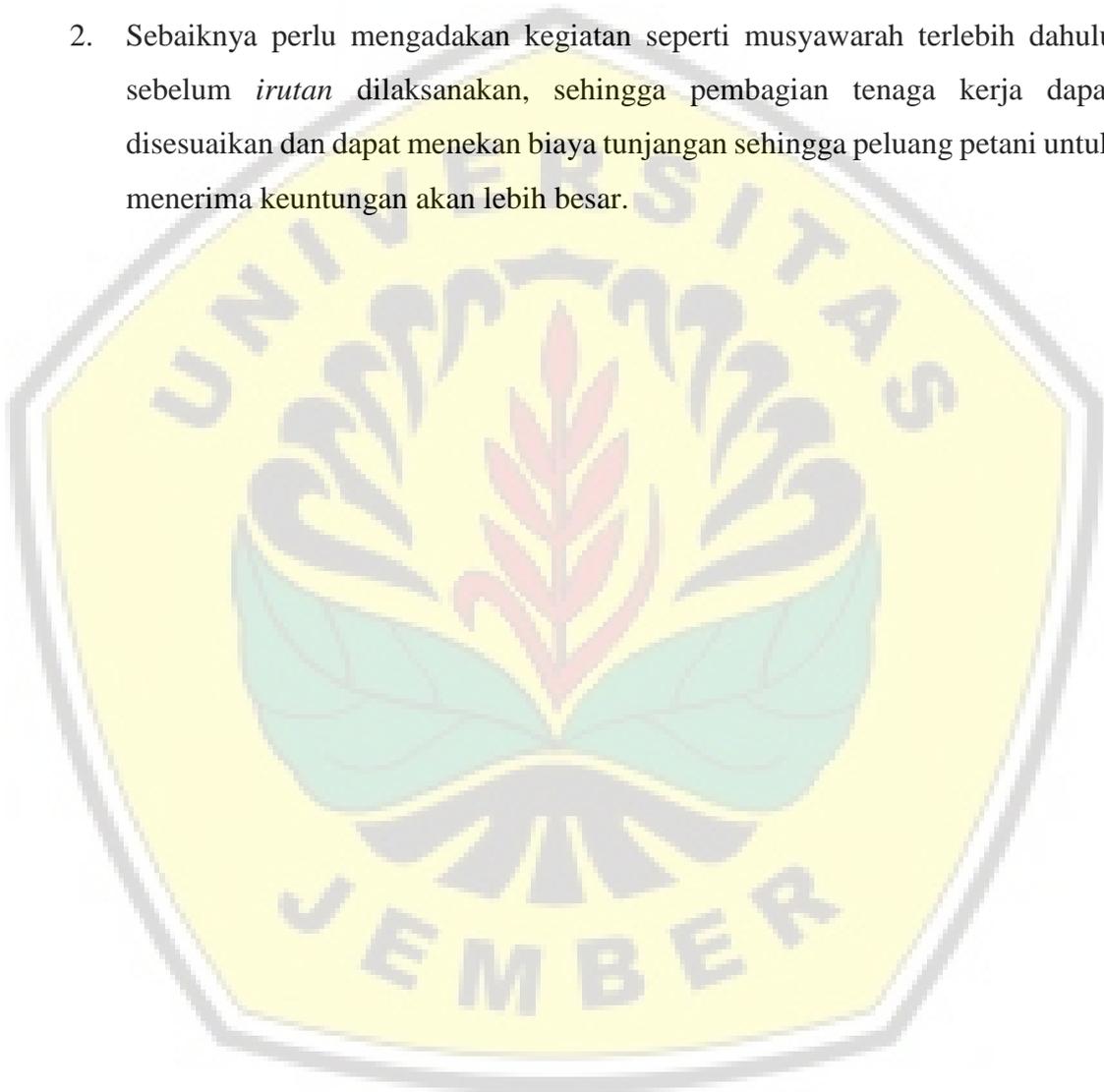
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Sistem kelembagaan upah yang diterapkan pada usahatani tembakau di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan meliputi sistem harian, sistem borongan, dan *irutan*. Sistem harian diterapkan dalam kegiatan persiapan pembibitan, pembibitan, pemeliharaan bibit, pembersihan jerami, pembuatan saluran air sekitar lahan, pembuatan lubang tanam, penyulaman, pengairan, pemupukan, penyiangan, pemangkasan, dan pengendalian hama penyakit pada usahatani tembakau. Sistem borongan diterapkan pada kegiatan pembajakan lahan sawah. Sistem *irutan* diterapkan pada kegiatan penanaman, panen, rangkaian pasca panen yang meliputi sortir, rajang, *eler* atau penataan tembakau rajang di atas bilik bambu, penjemuran, dan pengemasan.
2. Curahan tenaga kerja usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan rata-rata sebesar 262,72 HOK per 0,75 ha dalam seluruh rangkaian usahatani tembakau. Total rata-rata curahan tenaga kerja pria yang digunakan petani tembakau pada seluruh kegiatan usahatani tembakau adalah sebesar 149,10 HOK dan 113,62 HOK untuk tenaga kerja wanita. Curahan tenaga kerja paling besar pada tahapan pasca panen tembakau yaitu sebesar 115 HOK dan yang paling kecil terdapat pada tahapan pembibitan yaitu sebesar 1,32 HOK.
3. Total biaya rata-rata usahatani tembakau sebesar Rp. 16.590.776 per 0,75 ha dan total penerimaan rata-rata yaitu sebesar Rp. 32.313.953 per 0,75 ha. Usahatani tembakau di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dapat dikatakan efisien. Hal tersebut dapat diketahui dengan melakukan perhitungan *R/C ratio*. Nilai *R/C ratio* usahatani tembakau di Desa Mendogo adalah sebesar 1,95. Nilai memenuhi kriteria pengambilan keputusan lebih dari 1 sehingga usahatani tembakau di Desa Mendogo dikatakan efisien.

5.2 Saran

1. Bagi petani tetap mempertahankan sistem kelembagaan upah *irutan* dalam kegiatan usahatani tembakau karena dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa kegiatan usahatani tembakau di Kabupaten Lamongan dikatakan efisien.
2. Sebaiknya perlu mengadakan kegiatan seperti musyawarah terlebih dahulu sebelum *irutan* dilaksanakan, sehingga pembagian tenaga kerja dapat disesuaikan dan dapat menekan biaya tunjangan sehingga peluang petani untuk menerima keuntungan akan lebih besar.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Adisu, E. 2008. *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif – Bonus – THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun – Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*. Jakarta: ForumSahabat.
- Anantanyu, S. 2011. Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *SEPA*, 7 (2): 102-109.
- Arifien, S. M. 2013. *Tembakau di Persimpangan Jalan*. Surabaya: Dinas Perkebunan Jawa Timur.
- Azizah, S., J. A. Putritamara, dan N. Febrianto. 2019. *Aspek Kehidupan Petani Gurem*. Malang: UB Press.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Jawa Timur dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Surabaya.
- Budiman, H. 2013. *Budidaya Tanaman Tembakau Kiat Menanam Tembakau Berkualitas Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Case, E. K. dan R. C. Fair. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fatihudin, D. 2015. *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Fauziyah, E. 2010. Analisis Efisiensi Teknis Usahatani Tembakau (Suatu Kajian Dengan Menggunakan Fungsi Produksi Frontier Stokhastik). *EMBRYO*, 7 (1): 1 – 7.
- Hanafie, R. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Hermawan, A. 2005. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hernanto, F. 1995. *Ilmu Usahatani*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Ilmiyah, F. 2015. Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Bagian Produksi PR Trubus Alami Malang. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

- Indarti, S., A. Luthfi, dan E. Kismini. 2016. Transformasi Pertanian dan Diferensiasi Sosial Ekonomi Petani di Desa Kunir Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. *Solidarity*, 5 (1): 1 – 10.
- Khairiyah, R., R. Wibowo, dan J. Januar. 2018. Dinamika Agribisnis Tembakau dalam Perekonomian Provinsi Jawa Timur. *Prosiding Seminar Nasional*. Universitas Jember: Jember.
- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. 2017. *Siaran Pers Kontribusi Besar Industri Hasil Tembakau Bagi Ekonomi Nasional*. <https://kemenperin.go.id/artikel/17257/Kontribusi-Besar-Industri-Hasil-Tembakau-Bagi-Ekonomi-Nasional>
- Kementrian Pertanian. 2018. *Statistik Data Lahan Pertanian tahun 2013 – 2017*.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2001. *Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 23*.
- Koentaraningrat. 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, A. M. 2016. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Keputusan Petani dan Analisis Pendapatan Usahatani Tembakau *Voor-Oogst* Samporis di Kabupaten Jember. *Skripsi*. Fakultas Pertanian. Universitas Jember.
- Madina, A. S. 2015. Curahan Waktu Kerja Petani Pada Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *Jambura Agribusiness Journal*, Universitas Gorontalo.
- Munawaroh, W., S. Raharto, dan A. Suwandari. 2017. Analisis Pendapatan dan Strategi Pengembangan Usahatani Tembakau Rajang Samporis. *Agribest*, 1 (2) : 73 – 83.
- North, C. D. 1990. *Institutions, Institutional Changes And Economic Performances*. Cambridge: Cambridge University Press
- Padangaran, A. M. 2013. *Analisis Kuantitatif: Pembiayaan Perusahaan Pertanian*. Bogor: IPB Press.
- Putri, A. E., A. Suwandari, dan J. A. Ridjal. 2015. Analisis Pendapatan dan Efisiensi Biaya Usahatani Tembakau Maesan 2 di Kabupaten Bondowoso. *JSEP*, 8 (1) : 64 – 69.
- Raco, R. J.. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara RI tahun 2003, No. 13. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rianse, U. *et al.* 2019. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*. Bandung: Alfabeta.
- Rondhi, M. 2019. *Kelembagaan Irigasi Pendekatan Model Kontrak*. Yogyakarta: Teknosain.
- Rondhi, M. dan J. M. M. Aji. 2015. *Ekonomi Mikro Pendekatan Praktis dan Lugas*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.
- Ruslan, Rosmilawati, dan I. W. Suadnya. 2015. Analisis Penyerapan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Usahatani Tembakau Virginia di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. *Agroteksos*, 2 (3) : 1 – 10.
- Sahban, A. M. 2018. *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Santoso, K. 2013. *Tembakau Dibutuhkan dan Dimusuhi*. Jember: UPT Penerbit UNEJ.
- Setiadi, M. E., K. A. Hakam, dan R. Effendi. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: KENCANA.
- Sekaran, U. 2000. *Research Methods for Business A Skill Building Approach*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Siombo, R. M. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan dan Kearifan Lokal Masyarakat*. Jakarta: Grasindo.
- Sirait, T. J. 2006. *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalm Organisasi*. Jakarta: Grasindo.
- Sofwan. 2016. Analisis Kontribusi Curahan Tenaga Kerja Wanita Tani Pada Usahatani Tembakau Terhadap Pendapatan Keluarga. *Trisula LP2M Undar*, 4 (1): 419 – 426.
- Sugiarto, T. Herlambang, Brastoro, R. Sudjana, dan S. Kelana. 2007. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

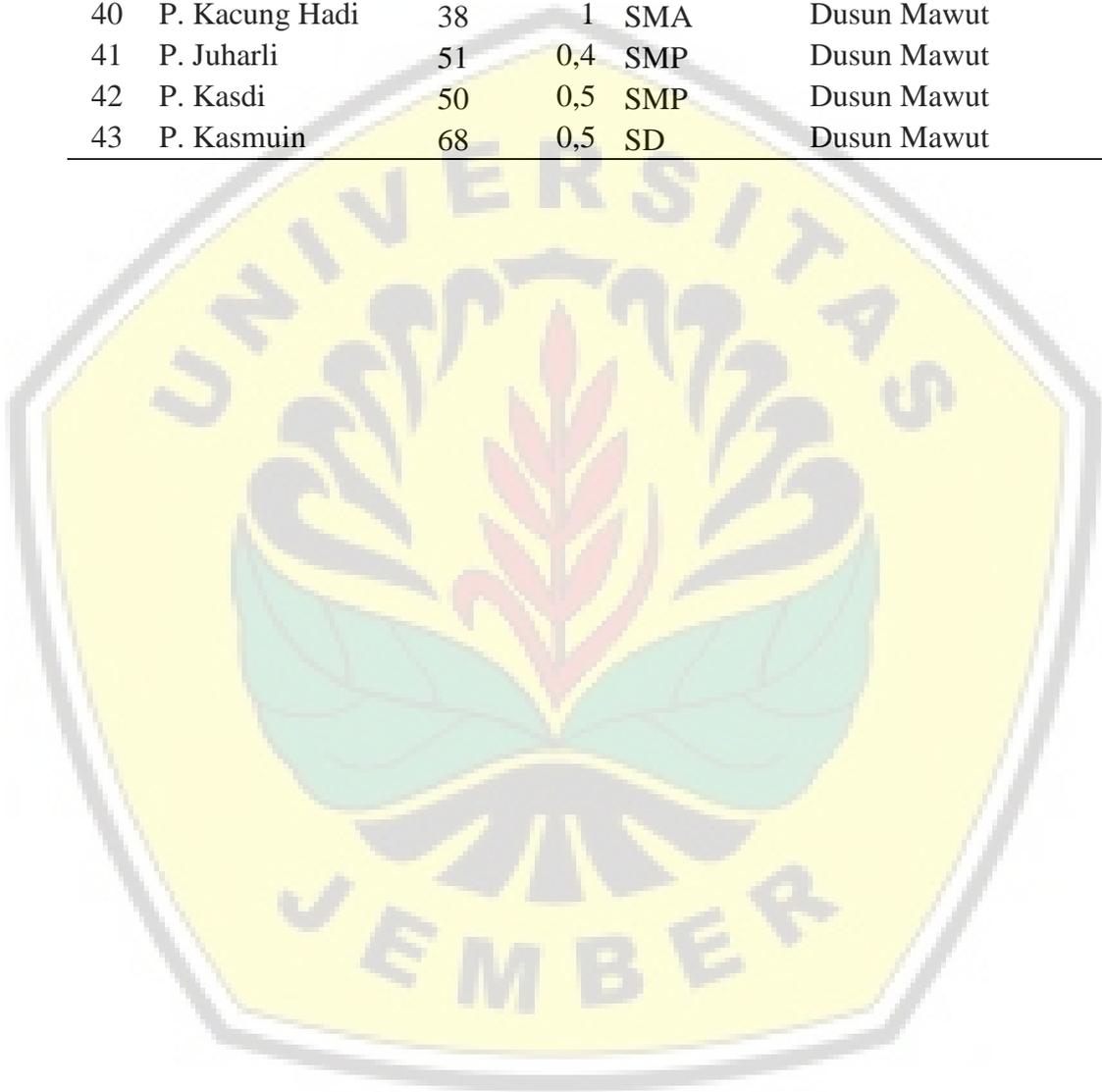
- Sukirno, S. 2011. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Suratiyah, K. 2015. *Ilmu Usahatani Edisi Revisi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Syarif, R. D., A. Kusmiati, dan E. S. Hani. 2015. Hubungan Antara Pelatihan Dengan Produktivitas Waktu Baku dan Tingkat Kebenaran Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita di Gudang Pengolah (Studi Kasus di PTPN X Kebun Ajong Gayasan Jember). *JSEP*, 8 (3): 9 – 24.
- Tyas, W. S. H. 2019. Sistem *Saya* Dalam Pertanian Tembakau di Desa Semampirejo Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. *Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, 1 (1): 1 – 10.
- Wahyudi, T. S. 2017. *Statistika Ekonomi Konsep, Teori, dan Penerapan*. Malang: UB press.
- Wibowo, R., A. Zainuddin, I. S. Magfiroh, I. K. Setyawati, J. A. Ridjal, L. P. Suciati, dan R. Y. Rahman. 2018. *Agribisnis Tembakau Membuka Ruang Inovasi dan Bisnis untuk Kemajuan Industri*. Bogor: IPB Press.
- Zaini, A., N. P. Palupi, P. Pujowati, dan A. Emmawati. *Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Unggulan di Kutai Barat*. Yogyakarta: Budi Utama.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Responden Petani Tembakau

No.	Nama Responden	Usia	Luas Lahan	Pendidikan	Alamat
1	P. Ferry	45	0,5	SMA	Dusun Teguhan
2	P. Wahyudi	47	0,5	SMA	Dusun Teguhan
3	P. Panut	43	0,25	SMA	Dusun Teguhan
4	P. Maji	47	0,5	SMA	Dusun Teguhan
5	P. Tari	48	0,75	SMA	Dusun Teguhan
6	P. Nur Alim	56	1	SD	Dusun Teguhan
7	P. Timan	49	1	SMA	Dusun Teguhan
8	P. Giman	58	0,5	SMA	Dusun Teguhan
9	P. Yanto	61	0,5	SMP	Dusun Teguhan
10	P. Sumiran	53	0,5	SMA	Dusun Teguhan
11	P. Ramiji	46	0,8	SMA	Dusun Teguhan
12	P. Sukadi	53	0,25	SMP	Dusun Teguhan
13	P. Garman	48	1	SMA	Dusun Teguhan
14	P. Jaenuri	43	0,3	SMA	Dusun Teguhan
15	P. Taji	63	1,5	SD	Dusun Teguhan
16	P. Ngari	44	0,4	SMA	Dusun Teguhan
17	P. Sukiman	47	0,4	SMA	Dusun Teguhan
18	P. Juwadi	45	0,5	SMA	Dusun Teguhan
19	P. Suraji	54	2	SMP	Dusun Teguhan
20	P. Maejan	50	1	SMA	Dusun Teguhan
21	P. Suprat	47	0,25	SMA	Dusun Bendo Kauman
22	P. Sukar	54	0,8	SMA	Dusun Bendo Kauman
23	P. Mat Raji	66	1,5	SD	Dusun Bendo Kauman
24	P. Sukardi	55	0,5	SMA	Dusun Bendo Kauman
25	P. Puguh	43	0,5	SMA	Dusun Bendo Kauman
26	P. Suramin	37	0,5	SMA	Dusun Bendo Kauman
27	P. Supono	48	0,75	SMA	Dusun Bendo Kauman
28	P. Lasemo	45	0,5	SMA	Dusun Bendo Kauman
29	P. Arif	52	1	SMA	Dusun Bendo Kauman
30	P. Dahlan	45	0,8	SMA	Dusun Bendo Kauman
31	P. Marno	62	0,5	SD	Dusun Mawut
32	P. Agus Budi	36	2	SMA	Dusun Mawut
33	P. Saeko	47	1	SMA	Dusun Mawut

34	P. Bakri	48	0,75	SMA	Dusun Mawut
35	P. Karno	57	1,5	SMP	Dusun Mawut
36	P. Yatmo	50	0,5	SMP	Dusun Mawut
37	P. Padi	42	1	SMA	Dusun Mawut
38	P. Taji	54	1	SMP	Dusun Mawut
39	P. Gimun	67	0,5	SD	Dusun Mawut
40	P. Kacung Hadi	38	1	SMA	Dusun Mawut
41	P. Juharli	51	0,4	SMP	Dusun Mawut
42	P. Kasdi	50	0,5	SMP	Dusun Mawut
43	P. Kasmuin	68	0,5	SD	Dusun Mawut



Lampiran 2a. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Tembakau Tahap Pembibitan

No.	Nama Responden	Persiapan Pembibitan		Pembibitan		Pemeliharaan Benih	
		P	W	P	W	P	W
1	P. Ferry	0	0	0	0	0	0
2	P. Wahyudi	0	0	0	0	0	0
3	P. Panut	0	0	0	0	0	0
4	P. Maji	0	0	0	0	0	0
5	P. Tari	0	0	0	0	0	0
6	P. Nur Alim	0	0	0	0	0	0
7	P. Timan	0	0	0	0	0	0
8	P. Gimam	0	0	0	0	0	0
9	P. Yanto	0	0	0	0	0	0
10	P. Sumiran	0	0	0	0	0	0
11	P. Ramiji	0	0	0	0	0	0
12	P. Sukadi	0	0	0	0	0	0
13	P. Garman	2	0	1	0	2,5	0
14	P. Jaenuri	0	0	0	0	0	0
15	P. Taji	2	0	1	0	2,5	0
16	P. Ngari	0	0	0	0	0	0
17	P. Sukiman	0	0	0	0	0	0
18	P. Juwadi	0	0	0	0	0	0
19	P. Suraji	2	0	1	0	2,5	0
20	P. Maejan	2	0	1	0	2,5	0
21	P. Suprat	0	0	0	0	0	0

22	P. Sukar	2	0	1	0	2,5	0
23	P. Mat Raji	0	0	0	0	0	0
24	P. Sukardi	0	0	0	0	0	0
25	P. Puguh	0	0	0	0	0	0
26	P. Suramin	0	0	0	0	0	0
27	P. Supono	0	0	0	0	0	0
28	P. Lasemo	1,5	0	0,5	0	2	0
29	P. Arif	0	0	0	0	0	0
30	P. Dahlan	0	0	0	0	0	0
31	P. Marno	1,5	0	0	0	0	0
32	P. Agus Budi	1,5	0	1	0	2	0
33	P. Saeko	0	0	0	0	0	0
34	P. Bakri	2	0	1	0	2,5	0
35	P. Karno	2	0	1	0	0	0
36	P. Yatmo	0	0	0	0	0	0
37	P. Padi	2	0	1	0	2,5	0
38	P. Taji	0	0	0	0	0	0
39	P. Gimun	0	0	0	0	0	0
40	P. Kacung Hadi	2	0	1	0	2,5	0
41	P. Juharli	0	0	0	0	0	0
42	P. Kasdi	0	0	0	0	0	0
43	P. Kasmuin	0	0	0	0	0	0
Total		22,5	0	10,5	0	24	0
Rata-rata		0,52	0	0,24	0	0,56	0

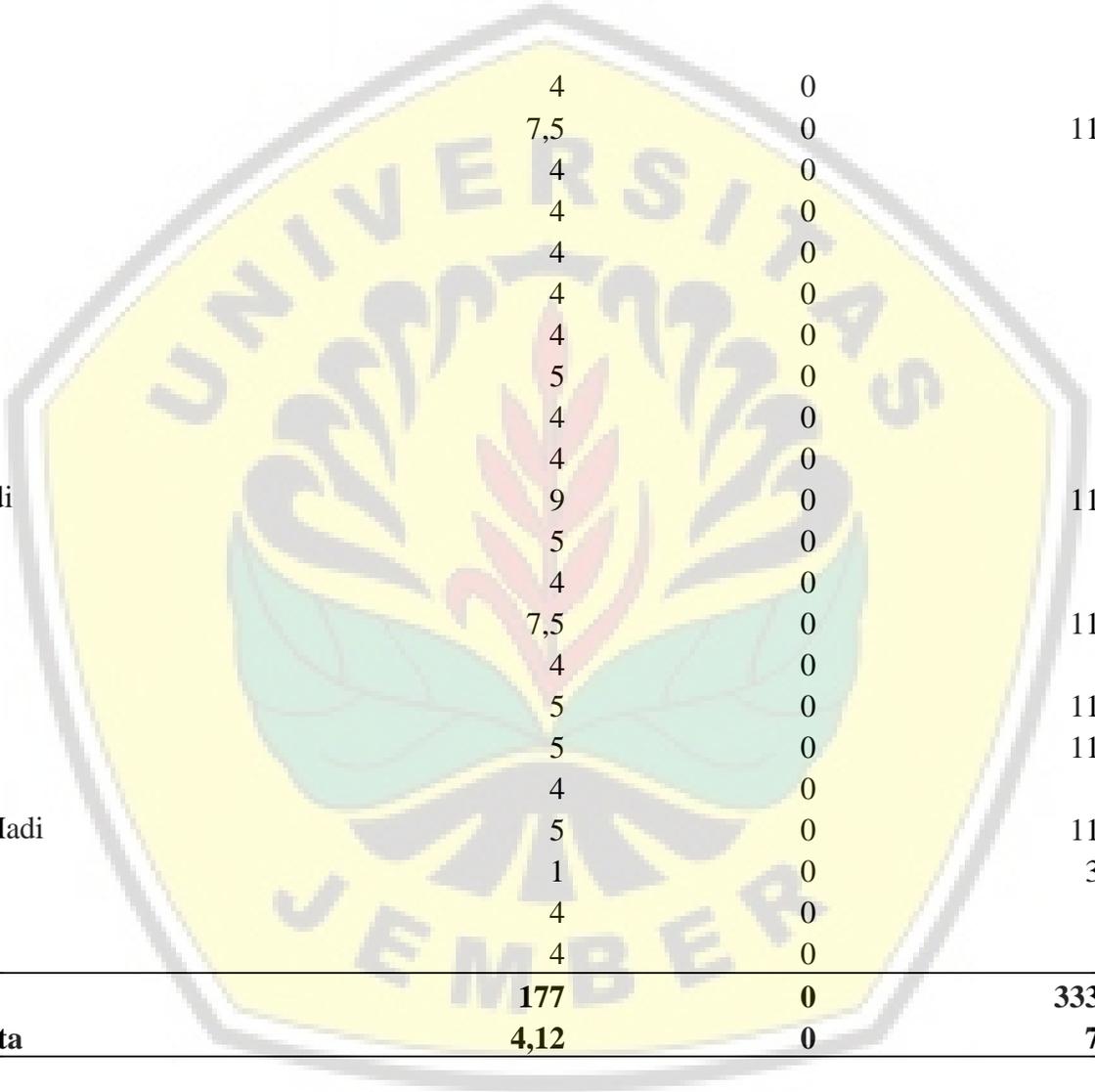
Lampiran 2b. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Tembakau Tahap Persiapan Media Tanam

No.	Nama Responden	Pembersihan Jerami		Pembuatan Got		Pembajakan	
		P	W	P	W	P	W
1	P. Ferry	0,5	0	8	0	6	0
2	P. Wahyudi	0,5	0	8	0	6	0
3	P. Panut	0,5	0	4	0	4	0
4	P. Maji	0,5	0	8	0	6	0
5	P. Tari	1	0	8	0	9	0
6	P. Nur Alim	1	0	10	0	9	0
7	P. Timan	1	0	10	0	9	0
8	P. Gimam	0,5	0	8	0	6	0
9	P. Yanto	0,5	0	8	0	6	0
10	P. Sumiran	0,5	0	8	0	6	0
11	P. Ramiji	1	0	8	0	9	0
12	P. Sukadi	0,5	0	4	0	4	0
13	P. Garman	1	0	10	0	9	0
14	P. Jaenuri	0,5	0	4	0	4	0
15	P. Taji	2	0	15	0	16	0
16	P. Ngari	0,5	0	6	0	4	0
17	P. Sukiman	0,5	0	4	0	4	0
18	P. Juwadi	0,5	0	6	0	6	0
19	P. Suraji	2	0	21	0	20	0
20	P. Maejan	1	0	10	0	9	0
21	P. Suprat	0,5	0	3	0	4	0

22	P. Sukar	1	0	8	0	9	0
23	P. Mat Raji	2	0	15	0	12	0
24	P. Sukardi	0,5	0	8	0	6	0
25	P. Puguh	0,5	0	8	0	6	0
26	P. Suramin	0,5	0	8	0	6	0
27	P. Supono	1	0	8	0	9	0
28	P. Lasemo	0,5	0	8	0	6	0
29	P. Arif	2	0	10	0	12	0
30	P. Dahlan	1	0	8	0	9	0
31	P. Marno	0,5	0	8	0	6	0
32	P. Agus Budi	3	0	21	0	20	0
33	P. Saeko	1	0	10	0	9	0
34	P. Bakri	1	0	8	0	9	0
35	P. Karno	2	0	15	0	16	0
36	P. Yatmo	1	0	8	0	6	0
37	P. Padi	1	0	10	0	9	0
38	P. Taji	1	0	10	0	9	0
39	P. Gimun	0,5	0	8	0	6	0
40	P. Kacung Hadi	1	0	10	0	9	0
41	P. Juharli	0,5	0	4	0	4	0
42	P. Kasdi	0,5	0	8	0	6	0
43	P. Kasmuin	0,5	0	8	0	6	0
Total		22,5	39	0	380	0	346
Rata-rata		0,52	0,91	0	8,84	0	8,05

Lampiran 2c. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Tembakau Tahap Penanaman

No.	Nama Responden	Pembuatan Lubang Tanam		Penanaman	
		P	W	P	W
1	P. Ferry	4	0	7,5	7,5
2	P. Wahyudi	4	0	3,75	7,5
3	P. Panut	1	0	3,75	3,75
4	P. Maji	4	0	7,5	7,5
5	P. Tari	4	0	7,5	7,5
6	P. Nur Alim	5	0	11,25	11,25
7	P. Timan	5	0	11,25	7,5
8	P. Gimam	4	0	7,5	7,5
9	P. Yanto	4	0	7,5	3,75
10	P. Sumiran	4	0	7,5	7,5
11	P. Ramiji	4	0	7,5	7,5
12	P. Sukadi	1	0	3,75	3,75
13	P. Garman	5	0	7,5	11,25
14	P. Jaenuri	1	0	3,75	3,75
15	P. Taji	7,5	0	11,25	15
16	P. Ngari	1,5	0	3,75	3,75
17	P. Sukiman	1	0	3,75	7,5
18	P. Juwadi	3	0	7,5	7,5
19	P. Suraji	6	0	11,25	15
20	P. Maejan	5	0	7,5	11,25
21	P. Suprat	1	0	7,5	3,75



22	P. Sukar	4	0	7,5	11,25
23	P. Mat Raji	7,5	0	11,25	11,25
24	P. Sukardi	4	0	7,5	7,5
25	P. Puguh	4	0	7,5	7,5
26	P. Suramin	4	0	7,5	7,5
27	P. Supono	4	0	7,5	7,5
28	P. Lasemo	4	0	7,5	3,75
29	P. Arif	5	0	7,5	11,25
30	P. Dahlan	4	0	7,5	7,5
31	P. Marno	4	0	7,5	7,5
32	P. Agus Budi	9	0	11,25	18,75
33	P. Saeko	5	0	7,5	7,5
34	P. Bakri	4	0	7,5	7,5
35	P. Karno	7,5	0	11,25	11,25
36	P. Yatmo	4	0	7,5	3,75
37	P. Padi	5	0	11,25	11,25
38	P. Taji	5	0	11,25	11,25
39	P. Gimun	4	0	7,5	7,5
40	P. Kacung Hadi	5	0	11,25	11,25
41	P. Juharli	1	0	3,75	3,75
42	P. Kasdi	4	0	7,5	7,5
43	P. Kasmuin	4	0	7,5	7,5
Total		177	0	333,75	352,5
Rata-rata		4,12	0	7,76	8,20

Lampiran 2d. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Tembakau Tahap Pemeliharaan Tanaman

No.	Nama Responden	Penyiraman		Penyulaman		Penyiangan	
		P	W	P	W	P	W
1	P. Ferry	5	2,5	3,5	0	8	0
2	P. Wahyudi	5	5	3,5	0	8	0
3	P. Panut	2,5	2,5	3,5	0	4	0
4	P. Maji	5	5	3,5	0	8	0
5	P. Tari	7,5	2,5	3,5	0	10	0
6	P. Nur Alim	15	15	7	0	20	0
7	P. Timan	15	10	7	0	20	0
8	P. Gimam	5	5	3,5	0	8	0
9	P. Yanto	5	5	3,5	0	8	0
10	P. Sumiran	5	2,5	3,5	0	8	0
11	P. Ramiji	5	5	3,5	0	10	0
12	P. Sukadi	2,5	0	3,5	0	4	0
13	P. Garman	15	10	7	0	20	0
14	P. Jaenuri	2,5	2,5	0	0	4	0
15	P. Taji	15	15	10,5	3,5	24	0
16	P. Ngari	5	2,5	0	0	6	0
17	P. Sukiman	5	2,5	3,5	0	6	0
18	P. Juwadi	5	5	3,5	0	8	0
19	P. Suraji	22,5	22,5	14	0	28	0
20	P. Maejan	15	10	3,5	3,5	20	0
21	P. Suprat	2,5	0	0	0	4	0

Digital Repository Universitas Jember

22	P. Sukar	5	5	3,5	0	10	0
23	P. Mat Raji	15	15	10,5	0	24	0
24	P. Sukardi	5	5	3,5	0	8	0
25	P. Puguh	7,5	2,5	3,5	0	8	0
26	P. Suramin	5	5	3,5	0	8	0
27	P. Supono	5	5	0	0	10	0
28	P. Lasemo	5	5	3,5	0	8	0
29	P. Arif	15	15	3,5	3,5	20	0
30	P. Dahlan	7,5	2,5	3,5	0	10	0
31	P. Marno	7,5	2,5	3,5	0	8	0
32	P. Agus Budi	22,5	22,5	7	7	28	0
33	P. Saeko	15	10	3,5	3,5	20	0
34	P. Bakri	5	5	3,5	0	10	0
35	P. Karno	15	10	7	0	24	0
36	P. Yatmo	5	5	3,5	0	8	0
37	P. Padi	15	15	7	3,5	20	0
38	P. Taji	15	10	7	0	20	0
39	P. Gimun	5	5	3,5	0	8	0
40	P. Kacung Hadi	15	10	7	0	20	0
41	P. Juharli	2,5	0	3,5	0	4	0
42	P. Kasdi	5	5	3,5	0	8	0
43	P. Kasmuin	5	2,5	3,5	0	8	0
Total		367,5	292,5	189	24,5	528	0
Rata-rata		8,55	6,80	4,40	0,57	12,28	0

No.	Nama Responden	Pemupukan		Pemangkasan		Pengendalian HPT	
		P	W	P	W	P	W
1	P. Ferry	5	5	4	0	3	0
2	P. Wahyudi	5	5	4	0	3	1,5
3	P. Panut	2,5	2,5	2	0	1,5	0
4	P. Maji	5	5	4	0	3	0
5	P. Tari	5	5	4	0	3	3
6	P. Nur Alim	15	15	4	0	6	6
7	P. Timan	15	15	4	0	6	6
8	P. Giman	5	5	4	0	3	0
9	P. Yanto	5	5	4	0	1,5	1,5
10	P. Sumiran	5	5	4	0	3	1,5
11	P. Ramiji	5	5	4	0	4,5	1,5
12	P. Sukadi	2,5	2,5	2	0	1,5	0
13	P. Garman	15	15	4	0	6	6
14	P. Jaenuri	2,5	2,5	2	0	1,5	0
15	P. Taji	10	10	4	0	6	6
16	P. Ngari	2,5	2,5	2	0	1,5	1,5
17	P. Sukiman	2,5	2,5	2	0	1,5	1,5
18	P. Juwadi	5	5	4	0	3	1,5
19	P. Suraji	22,5	22,5	6	0	6	6
20	P. Maejan	15	15	4	0	3	3
21	P. Suprat	2,5	2,5	2	0	1,5	0
22	P. Sukar	5	5	4	0	3	3
23	P. Mat Raji	7,5	7,5	4	0	6	6

24	P. Sukardi	5	5	4	0	3	1,5
25	P. Puguh	5	5	4	0	3	0
26	P. Suramin	5	5	4	0	3	0
27	P. Supono	5	5	4	0	3	3
28	P. Lasemo	5	5	4	0	1,5	1,5
29	P. Arif	15	15	4	0	6	6
30	P. Dahlan	5	5	4	0	3	3
31	P. Marno	5	5	4	0	3	1,5
32	P. Agus Budi	22,5	22,5	8	0	9	6
33	P. Saeko	15	15	4	0	6	6
34	P. Bakri	5	5	4	0	4,5	3
35	P. Karno	10	10	6	0	6	6
36	P. Yatmo	5	5	4	0	3	3
37	P. Padi	15	15	4	0	6	6
38	P. Taji	15	15	4	0	6	6
39	P. Gimun	5	5	4	0	3	1,5
40	P. Kacung Hadi	15	15	4	0	6	6
41	P. Juharli	2,5	2,5	2	0	1,5	1,5
42	P. Kasdi	5	5	4	0	3	1,5
43	P. Kasmuin	5	5	4	0	3	0
Total		367,5	335	335	166	0	160,5
Rata-rata		8,55	7,79	7,79	3,86	0	3,73

Lampiran 2e. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Tembakau Tahap Panen

No.	Nama Responden	Petik-1		Petik-2		Petik-3		Petik-4		Petik-5	
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
1	P. Ferry	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	P. Wahyudi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	P. Panut	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	P. Maji	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	P. Tari	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	P. Nur Alim	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	P. Timan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	P. Gimam	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	P. Yanto	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10	P. Sumiran	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	P. Ramiji	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	P. Sukadi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	P. Garman	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	P. Jaenuri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	P. Taji	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	P. Ngari	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	P. Sukiman	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18	P. Juwadi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19	P. Suraji	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	P. Maejan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21	P. Suprat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

22	P. Sukar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	P. Mat Raji	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	P. Sukardi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
25	P. Puguh	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	P. Suramin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	P. Supono	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28	P. Lasemo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	P. Arif	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	P. Dahlan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
31	P. Marno	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
32	P. Agus Budi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	P. Saeko	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	P. Bakri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	P. Karno	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	P. Yatmo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
37	P. Padi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	P. Taji	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
39	P. Gimun	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40	P. Kacung Hadi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
41	P. Juharli	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
42	P. Kasdi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43	P. Kasmuin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Total		215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
Rata-rata		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Lampiran 2f. Curahan Tenaga Kerja Usahatani Tembakau Tahap Pasca Panen

No.	Nama Responden	Sortir		Pemeraman		Rajang dan Eler		Penjemuran		Pengemasan	
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W
1	P. Ferry	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
2	P. Wahyudi	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
3	P. Panut	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
4	P. Maji	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
5	P. Tari	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
6	P. Nur Alim	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
7	P. Timan	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
8	P. Gimam	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
9	P. Yanto	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
10	P. Sumiran	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
11	P. Ramiji	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
12	P. Sukadi	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
13	P. Garman	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
14	P. Jaenuri	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
15	P. Taji	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
16	P. Ngari	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
17	P. Sukiman	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
18	P. Juwadi	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
19	P. Suraji	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
20	P. Maejan	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
21	P. Suprat	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0

22	P. Sukar	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
23	P. Mat Raji	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
24	P. Sukardi	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
25	P. Puguh	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
26	P. Suramin	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
27	P. Supono	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
28	P. Lasemo	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
29	P. Arif	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
30	P. Dahlan	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
31	P. Marno	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
32	P. Agus Budi	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
33	P. Saeko	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
34	P. Bakri	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
35	P. Karno	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
36	P. Yatmo	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
37	P. Padi	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
38	P. Taji	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
39	P. Gimun	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
40	P. Kacung Hadi	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
41	P. Juharli	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
42	P. Kasdi	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
43	P. Kasmuin	6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0
Total		268,75	268,75	0	0	1075	1612,5	806,25	806,25	107,5	0
Rata-rata		6,25	6,25	0	0	25	37,5	18,75	18,75	2,5	0

Lampiran 3a. Sistem Kelembagaan Upah Usahatani Tembakau Tahap Pembibitan di Kabupaten Lamongan

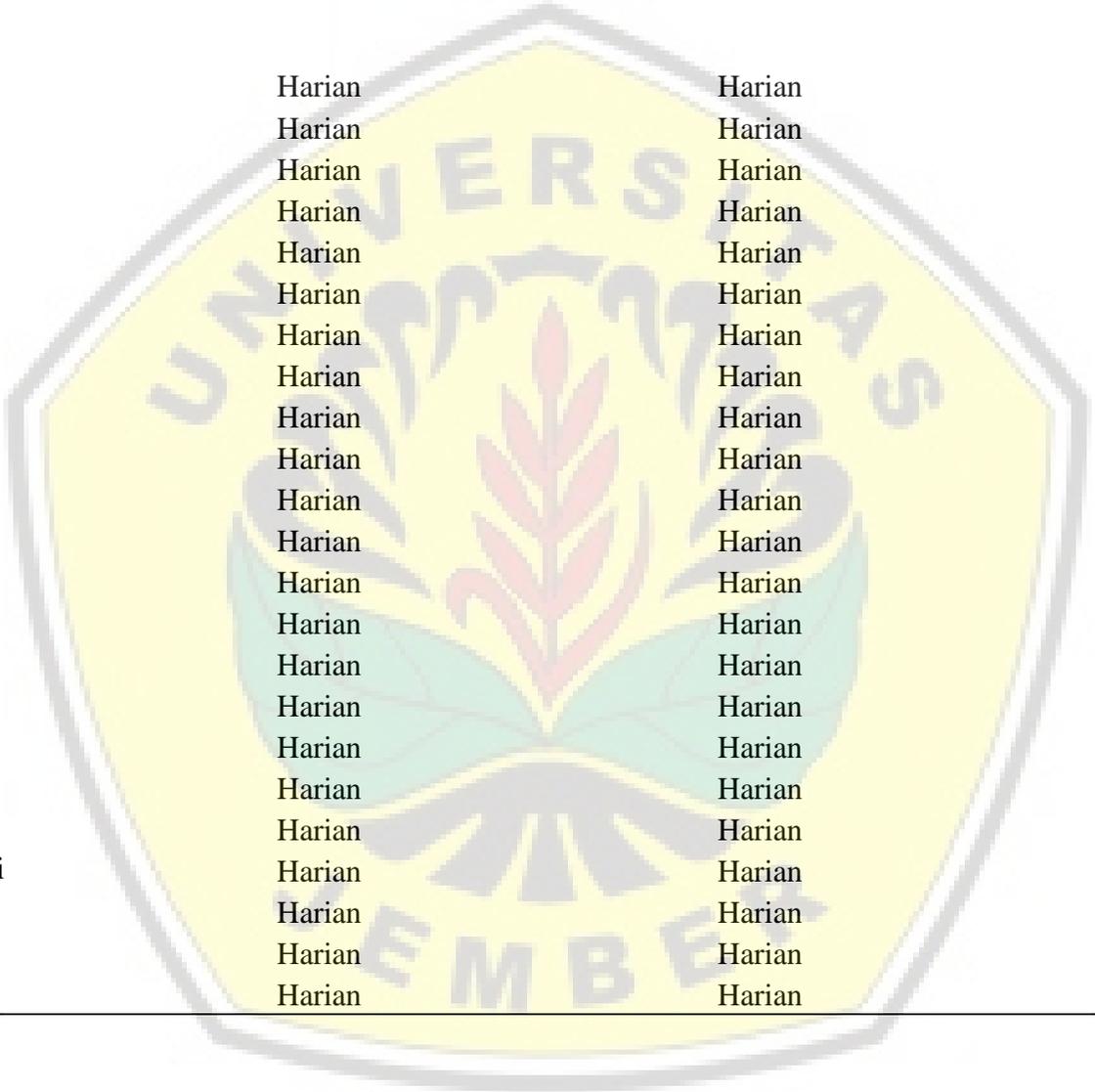
No.	Nama Responden	Persiapan Pembibitan	Pembibitan	Pemeliharaan Benih
1	P. Ferry	Harian	Harian	Harian
2	P. Wahyudi	Harian	Harian	Harian
3	P. Panut	Harian	Harian	Harian
4	P. Maji	Harian	Harian	Harian
5	P. Tari	Harian	Harian	Harian
6	P. Nur Alim	Harian	Harian	Harian
7	P. Timan	Harian	Harian	Harian
8	P. Gimam	Harian	Harian	Harian
9	P. Yanto	Harian	Harian	Harian
10	P. Sumiran	Harian	Harian	Harian
11	P. Ramiji	Harian	Harian	Harian
12	P. Sukadi	Harian	Harian	Harian
13	P. Garman	Harian	Harian	Harian
14	P. Jaenuri	Harian	Harian	Harian
15	P. Taji	Harian	Harian	Harian
16	P. Ngari	Harian	Harian	Harian
17	P. Sukiman	Harian	Harian	Harian
18	P. Juwadi	Harian	Harian	Harian
19	P. Suraji	Harian	Harian	Harian
20	P. Maejan	Harian	Harian	Harian



21	P. Suprat	Harian	Harian	Harian
22	P. Sukar	Harian	Harian	Harian
23	P. Mat Raji	Harian	Harian	Harian
24	P. Sukardi	Harian	Harian	Harian
25	P. Puguh	Harian	Harian	Harian
26	P. Suramin	Harian	Harian	Harian
27	P. Supono	Harian	Harian	Harian
28	P. Lasemo	Harian	Harian	Harian
29	P. Arif	Harian	Harian	Harian
30	P. Dahlan	Harian	Harian	Harian
31	P. Marno	Harian	Harian	Harian
32	P. Agus Budi	Harian	Harian	Harian
33	P. Saeko	Harian	Harian	Harian
34	P. Bakri	Harian	Harian	Harian
35	P. Karno	Harian	Harian	Harian
36	P. Yatmo	Harian	Harian	Harian
37	P. Padi	Harian	Harian	Harian
38	P. Taji	Harian	Harian	Harian
39	P. Gimun	Harian	Harian	Harian
40	P. Kacung Hadi	Harian	Harian	Harian
41	P. Juharli	Harian	Harian	Harian
42	P. Kasdi	Harian	Harian	Harian
43	P. Kasmuin	Harian	Harian	Harian

Lampiran 3b. Sistem Kelembagaan Upah Usahatani Tembakau Tahap Persiapan Media Tanam di Kabupaten Lamongan

No.	Nama Responden	Pembersihan Jerami	Pembuatan Got	Pembajakan
1	P. Ferry	Harian	Harian	Borongan
2	P. Wahyudi	Harian	Harian	Borongan
3	P. Panut	Harian	Harian	Borongan
4	P. Maji	Harian	Harian	Borongan
5	P. Tari	Harian	Harian	Borongan
6	P. Nur Alim	Harian	Harian	Borongan
7	P. Timan	Harian	Harian	Borongan
8	P. Gimam	Harian	Harian	Borongan
9	P. Yanto	Harian	Harian	Borongan
10	P. Sumiran	Harian	Harian	Borongan
11	P. Ramiji	Harian	Harian	Borongan
12	P. Sukadi	Harian	Harian	Borongan
13	P. Garman	Harian	Harian	Borongan
14	P. Jaenuri	Harian	Harian	Borongan
15	P. Taji	Harian	Harian	Borongan
16	P. Ngari	Harian	Harian	Borongan
17	P. Sukiman	Harian	Harian	Borongan
18	P. Juwadi	Harian	Harian	Borongan
19	P. Suraji	Harian	Harian	Borongan
20	P. Maejan	Harian	Harian	Borongan

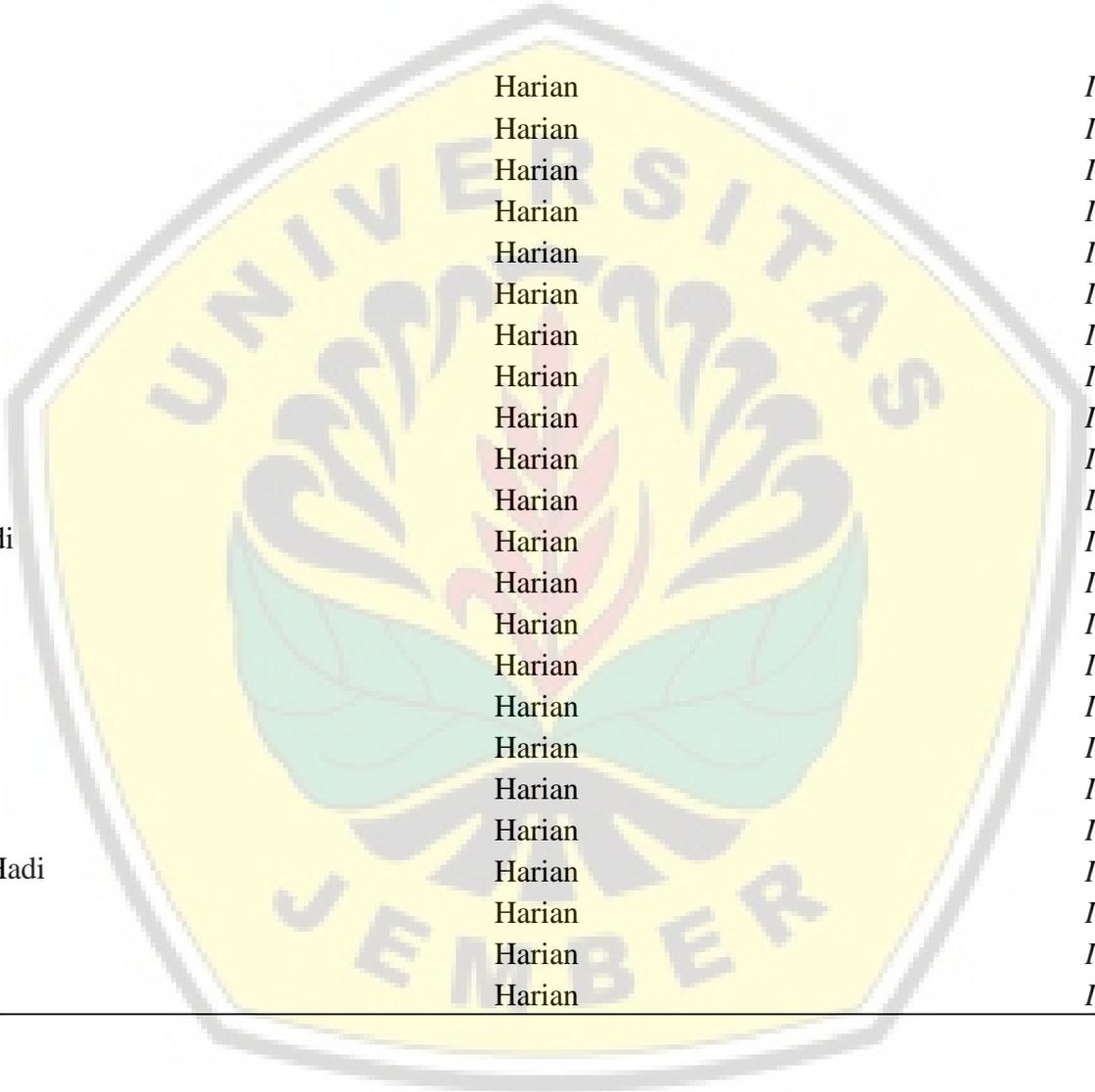


The logo of Universitas Jember is a large, semi-transparent watermark in the center of the page. It features a yellow shield with a green border. Inside the shield, there is a stylized red and green plant or tree. The word 'UNIVERSITAS' is written in a large, grey, serif font across the top of the shield, and 'JEMBER' is written across the bottom. The background of the shield is yellow.

21	P. Suprat	Harian	Harian	Borongon
22	P. Sukar	Harian	Harian	Borongon
23	P. Mat Raji	Harian	Harian	Borongon
24	P. Sukardi	Harian	Harian	Borongon
25	P. Puguh	Harian	Harian	Borongon
26	P. Suramin	Harian	Harian	Borongon
27	P. Supono	Harian	Harian	Borongon
28	P. Lasemo	Harian	Harian	Borongon
29	P. Arif	Harian	Harian	Borongon
30	P. Dahlan	Harian	Harian	Borongon
31	P. Marno	Harian	Harian	Borongon
32	P. Agus Budi	Harian	Harian	Borongon
33	P. Saeko	Harian	Harian	Borongon
34	P. Bakri	Harian	Harian	Borongon
35	P. Karno	Harian	Harian	Borongon
36	P. Yatmo	Harian	Harian	Borongon
37	P. Padi	Harian	Harian	Borongon
38	P. Taji	Harian	Harian	Borongon
39	P. Gimun	Harian	Harian	Borongon
40	P. Kacung Hadi	Harian	Harian	Borongon
41	P. Juharli	Harian	Harian	Borongon
42	P. Kasdi	Harian	Harian	Borongon
43	P. Kasmuin	Harian	Harian	Borongon

Lampiran 3c. Sistem Kelembagaan Upah Usahatani Tembakau Tahap Penanaman di Kabupaten Lamongan

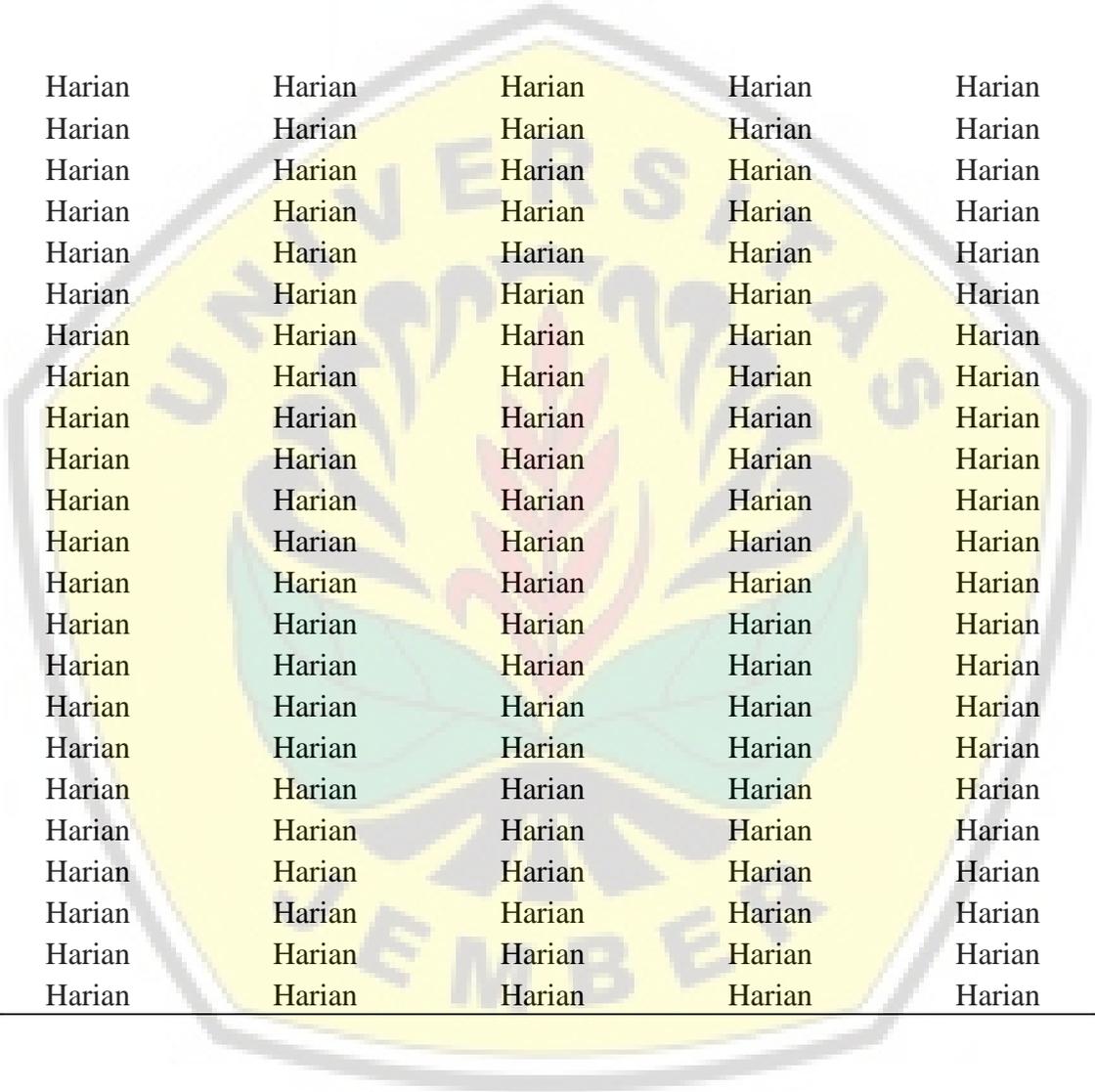
No.	Nama Responden	Pembuatan Lubang Tanam	Penanaman
1	P. Ferry	Harian	<i>Irutan</i>
2	P. Wahyudi	Harian	<i>Irutan</i>
3	P. Panut	Harian	<i>Irutan</i>
4	P. Maji	Harian	<i>Irutan</i>
5	P. Tari	Harian	<i>Irutan</i>
6	P. Nur Alim	Harian	<i>Irutan</i>
7	P. Timan	Harian	<i>Irutan</i>
8	P. Gimam	Harian	<i>Irutan</i>
9	P. Yanto	Harian	<i>Irutan</i>
10	P. Sumiran	Harian	<i>Irutan</i>
11	P. Ramiji	Harian	<i>Irutan</i>
12	P. Sukadi	Harian	<i>Irutan</i>
13	P. Garman	Harian	<i>Irutan</i>
14	P. Jaenuri	Harian	<i>Irutan</i>
15	P. Taji	Harian	<i>Irutan</i>
16	P. Ngari	Harian	<i>Irutan</i>
17	P. Sukiman	Harian	<i>Irutan</i>
18	P. Juwadi	Harian	<i>Irutan</i>
19	P. Suraji	Harian	<i>Irutan</i>
20	P. Maejan	Harian	<i>Irutan</i>



21	P. Suprat	Harian	<i>Irutan</i>
22	P. Sukar	Harian	<i>Irutan</i>
23	P. Mat Raji	Harian	<i>Irutan</i>
24	P. Sukardi	Harian	<i>Irutan</i>
25	P. Puguh	Harian	<i>Irutan</i>
26	P. Suramin	Harian	<i>Irutan</i>
27	P. Supono	Harian	<i>Irutan</i>
28	P. Lasemo	Harian	<i>Irutan</i>
29	P. Arif	Harian	<i>Irutan</i>
30	P. Dahlan	Harian	<i>Irutan</i>
31	P. Marno	Harian	<i>Irutan</i>
32	P. Agus Budi	Harian	<i>Irutan</i>
33	P. Saeko	Harian	<i>Irutan</i>
34	P. Bakri	Harian	<i>Irutan</i>
35	P. Karno	Harian	<i>Irutan</i>
36	P. Yatmo	Harian	<i>Irutan</i>
37	P. Padi	Harian	<i>Irutan</i>
38	P. Taji	Harian	<i>Irutan</i>
39	P. Gimun	Harian	<i>Irutan</i>
40	P. Kacung Hadi	Harian	<i>Irutan</i>
41	P. Juharli	Harian	<i>Irutan</i>
42	P. Kasdi	Harian	<i>Irutan</i>
43	P. Kasmuin	Harian	<i>Irutan</i>

Lampiran 3d. Sistem Kelembagaan Upah Usahatani Tembakau Tahap Pemeliharaan di Kabupaten Lamongan

No.	Nama Responden	Penyiraman	Penyulaman	Penyiangan	Pemupukan	Pemangkasan	Pengendalian HPT
1	P. Ferry	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
2	P. Wahyudi	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
3	P. Panut	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
4	P. Maji	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
5	P. Tari	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
6	P. Nur Alim	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
7	P. Timan	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
8	P. Gimam	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
9	P. Yanto	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
10	P. Sumiran	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
11	P. Ramiji	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
12	P. Sukadi	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
13	P. Garman	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
14	P. Jaenuri	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
15	P. Taji	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
16	P. Ngari	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
17	P. Sukiman	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
18	P. Juwadi	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
19	P. Suraji	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
20	P. Maejan	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian



21	P. Suprat	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
22	P. Sukar	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
23	P. Mat Raji	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
24	P. Sukardi	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
25	P. Puguh	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
26	P. Suramin	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
27	P. Supono	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
28	P. Lasemo	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
29	P. Arif	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
30	P. Dahlan	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
31	P. Marno	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
32	P. Agus Budi	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
33	P. Saeko	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
34	P. Bakri	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
35	P. Karno	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
36	P. Yatmo	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
37	P. Padi	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
38	P. Taji	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
39	P. Gimun	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
40	P. Kacung Hadi	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
41	P. Juharli	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
42	P. Kasdi	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian
43	P. Kasmuin	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian	Harian

Lampiran 3e. Sistem Kelembagaan Upah Usahatani Tembakau Tahap Panen di Kabupaten Lamongan

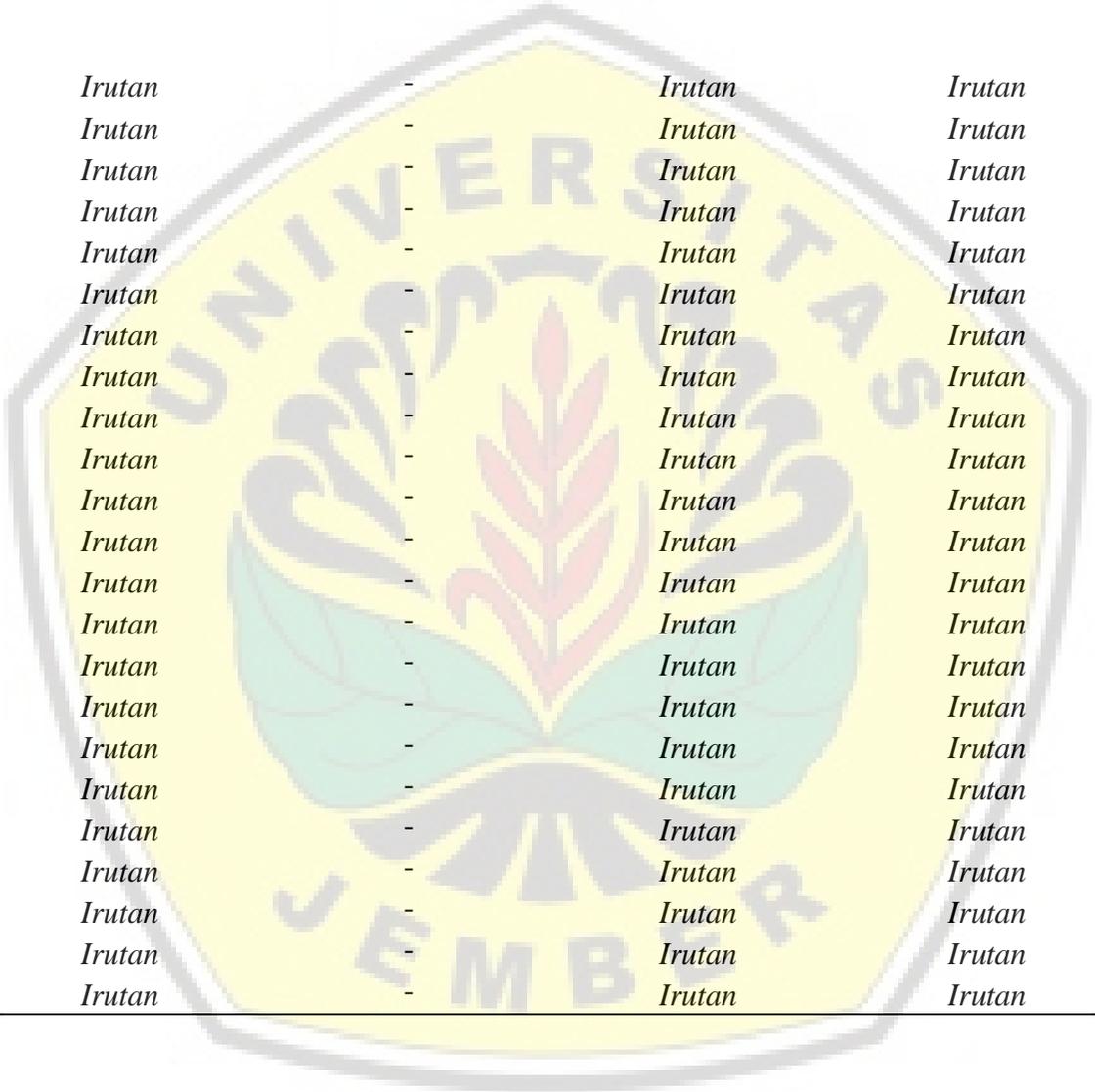
No.	Nama Responden	Petik-1	Petik-2	Petik-3	Petik-4	Petik-5
1	P. Ferry	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
2	P. Wahyudi	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
3	P. Panut	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
4	P. Maji	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
5	P. Tari	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
6	P. Nur Alim	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
7	P. Timan	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
8	P. Gimam	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
9	P. Yanto	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
10	P. Sumiran	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
11	P. Ramiji	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
12	P. Sukadi	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
13	P. Garman	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
14	P. Jaenuri	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
15	P. Taji	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
16	P. Ngari	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
17	P. Sukiman	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
18	P. Juwadi	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
19	P. Suraji	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
20	P. Maejan	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>



21	P. Suprat	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
22	P. Sukar	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
23	P. Mat Raji	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
24	P. Sukardi	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
25	P. Puguh	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
26	P. Suramin	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
27	P. Supono	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
28	P. Lasemo	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
29	P. Arif	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
30	P. Dahlan	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
31	P. Marno	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
32	P. Agus Budi	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
33	P. Saeko	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
34	P. Bakri	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
35	P. Karno	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
36	P. Yatmo	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
37	P. Padi	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
38	P. Taji	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
39	P. Gimun	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
40	P. Kacung Hadi	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
41	P. Juharli	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
42	P. Kasdi	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
43	P. Kasmuin	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>

Lampiran 3f. Sistem Kelembagaan Upah Usahatani Tembakau Tahap Pasca Panen di Kabupaten Lamongan

No.	Nama Responden	Sortir	Pemeraman	Rajang dan Eler	Penjemuran	Pengemasan
1	P. Ferry	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
2	P. Wahyudi	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
3	P. Panut	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
4	P. Maji	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
5	P. Tari	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
6	P. Nur Alim	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
7	P. Timan	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
8	P. Gimam	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
9	P. Yanto	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
10	P. Sumiran	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
11	P. Ramiji	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
12	P. Sukadi	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
13	P. Garman	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
14	P. Jaenuri	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
15	P. Taji	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
16	P. Ngari	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
17	P. Sukiman	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
18	P. Juwadi	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
19	P. Suraji	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
20	P. Maejan	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>



21	P. Suprat	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
22	P. Sukar	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
23	P. Mat Raji	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
24	P. Sukardi	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
25	P. Puguh	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
26	P. Suramin	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
27	P. Supono	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
28	P. Lasemo	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
29	P. Arif	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
30	P. Dahlan	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
31	P. Marno	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
32	P. Agus Budi	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
33	P. Saeko	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
34	P. Bakri	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
35	P. Karno	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
36	P. Yatmo	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
37	P. Padi	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
38	P. Taji	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
39	P. Gimun	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
40	P. Kacung Hadi	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
41	P. Juharli	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
42	P. Kasdi	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>
43	P. Kasmuin	<i>Irutan</i>	-	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>	<i>Irutan</i>

Lampiran 4a. Biaya Tetap Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan

No.	Nama Responden	Cangkul	Sabit	Ember	Alat Rajang
1	P. Ferry	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 100.000
2	P. Wahyudi	Rp 13.889	Rp 12.500	Rp 5.000	Rp 93.333
3	P. Panut	Rp 12.500	Rp 8.333	Rp 3.333	Rp 90.000
4	P. Maji	Rp 16.667	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 100.000
5	P. Tari	Rp 16.667	Rp 12.500	Rp 6.667	Rp 100.000
6	P. Nur Alim	Rp 25.000	Rp 40.000	Rp 8.333	Rp 250.000
7	P. Timan	Rp 27.778	Rp 37.500	Rp 8.333	Rp 113.333
8	P. Giman	Rp 16.667	Rp 12.500	Rp 5.000	Rp 100.000
9	P. Yanto	Rp 13.333	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 93.333
10	P. Sumiran	Rp 33.333	Rp 12.500	Rp 6.667	Rp 100.000
11	P. Ramiji	Rp 12.500	Rp 16.667	Rp 8.333	Rp 113.333
12	P. Sukadi	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 3.333	Rp 93.333
13	P. Garman	Rp 25.000	Rp 22.222	Rp 6.667	Rp 100.000
14	P. Jaenuri	Rp 13.333	Rp 12.500	Rp 3.333	Rp 93.333
15	P. Taji	Rp 37.500	Rp 33.333	Rp 8.333	Rp 113.333
16	P. Ngari	Rp 20.000	Rp 12.500	Rp 3.333	Rp 100.000
17	P. Sukiman	Rp 20.000	Rp 12.500	Rp 3.333	Rp 90.000
18	P. Juwadi	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 6.667	Rp 100.000
19	P. Suraji	Rp 37.500	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 113.333
20	P. Maejan	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 8.333	Rp 100.000
21	P. Suprat	Rp 12.500	Rp 10.000	Rp 3.333	Rp 90.000

22	P. Sukar	Rp	26.667	Rp	10.000	Rp	8.333	Rp	100.000
23	P. Mat Raji	Rp	20.000	Rp	25.000	Rp	8.333	Rp	113.333
24	P. Sukardi	Rp	13.333	Rp	12.500	Rp	5.000	Rp	100.000
25	P. Puguh	Rp	13.889	Rp	10.000	Rp	3.333	Rp	90.000
26	P. Suramin	Rp	12.500	Rp	8.333	Rp	5.000	Rp	100.000
27	P. Supono	Rp	25.000	Rp	25.000	Rp	5.000	Rp	113.333
28	P. Lasemo	Rp	16.667	Rp	25.000	Rp	5.000	Rp	93.333
29	P. Arif	Rp	37.500	Rp	40.000	Rp	8.333	Rp	100.000
30	P. Dahlan	Rp	20.000	Rp	37.500	Rp	6.667	Rp	113.333
31	P. Marno	Rp	16.667	Rp	10.000	Rp	6.667	Rp	100.000
32	P. Agus Budi	Rp	25.000	Rp	33.333	Rp	11.667	Rp	250.000
33	P. Saeko	Rp	41.667	Rp	20.000	Rp	8.333	Rp	100.000
34	P. Bakri	Rp	25.000	Rp	15.000	Rp	10.000	Rp	46.667
35	P. Karno	Rp	20.833	Rp	40.000	Rp	8.333	Rp	113.333
36	P. Yatmo	Rp	12.500	Rp	10.000	Rp	6.667	Rp	100.000
37	P. Padi	Rp	41.667	Rp	30.000	Rp	5.000	Rp	113.333
38	P. Taji	Rp	25.000	Rp	22.222	Rp	8.333	Rp	100.000
39	P. Gimun	Rp	13.889	Rp	10.000	Rp	8.333	Rp	100.000
40	P. Kacung Hadi	Rp	26.667	Rp	22.222	Rp	6.667	Rp	113.333
41	P. Juharli	Rp	12.500	Rp	11.111	Rp	5.000	Rp	90.000
42	P. Kasdi	Rp	16.667	Rp	12.500	Rp	5.000	Rp	100.000
43	P. Kasmuin	Rp	16.667	Rp	16.667	Rp	5.000	Rp	100.000
Total		Rp	909.444	Rp	846.944	Rp	273.333	Rp	4.596.667
Rata-rata		Rp	21.150	Rp	19.696	Rp	6.357	Rp	106.899

No.	Nama Responden	Diesel Air	Bilik Jemur	Timbangan	Mesin Potong Rumput
1	P. Ferry	Rp -	Rp 100.000	Rp 23.333	Rp -
2	P. Wahyudi	Rp -	Rp 66.667	Rp -	Rp -
3	P. Panut	Rp -	Rp 33.333	Rp -	Rp -
4	P. Maji	Rp -	Rp 66.667	Rp -	Rp -
5	P. Tari	Rp -	Rp 100.000	Rp 20.000	Rp -
6	P. Nur Alim	Rp 151.667	Rp 166.667	Rp 83.333	Rp 45.000
7	P. Timan	Rp 116.667	Rp 166.667	Rp 23.333	Rp 36.667
8	P. Gimam	Rp -	Rp 66.667	Rp -	Rp -
9	P. Yanto	Rp -	Rp 66.667	Rp 23.333	Rp -
10	P. Sumiran	Rp -	Rp 66.667	Rp -	Rp -
11	P. Ramiji	Rp 103.333	Rp 133.333	Rp 26.667	Rp -
12	P. Sukadi	Rp -	Rp 50.000	Rp -	Rp -
13	P. Garman	Rp -	Rp 166.667	Rp 80.000	Rp 40.000
14	P. Jaenuri	Rp -	Rp 50.000	Rp -	Rp -
15	P. Taji	Rp -	Rp 200.000	Rp 60.000	Rp -
16	P. Ngari	Rp -	Rp 66.667	Rp -	Rp -
17	P. Sukiman	Rp -	Rp 66.667	Rp -	Rp -
18	P. Juwadi	Rp -	Rp 133.333	Rp -	Rp -
19	P. Suraji	Rp 151.667	Rp 200.000	Rp 76.667	Rp 40.000
20	P. Maejan	Rp 116.667	Rp 133.333	Rp 70.000	Rp 30.000
21	P. Suprat	Rp -	Rp 50.000	Rp -	Rp -
22	P. Sukar	Rp -	Rp 66.667	Rp -	Rp -
23	P. Mat Raji	Rp 123.333	Rp 66.667	Rp 50.000	Rp 43.333

24	P. Sukardi	Rp	-	Rp	66.667	Rp	-	Rp	-
25	P. Puguh	Rp	-	Rp	66.667	Rp	-	Rp	-
26	P. Suramin	Rp	-	Rp	66.667	Rp	-	Rp	-
27	P. Supono	Rp	116.667	Rp	66.667	Rp	23.333	Rp	-
28	P. Lasemo	Rp	-	Rp	66.667	Rp	-	Rp	-
29	P. Arif	Rp	116.667	Rp	66.667	Rp	70.000	Rp	40.000
30	P. Dahlan	Rp	-	Rp	66.667	Rp	24.667	Rp	-
31	P. Marno	Rp	103.333	Rp	66.667	Rp	76.667	Rp	40.000
32	P. Agus Budi	Rp	156.667	Rp	200.000	Rp	83.333	Rp	45.000
33	P. Saeko	Rp	116.667	Rp	166.667	Rp	23.333	Rp	-
34	P. Bakri	Rp	103.333	Rp	266.667	Rp	66.667	Rp	36.667
35	P. Karno	Rp	116.667	Rp	133.333	Rp	60.000	Rp	36.667
36	P. Yatmo	Rp	-	Rp	100.000	Rp	-	Rp	-
37	P. Padi	Rp	-	Rp	66.667	Rp	26.667	Rp	-
38	P. Taji	Rp	116.667	Rp	100.000	Rp	83.333	Rp	31.667
39	P. Gimun	Rp	-	Rp	66.667	Rp	-	Rp	-
40	P. Kacung Hadi	Rp	116.667	Rp	133.333	Rp	60.000	Rp	41.667
41	P. Juharli	Rp	-	Rp	66.667	Rp	-	Rp	-
42	P. Kasdi	Rp	-	Rp	66.667	Rp	-	Rp	-
43	P. Kasmuin	Rp	-	Rp	66.667	Rp	-	Rp	-
Total		Rp	1.826.667	Rp	4.250.000	Rp	1.134.667	Rp	506.667
Rata-rata		Rp	42.481	Rp	98.837	Rp	26.388	Rp	11.783

Lampiran 4b. Biaya Variabel Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan

No.	Nama Responden	Pupuk Fertila	Pupuk ZA	Pupuk Urea	Pupuk SP-36
1	P. Ferry	Rp 300.000	Rp 210.000	Rp 180.000	Rp 200.000
2	P. Wahyudi	Rp 300.000	Rp 210.000	Rp 180.000	Rp 200.000
3	P. Panut	Rp -	Rp 70.000	Rp 90.000	Rp 100.000
4	P. Maji	Rp 300.000	Rp 210.000	Rp 180.000	Rp 200.000
5	P. Tari	Rp 600.000	Rp 280.000	Rp 270.000	Rp 300.000
6	P. Nur Alim	Rp 1.200.000	Rp 420.000	Rp 360.000	Rp 400.000
7	P. Timan	Rp 1.200.000	Rp 420.000	Rp 360.000	Rp 400.000
8	P. Gimam	Rp 240.000	Rp 210.000	Rp 180.000	Rp 200.000
9	P. Yanto	Rp -	Rp 210.000	Rp 180.000	Rp 200.000
10	P. Sumiran	Rp -	Rp 210.000	Rp 180.000	Rp 200.000
11	P. Ramiji	Rp 600.000	Rp 280.000	Rp 270.000	Rp 300.000
12	P. Sukadi	Rp -	Rp 70.000	Rp 90.000	Rp 100.000
13	P. Garman	Rp 1.200.000	Rp 280.000	Rp 360.000	Rp 400.000
14	P. Jaenuri	Rp -	Rp 70.000	Rp 90.000	Rp 100.000
15	P. Taji	Rp 1.200.000	Rp 420.000	Rp 540.000	Rp 600.000
16	P. Ngari	Rp -	Rp 140.000	Rp 90.000	Rp 200.000
17	P. Sukiman	Rp -	Rp 140.000	Rp 90.000	Rp 200.000
18	P. Juwadi	Rp -	Rp 210.000	Rp 180.000	Rp 200.000
19	P. Suraji	Rp 2.400.000	Rp 840.000	Rp 720.000	Rp 800.000
20	P. Maejan	Rp 1.200.000	Rp 420.000	Rp 360.000	Rp 400.000
21	P. Suprat	Rp -	Rp 70.000	Rp 90.000	Rp 100.000

Digital Repository Universitas Jember

22	P. Sukar	Rp	600.000	Rp	280.000	Rp	270.000	Rp	300.000
23	P. Mat Raji	Rp	1.800.000	Rp	630.000	Rp	540.000	Rp	600.000
24	P. Sukardi	Rp	300.000	Rp	210.000	Rp	180.000	Rp	200.000
25	P. Pugh	Rp	-	Rp	210.000	Rp	180.000	Rp	200.000
26	P. Suramin	Rp	-	Rp	210.000	Rp	180.000	Rp	200.000
27	P. Supono	Rp	600.000	Rp	280.000	Rp	270.000	Rp	300.000
28	P. Lasemo	Rp	300.000	Rp	210.000	Rp	180.000	Rp	200.000
29	P. Arif	Rp	1.200.000	Rp	280.000	Rp	360.000	Rp	400.000
30	P. Dahlan	Rp	600.000	Rp	280.000	Rp	270.000	Rp	300.000
31	P. Marno	Rp	300.000	Rp	210.000	Rp	180.000	Rp	200.000
32	P. Agus Budi	Rp	2.400.000	Rp	840.000	Rp	720.000	Rp	800.000
33	P. Saeko	Rp	1.200.000	Rp	420.000	Rp	360.000	Rp	400.000
34	P. Bakri	Rp	1.200.000	Rp	280.000	Rp	270.000	Rp	300.000
35	P. Karno	Rp	1.200.000	Rp	630.000	Rp	540.000	Rp	600.000
36	P. Yatmo	Rp	300.000	Rp	210.000	Rp	180.000	Rp	200.000
37	P. Padi	Rp	1.200.000	Rp	420.000	Rp	360.000	Rp	400.000
38	P. Taji	Rp	1.200.000	Rp	420.000	Rp	360.000	Rp	400.000
39	P. Gimun	Rp	180.000	Rp	210.000	Rp	180.000	Rp	200.000
40	P. Kacung Hadi	Rp	1.200.000	Rp	420.000	Rp	360.000	Rp	400.000
41	P. Juharli	Rp	-	Rp	140.000	Rp	90.000	Rp	200.000
42	P. Kasdi	Rp	240.000	Rp	210.000	Rp	180.000	Rp	200.000
43	P. Kasmuin	Rp	300.000	Rp	210.000	Rp	180.000	Rp	200.000
Total		Rp	27.060.000	Rp	12.600.000	Rp	11.430.000	Rp	13.000.000
Rata-rata		Rp	629.302	Rp	293.023	Rp	265.814	Rp	302.326

No.	Nama Responden	Pestisida	Benih	Kemasan	Bibit
1	P. Ferry	Rp 180.000	Rp -	Rp 34.000	Rp 525.000
2	P. Wahyudi	Rp 180.000	Rp -	Rp 32.000	Rp 525.000
3	P. Panut	Rp 120.000	Rp -	Rp 16.000	Rp 280.000
4	P. Maji	Rp 180.000	Rp -	Rp 30.000	Rp 525.000
5	P. Tari	Rp 180.000	Rp -	Rp 44.000	Rp 875.000
6	P. Nur Alim	Rp 240.000	Rp -	Rp 68.000	Rp 1.050.000
7	P. Timan	Rp 240.000	Rp -	Rp 70.000	Rp 1.050.000
8	P. Gimani	Rp 180.000	Rp -	Rp 28.000	Rp 525.000
9	P. Yanto	Rp 180.000	Rp -	Rp 30.000	Rp 525.000
10	P. Sumiran	Rp 180.000	Rp -	Rp 32.000	Rp 525.000
11	P. Ramiji	Rp 180.000	Rp -	Rp 40.000	Rp 875.000
12	P. Sukadi	Rp 120.000	Rp -	Rp 16.000	Rp 280.000
13	P. Garman	Rp 240.000	Rp 500.000	Rp 70.000	Rp -
14	P. Jaenuri	Rp 120.000	Rp -	Rp 14.000	Rp 280.000
15	P. Taji	Rp 240.000	Rp 500.000	Rp 92.000	Rp -
16	P. Ngari	Rp 120.000	Rp -	Rp 24.000	Rp 525.000
17	P. Sukiman	Rp 120.000	Rp -	Rp 26.000	Rp 525.000
18	P. Juwadi	Rp 180.000	Rp -	Rp 32.000	Rp 875.000
19	P. Suraji	Rp 360.000	Rp 500.000	Rp 144.000	Rp -
20	P. Maejan	Rp 240.000	Rp 500.000	Rp 70.000	Rp -
21	P. Suprat	Rp 120.000	Rp -	Rp 16.000	Rp 280.000
22	P. Sukar	Rp 180.000	Rp 500.000	Rp 40.000	Rp -
23	P. Mat Raji	Rp 300.000	Rp -	Rp 104.000	Rp 1.050.000

24	P. Sukardi	Rp	180.000	Rp	-	Rp	34.000	Rp	525.000
25	P. Puguh	Rp	180.000	Rp	-	Rp	36.000	Rp	525.000
26	P. Suramin	Rp	180.000	Rp	-	Rp	34.000	Rp	525.000
27	P. Supono	Rp	180.000	Rp	-	Rp	40.000	Rp	875.000
28	P. Lasemo	Rp	180.000	Rp	500.000	Rp	28.000	Rp	-
29	P. Arif	Rp	240.000	Rp	-	Rp	72.000	Rp	1.050.000
30	P. Dahlan	Rp	240.000	Rp	-	Rp	42.000	Rp	525.000
31	P. Marno	Rp	180.000	Rp	-	Rp	30.000	Rp	875.000
32	P. Agus Budi	Rp	360.000	Rp	500.000	Rp	144.000	Rp	-
33	P. Saeko	Rp	240.000	Rp	-	Rp	70.000	Rp	1.050.000
34	P. Bakri	Rp	120.000	Rp	500.000	Rp	40.000	Rp	-
35	P. Karno	Rp	300.000	Rp	500.000	Rp	96.000	Rp	-
36	P. Yatmo	Rp	180.000	Rp	-	Rp	40.000	Rp	875.000
37	P. Padi	Rp	240.000	Rp	500.000	Rp	72.000	Rp	-
38	P. Taji	Rp	240.000	Rp	-	Rp	80.000	Rp	1.050.000
39	P. Gimun	Rp	180.000	Rp	-	Rp	26.000	Rp	525.000
40	P. Kacung Hadi	Rp	240.000	Rp	500.000	Rp	74.000	Rp	-
41	P. Juharli	Rp	120.000	Rp	-	Rp	20.000	Rp	525.000
42	P. Kasdi	Rp	180.000	Rp	-	Rp	32.000	Rp	525.000
43	P. Kasmuin	Rp	180.000	Rp	-	Rp	34.000	Rp	525.000
Total		Rp	8.520.000	Rp	5.500.000	Rp	2.116.000	Rp	21.070.000
Rata-rata		Rp	198.140	Rp	127.907	Rp	49.209	Rp	490.000

No.	Nama Responden	Tenaga Kerja		Tunjangan Tenaga Kerja	
1	P. Ferry	Rp	5.375.000	Rp	5.107.000
2	P. Wahyudi	Rp	5.655.000	Rp	4.963.000
3	P. Panut	Rp	2.900.000	Rp	4.093.000
4	P. Maji	Rp	5.550.000	Rp	5.142.000
5	P. Tari	Rp	6.435.000	Rp	5.396.000
6	P. Nur Alim	Rp	12.320.000	Rp	7.359.000
7	P. Timan	Rp	11.970.000	Rp	7.289.000
8	P. Giman	Rp	5.550.000	Rp	5.142.000
9	P. Yanto	Rp	5.505.000	Rp	5.106.000
10	P. Sumiran	Rp	5.480.000	Rp	5.128.000
11	P. Ramiji	Rp	6.405.000	Rp	5.372.000
12	P. Sukadi	Rp	2.725.000	Rp	4.058.000
13	P. Garman	Rp	12.520.000	Rp	7.298.000
14	P. Jaenuri	Rp	2.900.000	Rp	4.093.000
15	P. Taji	Rp	14.565.000	Rp	8.098.000
16	P. Ngari	Rp	4.005.000	Rp	4.380.000
17	P. Sukiman	Rp	3.755.000	Rp	4.285.000
18	P. Juwadi	Rp	5.805.000	Rp	5.049.000
19	P. Suraji	Rp	19.920.000	Rp	9.697.000
20	P. Maejan	Rp	11.905.000	Rp	7.058.000
21	P. Suprat	Rp	2.625.000	Rp	4.220.000
22	P. Sukar	Rp	6.910.000	Rp	5.545.000
23	P. Mat Raji	Rp	13.345.000	Rp	7.634.000

24	P. Sukardi	Rp	5.655.000	Rp	5.163.000
25	P. Puguh	Rp	5.575.000	Rp	5.202.000
26	P. Suramin	Rp	5.500.000	Rp	5.142.000
27	P. Supono	Rp	6.710.000	Rp	5.469.000
28	P. Lasemo	Rp	5.905.000	Rp	5.258.000
29	P. Arif	Rp	12.315.000	Rp	7.170.000
30	P. Dahlan	Rp	6.435.000	Rp	5.396.000
31	P. Marno	Rp	6.330.000	Rp	5.280.000
32	P. Agus Budi	Rp	20.510.000	Rp	9.833.000
33	P. Saeko	Rp	11.865.000	Rp	7.005.000
34	P. Bakri	Rp	7.060.000	Rp	5.602.000
35	P. Karno	Rp	13.570.000	Rp	7.827.000
36	P. Yatmo	Rp	5.810.000	Rp	5.203.000
37	P. Padi	Rp	13.115.000	Rp	7.617.000
38	P. Taji	Rp	11.970.000	Rp	7.289.000
39	P. Gimun	Rp	5.655.000	Rp	5.163.000
40	P. Kacung Hadi	Rp	12.520.000	Rp	7.498.000
41	P. Juharli	Rp	3.130.000	Rp	4.079.000
42	P. Kasdi	Rp	5.655.000	Rp	5.163.000
43	P. Kasmuin	Rp	5.375.000	Rp	5.107.000
Total		Rp	344.785.000	Rp	252.978.000
Rata-rata		Rp	8.018.256	Rp	5.883.209

Lampiran 5. Penerimaan Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan

No.	Nama Responden	Daun Bawah-Tengah		Daun Tengah-Atas	
1	P. Ferry	Rp	8.000.000	Rp	15.000.000
2	P. Wahyudi	Rp	6.400.000	Rp	15.000.000
3	P. Panut	Rp	3.000.000	Rp	7.500.000
4	P. Maji	Rp	7.000.000	Rp	12.000.000
5	P. Tari	Rp	8.600.000	Rp	24.000.000
6	P. Nur Alim	Rp	15.000.000	Rp	33.000.000
7	P. Timan	Rp	17.000.000	Rp	27.000.000
8	P. Giman	Rp	6.600.000	Rp	15.000.000
9	P. Yanto	Rp	6.000.000	Rp	15.900.000
10	P. Sumiran	Rp	8.600.000	Rp	13.500.000
11	P. Ramiji	Rp	11.000.000	Rp	20.400.000
12	P. Sukadi	Rp	4.000.000	Rp	6.600.000
13	P. Garman	Rp	15.000.000	Rp	30.000.000
14	P. Jaenuri	Rp	4.000.000	Rp	7.500.000
15	P. Taji	Rp	24.000.000	Rp	39.000.000
16	P. Ngari	Rp	5.600.000	Rp	12.000.000
17	P. Sukiman	Rp	6.000.000	Rp	10.500.000
18	P. Juwadi	Rp	8.000.000	Rp	12.000.000
19	P. Suraji	Rp	28.000.000	Rp	60.000.000
20	P. Maejan	Rp	15.000.000	Rp	30.000.000
21	P. Suprat	Rp	3.600.000	Rp	7.500.000

22	P. Sukar	Rp	10.000.000	Rp	19.500.000
23	P. Mat Raji	Rp	24.000.000	Rp	39.000.000
24	P. Sukardi	Rp	7.000.000	Rp	12.900.000
25	P. Puguh	Rp	8.000.000	Rp	15.000.000
26	P. Suramin	Rp	7.000.000	Rp	13.500.000
27	P. Supono	Rp	10.000.000	Rp	21.000.000
28	P. Lasemo	Rp	8.000.000	Rp	13.500.000
29	P. Arif	Rp	14.000.000	Rp	33.000.000
30	P. Dahlan	Rp	8.000.000	Rp	19.500.000
31	P. Marno	Rp	6.000.000	Rp	16.500.000
32	P. Agus Budi	Rp	24.000.000	Rp	66.000.000
33	P. Saeko	Rp	18.000.000	Rp	28.500.000
34	P. Bakri	Rp	9.000.000	Rp	16.500.000
35	P. Karno	Rp	22.000.000	Rp	36.000.000
36	P. Yatmo	Rp	6.000.000	Rp	16.500.000
37	P. Padi	Rp	16.000.000	Rp	30.000.000
38	P. Taji	Rp	16.000.000	Rp	27.000.000
39	P. Gimun	Rp	7.400.000	Rp	16.500.000
40	P. Kacung Hadi	Rp	15.000.000	Rp	30.000.000
41	P. Juharli	Rp	6.000.000	Rp	12.000.000
42	P. Kasdi	Rp	6.400.000	Rp	15.000.000
43	P. Kasmuin	Rp	7.000.000	Rp	13.500.000
Total		Rp	465.200.000	Rp	924.300.000
Rata-rata		Rp	10.818.605	Rp	21.495.349

Lampiran 6. Perhitungan *R/C Ratio* Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan

Total Penerimaan (TR)	Rp	32.313.953
Total Biaya (TC)	Rp	16.590.776
R/C Ratio		1,95



Lampiran 7. Kuesioner

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS**

KUESIONER

**JUDUL PENELITIAN : KELEMBAGAAN UPAH USAHATANI
TEMBAKAU DI KABUPATEN LAMONGAN**

LOKASI : KABUPATEN LAMONGAN

PELAKSANA WAWANCARA

DESA MENDOGO

Nama : Yuanditra Wahyu Widyanto

NIM : 161510601110

Tanggal Wawancara:

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Nomor HP :

Umur :

Pendidikan :

Jabatan Struktural Desa :

Alamat :

Responden

()

GAMBARAN UMUM

1. Bagaimana keadaan geografis di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?
Jawab:
2. Berapa luas wilayah di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?
Jawab:
3. Bagaimana penggunaan lahan di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?
Jawab:
4. Bagaimana batasan wilayah di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?
Jawab:
5. Apa saja mata pencaharian penduduk di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?
Jawab:
6. Bagaimana kondisi usahatani tembakau di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?
Jawab:
7. Bagaimana sebaran penggunaan lahan usahatani tembakau di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?
Jawab:
8. Apakah kegiatan usahatani tembakau menggunakan tenaga kerja pada setiap tahapannya?
Jawab:
9. Mengapa petani menggunakan tenaga kerja pada tahapan-tahapan usahatani tembakau tersebut?
Jawab:

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS**

KUESIONER

**JUDUL PENELITIAN : KELEMBAGAAN UPAH USAHATANI
TEBKAU DI KABUPATEN LAMONGAN**

**LOKASI : DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

PELAKSANA WAWANCARA

KEY INFORMAN

Nama : Yuanditra Wahyu Widyanto

NIM : 161510601110

Tanggal Wawancara:

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Nomor HP :

Umur :

Pendidikan :

Komoditas Usahatani :

Luas Lahan Total :

Jumlah Petak :

Luas Tiap Petak :

Alamat :

Responden

()

A. SISTEM KELEMBAGAAN UPAH

1. Apa saja sistem kelembagaan upah yang diterapkan pada usahatani tembakau?
 - a. Sistem harian
 - b. Sistem borongan
 - c. Sistem *irutan*
 - d. Lainnya, sebutkan :

Jawab:

2. Sistem kelembagaan upah apa yang sering atau suka diterapkan oleh para petani pada usahatani tembakau?

Jawab:

3. Mengapa para petani sering/suka menerapkan sistem kelembagaan upah tersebut?

Jawab:

B. SISTEM KELEMBAGAAN UPAH HARIAN

1. Bagaimana gambaran umum sistem kelembagaan upah harian yang diterapkan para petani pada usahatani tembakau?

Jawab:

2. Pada tahapan usahatani tembakau apa saja sistem kelembagaan upah harian petani terapkan?

Jawab:

3. Mengapa petani menerapkan sistem kelembagaan upah harian pada tahapan-tahapan tersebut?

Jawab:

4. Sejak kapan sistem kelembagaan upah harian diterapkan petani pada usahatani tembakau?

Jawab:

5. Apakah terdapat perbedaan mekanisme sistem harian dulu dengan sekarang?

Jawab:

6. Bila ada, apa perbedaan tersebut?

Dulu

Jawab:

Sekarang

Jawab:

7. Berapa upah per hari yang diberikan kepada tenaga kerja usahatani tembakau?

Jawab:

8. Berapa lama waktu bekerja yang dilakukan oleh tenaga kerja dalam sistem kelembagaan upah harian?

Jawab:

9. Bagaimana cara petani menentukan jumlah besaran upah yang diberikan dalam sistem kelembagaan upah harian tersebut?

a. Menentukan antar masing-masing petani

b. Kesepakatan kelompok

c. Beracuan pada Upah Minimum Regional

d. Lainnya

Apabila petani menentukan masing-masing, bagaimana mekanisme petani untuk memperhitungkan jumlah upah yang diberikan dalam sistem kelembagaan upah harian tersebut?

Jawab:

Apabila sesuai kesepakatan kelompok, siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan tersebut dan bagaimana mekanisme pengambilan kesepakatan tersebut?

Jawab:

10. Apakah terdapat perbedaan jumlah upah yang diberikan kepada tenaga kerja pria dan tenaga wanita?

Jawab:

Apabila terdapat perbedaan, mengapa hal tersebut dilakukan dan berapa upah yang diberikan kepada tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita?

Jawab:

11. Apakah jumlah upah yang diberikan tersebut sudah sesuai dengan besaran upah yang berlaku di daerah ini?

Jawab:

Apabila sudah sesuai dengan jumlah upah yang berlaku, bagaimana petani memperoleh informasi mengenai jumlah upah yang berlaku tersebut?

Jawab:

Apabila jumlah upah tidak sesuai dengan besaran upah yang berlaku, bagaimana cara petani menetapkan besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja usahatani tembakau?

Jawab:

12. Apakah terdapat perbedaan waktu kerja antara tenaga kerja pria dan wanita pada usahatani tembakau?

Jawab:

Apabila terdapat perbedaan, berapa waktu kerja pria dan wanita serta mengapa hal tersebut dilakukan?

Jawab:

13. Bagaimana mekanisme pemberian upah yang diberikan petani kepada tenaga kerja?

Jawab:

14. Mengapa para petani menerapkan mekanisme pemberian tersebut?

Jawab:

15. Setiap berapa periode terjadi perubahan jumlah upah di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?

- a. 1 tahun sekali
- b. 2 tahun sekali
- c. Lainnya,

16. Faktor apa saja yang menyebabkan perubahan jumlah upah tersebut?

- a. Kenaikan UMR
- b. Kenaikan harga bahan-bahan pokok
- c. Harga barang dan kebutuhan secara umum
- d. Upah pada sektor lain (bangunan, industri, bidang pertokoan, dll)

- e. Lainnya,
17. Apabila terjadi pelanggaran dalam pemberian jumlah upah (memberikan upah lebih dari kesepakatan), apakah yang terjadi dalam lingkungan petani tembakau?
- a. Tidak terjadi apa-apa
- b. Adanya bentuk protes dari petani lain/perselisihan
- c. Lainnya,
18. Bagaimana kelebihan dari sistem kelembagaan upah harian?
- Jawab:
19. Bagaimana kekurangan dari sistem kelembagaan upah harian?
- Jawab:

C. SISTEM KELEMBAGAAN UPAH BORONGAN

1. Bagaimana gambaran umum sistem kelembagaan upah borongan yang petani terapkan pada usahatani tembakau?
- Jawab:
2. Pada tahapan usahatani tembakau apa saja sistem kelembagaan upah borongan petani terapkan?
- Jawab:
3. Mengapa petani menerapkan sistem kelembagaan upah borongan pada tahapan usahatani tembakau tersebut?
- Jawab:
4. Sejak kapan sistem kelembagaan upah borongan diterapkan petani pada usahatani tembakau?
- Jawab:
5. Apakah terdapat perbedaan mekanisme sistem borongan dulu dengan sekarang?
- Jawab:
6. Bila ada, apa perbedaan tersebut?
- Dulu
- Jawab:

Sekarang

Jawab:

7. Berapa besaran upah borongan yang diterapkan pada usahatani tembakau?

Jawab:

8. Mengapa petani menentukan jumlah besaran upah borongan tersebut?

Jawab:

9. Apakah besaran tersebut sudah sesuai dengan besaran yang berlaku di daerah ini?

Jawab:

Apabila sesuai, bagaimana cara petani memperoleh informasi mengenai besaran upah borongan tersebut?

Jawab:

Apabila tidak sesuai, bagaimana cara petani untuk menentukan besaran upah borongan tersebut?

Jawab:

10. Apakah terdapat perbedaan kegiatan kerja antara tenaga kerja pria dan wanita pada sistem kelembagaan upah borongan?

Jawab:

Apabila terdapat perbedaan, apa saja perbedaan tersebut dan mengapa hal tersebut dilakukan?

Jawab:

11. Bagaimana mekanisme pemberian upah yang diberikan petani kepada tenaga kerja?

Jawab:

12. Mengapa para petani menerapkan mekanisme pemberian tersebut?

Jawab:

13. Bagaimana mekanisme petani dalam mendapatkan tenaga kerja pada sistem kelembagaan upah borongan?

Jawab:

14. Setiap berapa periode terjadi perubahan jumlah upah di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?
 - a. 1 tahun sekali
 - b. 2 tahun sekali
 - c. Lainnya,
15. Faktor apa saja yang menyebabkan perubahan jumlah upah tersebut?
 - a. Kenaikan UMR
 - b. Kenaikan harga bahan-bahan pokok
 - c. Harga barang dan kebutuhan secara umum
 - d. Upah pada sektor lain (bangunan, industri, bidang pertokoan, dll)
 - e. Lainnya,
16. Apabila terjadi pelanggaran dalam pemberian jumlah upah (memberikan upah lebih dari kesepakatan), apakah yang terjadi dalam lingkungan petani tembakau?
 - a. Tidak terjadi apa-apa
 - b. Adanya bentuk protes dari petani lain/perselisihan
 - c. Lainnya,
16. Bagaimana kelebihan dari sistem kelembagaan upah borongan?
Jawab:
17. Bagaimana kekurangan dari sistem kelembagaan upah borongan?
Jawab:

D. SISTEM KELEMBAGAAN UPAH *IRUTAN*

1. Bagaimana sistem kelembagaan upah *irutan* yang petani terapkan pada usahatani tembakau?
Jawab:
2. Pada tahapan usahatani tembakau apa saja sistem kelembagaan upah *irutan* petani terapkan?
Jawab:

3. Mengapa petani menerapkan sistem kelembagaan upah *irutan* pada tahapan usahatani tembakau tersebut?

Jawab:

4. Apakah sistem kelembagaan upah *irutan* juga berlaku pada petani yang memiliki luas lahan yang berbeda (minoritas atau jauh lebih luas dari kebanyakan masyarakat petani setempat)?

Jawab: a. Ya b. Tidak

Jika hal tersebut berlaku, bagaimana teknis petani untuk menerapkan sistem kelembagaan upah *irutan*?

Jawab:

Jika hal tersebut tidak berlaku, bagaimana teknis petani untuk menerapkan sistem kelembagaan *irutan* tersebut?

Jawab:

5. Sejak kapan sistem kelembagaan upah *irutan* tersebut diterapkan pada usahatani tembakau di Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan?

Jawab:

6. Apakah terdapat perbedaan sistem kelembagaan upah *irutan* pada zaman dulu dengan kondisi sekarang?

Jawab: a. Ya b. Tidak

Bila terdapat perbedaan, apa perbedaan tersebut ?

Zaman dulu

Jawab:

Sekarang

Jawab:

7. Apakah ada sistem kelembagaan upah lainnya yang diterapkan oleh petani sebelum adanya sistem kelembagaan upah *irutan*?

Jawab: a. Ada b. Tidak

Jika ada, bagaimana teknis dari sistem kelembagaan upah tersebut?

Jawab:

8. Apa tujuan para petani menerapkan sistem kelembagaan upah *irutan* pada usahatani tembakau?

Jawab:

9. Apakah sistem kelembagaan upah *irutan* juga diterapkan pada usahatani komoditas selain tembakau?

Jawab: a. Ya b. Tidak

Jika diterapkan pada komoditas lainnya, pada komoditas apa *irutan* diterapkan dan bagaimana teknisnya?

Jawab:

10. Bagaimana cara petani untuk mendapatkan tenaga kerja dalam sistem kelembagaan upah *irutan*?

Jawab:

11. Siapa yang memiliki peran besar dalam mengambil kesepakatan untuk mendapatkan tenaga kerja pada sistem kelembagaan upah *irutan*?

12. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme sistem kelembagaan upah *irutan*, apakah yang terjadi dalam lingkungan petani tembakau?

a. Tidak terjadi apa-apa

b. Adanya bentuk protes dari petani lain/perselisihan

c. Lainnya,

13. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut?

Jawab:

14. Bagaimana cara petani untuk mempertahankan sistem kelembagaan upah *irutan* tersebut pada usahatani tembakau?

15. Bagaimana kelebihan dari sistem kelembagaan upah *irutan*?

Jawab:

16. Bagaimana kekurangan dari sistem kelembagaan upah *irutan*?

Jawab:

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS**

KUESIONER

**JUDUL PENELITIAN : KELEMBAGAAN UPAH USAHATANI
TEBKAU DI KABUPATEN LAMONGAN**

**LOKASI : DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

PELAKSANA WAWANCARA

PETANI

Nama : Yuanditra Wahyu Widyanto

NIM : 161510601110

Tanggal Wawancara:

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Nomor HP :

Umur :

Pendidikan :

Komoditas Usahatani :

Luas Lahan Total :

Jumlah Petak :

Luas Tiap Petak :

Alamat :

Responden

()

A. Curahan Tenaga Kerja dan Sistem Kelembagaan Upah

Jenis Kegiatan	Rincian Kegiatan	Jumlah Tenaga Kerja		Jam Kerja		Hari Kerja		Metode Upah	Besaran Upah (Rp.)	Keterangan (harian, borongan, irutan)	Besaran Tunjangan			
		P	W	P	W	P	W				Makan dan Minum	Rokok	Lain-lain	
Pembibitan														
	Persiapan pembibitan (pembuatan media, bedengan, dll)													
(Kalo Bibit Bikin Sendiri)	Proses pembibitan (tabur benih)													
	Pemeliharaan benih													
Persiapan Media Tanam														
	Pembersihan jerami													
	Pembuatan got/saluran pembuangan air sekitar lahan													
	Pembajakan/Pencangkulan													
Penanaman														
	Pembuatan lubang tanam													
	Proses tanam													
Pemeliharaan														
	Penyulaman (penggantian tanaman rusak setelah seminggu)													
	Penyiangan (pembersihan gulma/tanaman pesaing)													
	Pemupukan													
	Penyiraman/Pengairan													
	Pengendalian hama dan penyakit													
	Pemangkasan													
Panen														
	Petik-1													
	Petik-2													

B. Biaya Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan

1. Biaya Tetap

No.	Komponen	Satuan	Jumlah	Harga/satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Biaya Lahan (PBB)				
2	Traktor				
3	Mesin Rajang Besar				
4	Alat Rajang (Paron)				
5	Cangkul				
6	Sabit				
7	Diesel Air				
8	Ember				
9	Bilik Bambu (Penjemuran)				
10	Mesin Pemotong Rumput				
11	Timbang				
12					
13					
	TOTAL				

2. Biaya Variabel

No.	Komponen	Satuan	Jumlah	Harga/satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Pupuk Fertila				
2	Pupuk ZA				
3	Pupuk Urea				
4	Pupuk TSP				
5	Pestisida				
6	Benih				
7	Plastik Penutup				
8	Biaya Air				
9	Solar				
10	Bensin				
	TOTAL				

3. Biaya lain-lain

No.	Komponen	Satuan	Jumlah	Harga/satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1					
2					
3					

4					
5					
	TOTAL				

C. Penerimaan Usahatani Tembakau di Kabupaten Lamongan

No.	Komponen	Satuan	Jumlah	Harga/satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Daun bawah-tengah					
2	Daun atas-tengah					
	TOTAL					



Lampiran 7. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan petani tembakau di Dusun Teguhan



Gambar 2. Wawancara dengan salah satu informan kunci Pak Nur Alim



Gambar 3. Wawancara dengan PPL Desa Mendogo di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngimbang



Gambar 4. Kunjungan saat kegiatan *irutan* tahap pasca panen tembakau



Gambar 5. Kegiatan pasca panen tembakau dengan menerapkan sistem kelembagaan upah *irutan*



Gambar 6. Kegiatan penanaman tembakau dengan menerapkan sistem kelembagaan upah *irutan*